



**KEPE**  
press

Studi Tentang Aspek-Aspek Sosial-Budaya  
Masyarakat Daerah Perbatasan:  
Studi Kasus Masyarakat  
di Pulau Miangas



irektorat  
dayaan

2

Sophia M. Hoetagaol  
Nono S. A. Sumampouw  
Julianto Parauba  
Rony Tuage  
Mulyadi Pontororing

Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado

**Studi Tentang Aspek-Aspek Sosial-Budaya  
Masyarakat Daerah Perbatasan: Studi Kasus  
Masyarakat di Pulau Miangas**



**Studi Tentang Aspek-Aspek Sosial-Budaya  
Masyarakat Daerah Perbatasan: Studi Kasus  
Masyarakat di Pulau Miangas**

**Sophia M. Hoetagaol  
Nono S. A. Sumampouw  
Julianto Parauba  
Rony Tuage  
Mulyadi Pontororing**

Studi Tentang Aspek-Aspek Sosial-Budaya Masyarakat Daerah  
Perbatasan: Studi Kasus Masyarakat di Pulau Miangas

© Penulis

Sophia M. Hoetagaol

Nono S. A. Sumampouw

Julianto Parauba

Rony Tuage

Mulyadi Pontoring

Narasumber ahli : Dr. Ir. Johnny Budiman, dan

Ir. Lefrant Mannopo, M.Si

Disain sampul : Ninda Dian

Disain isi : Damar

Cetakan pertama, Desember 2012

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press

Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Purwosari, Ringroad Utara, Yogyakarta

Telp/faks : 0274-884500

Hp : 081 227 10912

Email : amara\_books@yahoo.com

Anggota IKAPI Yogyakarta

ISBN : 978-602-9374-49-0

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku

Tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Percetakan Amara Books

Isi diluar tanggung jawab percetakan

## KATA PENGANTAR

Wilayah Perbatasan memiliki arti penting dalam keberadaan sebuah negara. Namun, berbeda dengan arti kata "batas" dan "perbatasan" yang terkesan semacam pembatas atau pemisah yang ada dan pernah ada dalam keberadaan sebuah negara semisal "tembok Berlin" yang memisahkan secara tegas wilayah dua bangsa bertetangga, daerah perbatasan di wilayah NKRI tidak demikian halnya; karena pengalaman kesejarahan jualah yang "menghadirkan" wilayah-wilayah perbatasan baik itu di laut maupun di darat. Pengalaman kesejarahan wilayah perbatasan di propinsi Sulawesi Utara misalnya, dalam perjalanan sejarah merupakan sebuah kawasan di mana dapat ditemukan mobilitas penduduk, barang, dan bahkan ajaran-ajaran agama telah berlangsung sejak adanya aktivitas perniagaan pada enam atau tujuh abad yang lampau hingga kini. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila eksistensi dan arti sebuah kawasan perbatasan perlu mendapat perhatian tidak hanya dalam artian pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga dalam artian sosial-budaya.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado (BPNB) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. mempunyai tugas antara lain melakukan inventarisasi, kajian, dan pelestarian nilai budaya dalam arti yang luas telah mengagendakan Studi Tentang Aspek-Aspek Sosial Budaya Masyarakat Daerah Perbatasan: Studi Kasus Masyarakat di Pulau Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud, yang

melibatkan peneliti-peneliti mitra BPNB-Manado dari Perguruan Tinggi setempat, dibiayai oleh anggaran APBN-P 2012. Buku ini merupakan laporan utama penelitian tersebut, karena ada juga laporan spesifik yang diterbitkan dalam bentuk artikel termuat dalam jurnal yang dikelola BPNB-Manado.

Para peneliti telah berupaya dalam waktu yang begitu singkat menyelesaikan buku ini. Disadari bahwa segala upaya yang dilakukan oleh para peneliti yang umumnya sudah memperhatikan kawasan ini sejak lama serta kerja keras mereka sehingga berhasil mewujudkan karya ini. Namun, mereka juga menyadari bahwa masih banyak hal yang belum terungkap dan merupakan sisi lain yang memperlihatkan adanya kekurangan dalam karya mereka. Untuk itu, dengan hati lapang dan tangan terbuka, mereka siap menerima berbagai kritikan dan saran yang nantinya bermanfaat bagi penyempurnaan buku ini.



## KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui UPT Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado telah memberi kepercayaan kepada Tim untuk melakukan “Studi Tentang Sosial-Budaya Masyarakat Daerah Perbatasan: Studi Kasus Masyarakat di Pulau Miangas”, dalam tema utama Penelitian bidang Ekspresi Keragaman Budaya Tahun Anggaran 2012. Setelah melakukan penelusuran pustaka, dan hasil temuan lapangan, tim sepakat menambahkan kata “aspek” sehingga judul laporan ini adalah “Studi Tentang Aspek-Aspek Sosial-Budaya Masyarakat Daerah Perbatasan: Studi Kasus Masyarakat Pulau Miangas”. Pertimbangan menyisipkan kata aspek-aspek pada judul diatas didasarkan pada alasan bahwa pemahaman judul “Studi tentang Sosial Budaya....” sungguh sangat luas, karena ia menyangkut semua aspek sosial budaya. Jika ditambahkan kata “aspek” akan lebih memberi pemahaman bahwa tidaklah seluruh realita sosial budaya yang menjadi fokus kajian.

Kesempatan mengerjakan penelitian ini merupakan suatu kehormatan sekaligus tantangan yang dihadapi baik oleh saya pribadi selaku Ketua Tim maupun para anggotanya. Tenggat waktu yang singkat dalam mengerjakan kegiatan ini sebenarnya membuat kami agak ragu menerima tantangan itu. Namun, keberanian untuk menerimanya dilandasi dengan alasan rasional bahwa sejak awal tahun 2007 – saya pribadi telah terlibat dalam kajian-kajian kebudayaan dan lingkungan – dengan pendekatan Ekologi



Manusia, ilmu yang pernah saya tekuni dalam periode yang singkat yakni tahun 1982 – 1985.

Kedekatan saya dengan ranah penelitian Talaud sebenarnya bukan baru pada tahun 2007. Sebelumnya, yakni pada tahun 1996 dan 1997, saya dilibatkan sebagai anggota dalam sebuah kerja lapangan (*field research*) dari proyek penelitian berjudul: *Changes in the Culture and Lifestyle of the People of Sangihe and Talaud*, yang didanai oleh *The Toyota Foundation*, Tokyo-Jepang (Grant No. 96-I-016 dan Grant No. 97-I-011). Sejak itu pemahaman saya tentang wilayah ini semakin berakumulasi.

Dorongan sahabat saya yang tahu persis aktivitas ini menguatkan hati saya untuk menerima tantangan tersebut. Dan, keleluasaan yang diberikan oleh Pimpinan BPNB Manado dalam mana saya boleh menyertakan sdr. Julianto Parauba dan Rony Tuage, keduanya adalah staf BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Talaud dalam tim peneliti lebih memberanikan diri saya. Julianto dan Rony sejak saya berkunjung ke Talaud sering membantu kegiatan dan pemahaman saya tentang Talaud. Selain kedua anggota Tim ini, saya dibantu oleh dua tenaga muda pembelajar antropologi yang penuh idealisme dan dedikasi, Nono Sumampouw dan Mulyadi Pontororing. Kepada keempat anggota tim yang sudah bekerja keras saya ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada DR. Ir. John Budiman, MSc., yang ditunjuk sebagai narasumber ahli dalam tim ini dan kandidat doktor, Ir. Lefrand Manopo, MSc., yang sudah bertindak sebagai pembahas. Kami tidak melupakan berbagai kritikan, saran, dan keterangan-keterangan yang bermanfaat dari Drs. Alex J. Ulaen, DEA yang kadang membuat kami merasa tertantang mendalami dokumen-dokumen dan bacaan tentang Talaud dan Miangas yang dia berikan. Dia pula yang menjadi kritikus draft laporan sewaktu

diskusi resmi pada tanggal 16 – 18 Nopember lalu. Dari sekian narasumber kami, bapak Clorius Rumewo (67) yang akan selalu dikenang dalam laporan ini. Ia tidak hanya menampung anggota tim di rumahnya, tetapi juga mau menetap sementara waktu di Manado, bersedia ditanya tanpa mengenal lelah. Ungkapan terima kasih ini kami sampaikan kepada narasumber warga Miangas lainnya dengan meminjam ungkapan arif mereka, *“iyammite masasahangnge, arangnge siamiute”* (biarlah kami berlelah-lelah, asal saja namanya untuk kamu). Bantuan semua pihak tidak kami lupakan, tetapi tanggung jawab isi laporan ini sepenuhnya berada di tangan kami.

Kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya, bapak drs. Rusli Manorek, yang sudah memberi kepercayaan kepada kami, isi laporan ini akan menggambarkan pertanggungjawaban atas kepercayaan yang sudah bapak berikan. Kepada saudara Budhi Kristanto, SS bersama stafnya kami ucapkan terima kasih atas segala bantuan, pengertian dan kesabaran dalam melayani segala urusan administrasi penelitian.

Laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Masih banyak catatan-catatan dan kumpulan data yang belum terungkap semua dan masih memerlukan penelitian lanjutan. Namun, secara garis besar, hal yang diinginkan sesuai judulnya, kami telah berusaha untuk dipaparkan di sini.

Semoga.

Ketua Tim,

Dra. Sophia M. Hoetagaol, MA

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Kajian-Kajian Terdahulu .....	4
1.4 Metodologi .....	12
1.5 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II. MIANGAS: DAHULU DAN KINI .....</b>	<b>17</b>
2.1. Dari Tradisi Lisan hingga Catatan Pelaut/ Peneliti Alam dan Misionaris .....	17
2.2. Miangas Dalam Dokumen Pemerintahan Kolonial dan Republik Indonesia .....	24
2.3 Miangas Dalam Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional .....	28
2.4 Wajah Miangas kini .....	47
<b>BAB III. WAJAH BUDAYA DALAM UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN MASYARAKAT PULAU MIANGAS .....</b>	<b>61</b>
3.1 Sistem Peralatan dan Perlengkapan Hidup .....	62

3.2 Sistem Mata Pencaharian Hidup .....	77
3.3 Sistem Kemasyarakatan (Kekerabatan) .....	86
3.4 Bahasa dan Sastra (Lisan) .....	99
3.5 Kesenian .....	110
3.6 Sistem Pengetahuan .....	116
3.7 Sistem Religi (Kepercayaan) .....	124
<b>BAB IV. TIGA ASPEK SOSIAL: MOBILITAS, IDENTITAS, DAN RUANG JEJARING .....</b>	<b>133</b>
4.1 Mobilitas .....	134
4.1.1 Beberapa catatan tentang gerak migrasi kelompok warga Miangas .....	135
4.1.2 Beberapa catatan tentang gerak migrasi kelompok kecil/individual warga Miangas .....	139
4.1.3 Mobilitas Sosial Vertikal .....	144
4.2 Identitas Sosial .....	145
4.3 Ruang Jejaring Miangas .....	148
<b>BAB V. CATATAN AKHIR .....</b>	<b>151</b>
5.1 Beberapa Catatan Akhir .....	151
5.2 Saran Tindak Lanjut .....	155
<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>159</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perhatian yang diberikan kepada berbagai aspek (di) wilayah perbatasan Indonesia tampaknya meningkat secara drastis setelah kasus lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik negara serumpun Malaysia. Sejak kejadian tersebut, berita, komentar, analisa, baik yang populer maupun ilmiah termasuk reportase soal Kawasan Perbatasan cenderung mendominasi berbagai karya ilmiah, media elektronik termasuk media cetak nasional maupun lokal.

Begitu halnya dengan Pulau Miangas pun yang adalah salah satu dari 92 pulau terluar atau yang kini dikenal dengan beranda depan Indonesia. Wilayah ini memiliki arti strategis dan menyedot perhatian para akademisi, analis, komentator, pejabat negara dan daerah, wartawan, mahasiswa, golongan pemuda, bahkan kaum awam. Pulau ini bukan hanya menjadi penanda ujung utara Indonesia semata, tetapi juga menjadi produk jualan dokumentasi dan publikasi yang laku di pasaran. Di ruang lingkup Indonesia saja, paling kurang tercatat 114 reportase berita tentang pulau ini semenjak tahun 1985, yang mana 100 berita di antaranya terbit

dalam jangka waktu tahun 2002-2011 (Ulaen, Wulandari dan Tangkilisan, 2012: 203-214).

Bagi kalangan ilmuwan dalam maupun luar negeri, pulau ini seolah-olah magnet kuat dalam menarik perhatian intelektual mereka (antara lain: Velasco, 2007; Pristiwanto, 2009; Ulaen, Wulandari dan Tangkilisan, 2012). Disamping kelompok peneliti tersebut di atas ada juga tim peneliti dari beberapa lembaga negara seperti Departemen Luar Negeri yang mencoba mengidentifikasi permasalahan baik masyarakat maupun hukum di sana (Unsrat & BPPK DEPLU, 2010), termasuk juga tim peneliti dari Departemen Sosial yang melakukan studi untuk pengembangan pranata sosial di sana (Depsos, 2008).

Berbagai kegiatan “penegas” eksistensi Indonesia di pulau ini yang dilakukan institusi negara juga tidak ketinggalan. Contoh, pembangunan monumen atau tugu Santiago yang menelan biaya satu milyar lebih. Padahal di pulau kecil ini sudah berdiri tegak tugu perbatasan dan tugu pancasila, serta sebuah monumen yang belum selesai dikerjakan. Contoh lain, Badan Narkotika Nasional yang pada tahun 2010 menggelar aksi pembentangan bendera sepanjang 7.000 meter mengelilingi Miangas yang kemudian tercatat sebagai rekor MURI (Museum Rekor Indonesia), dimana yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut banyak dari kalangan pemuda. Tidak ketinggalan upaya warga madani (*civil society*), artis Ully Sigar bersama teman-temannya mengibarkan bendera merah-putih yang berukuran besar dengan alasan untuk mengingatkan kembali semangat nasionalis warga Miangas.

Dunia kampus juga tidak ketinggalan dalam memberi perhatian. Tercatat, Universitas Indonesia, mengirimkan sebanyak 70 mahasiswa ke pulau ini pada bulan Juli-Agustus 2009 untuk mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bekerja sama dengan TNI AL. (Hapsari, Rabu 15 Juli 2009 dalam [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)).

Dipandang dari segi keamanan teritorial, dari berbagai catatan dan kesaksian, pulau ini juga menjadi berita dan perhatian nasional yang dikaitkan dengan wilayah jalur lintas-batas bagi aktivitas ilegal –termasuk pulau-pulau perbatasan lain di Nusa Utara-, seperti: teroris transnasional (Velasco, 2010: 103), perdagangan dan penangkapan ikan (Velasco, 2010: 103); termasuk peredaran Narkoba (Manado Post, Selasa 14 Agustus 2012).

Pada sisi berbeda, sebagai penanda wilayah paling utara Indonesia, Miangas juga menarik perhatian dunia periklanan (*advertising*). Salah satunya adalah produk makanan instant Indomie, yang dalam iklan elektroniknya mengubah lirik dan nada lagu “Dari Sabang sampai Merauke” menjadi: “Dari Sabang Sampai Merauke, Dari Miangas Sampai Pulau Rote”.

Setelah melihat perhatian dari banyak pihak sebagaimana tercatat di atas. Tiga kesimpulan bahwa Pulau Miangas memiliki arti yang penting, yaitu: (1) sebagai bagian integral dari wilayah Indonesia baik masyarakat maupun wilayahnya yang dahulu kerap diabaikan namun kini mendapat perhatian yang besar; (2) sebagai penanda dalam menjaga kedaulatan bangsa; (3) memiliki nilai akademis penting baik dari sisi pulaunya maupun masyarakatnya. Tentu saja hasil kajian akademis yang akan lahir diharapkan bermanfaat untuk pengembangan kehidupan masyarakat Miangas secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum.

Dari 3 kesimpulan tersebut di atas, kesimpulan ke 3 lah yaitu aspek sosial dan budaya dari masyarakat di pulau ini yang belum dijelaskan secara terpadu dan kurang menjadi perhatian dari para peneliti. Soal inilah yang nantinya akan didiskusikan lebih jauh baik pada tinjauan pustaka maupun uraian dalam tulisan ini. Masih kurangnya penjelasan tentang aspek sosial dan budaya mungkin dikarenakan aspek sejarah, hukum, kedaulatan dan ekonomi dari kawasan ini lebih menarik perhatian kaum ilmuwan. Padahal sebenarnya aspek sosial budaya suatu masyarakat kawasan menempati posisi yang teramat penting karena hal itu



mendorong manifestasi munculnya berbagai perilaku dan aktivitas masyarakat pendukungnya (Koentjaraningrat, 2002[1974]: 11). Selain itu, aspek sosial bersifat “memayungi” berbagai aspek, baik keamanan, aktivitas manusia, ekonomi termasuk sejarahnya. Karena kekosongan perhatian tersebut, maka kami telah meneliti kawasan dan masyarakat di pulau Miangas dari aspek sosial-budayanya, serta menuangkannya dalam tulisan berjudul *Studi Tentang Aspek-Aspek Sosial-Budaya Masyarakat Daerah Perbatasan: Studi Kasus Masyarakat di Pulau Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud*.

## 1.2 Kajian-Kajian Terdahulu

Kajian-kajian ilmiah yang dilakukan mengenai Miangas, tentu tidak akan terlepas dari perhatian terhadap studi-studi mengenai kawasan kepulauan Nusa Utara yang berada di provinsi Sulawesi Utara. Wilayah ujung utara Indonesia ini dahulunya dikenal sebagai Kabupaten Kepulauan Sangihe-Talaud, yang sejak tahun 2003 hingga kini dimekarkan menjadi tiga kabupaten kepulauan, yaitu: Kepulauan Sangihe; Kepulauan Talaud; dan Kepulauan Siau-Tagulandang-Biaro. Oleh karena itu usaha untuk meninjau pulau Miangas berarti juga meninjau kepulauan Nusa Utara. Sebaliknya, harus dihindari adanya anggapan bahwa dinamika masyarakat di wilayah Nusa Utara sama dengan yang berada di Miangas. Pandangan itu tentu perlu ditambah dengan melihat Nusa Utara, baik wilayah darat dan lautnya, sebagai sebuah *Sea System* Laut Sulawesi (Lapian, 1992; 2011[2009]), yang menghubungkan bukan hanya wilayah geografis, tetapi juga komunitas-komunitas yang ada di dalamnya. Wilayah yang kemudian menjadi “jembatan alami” (Ulaen, 2003: 37) yang bukan hanya menghubungkan daratan atau pulau yang satu dengan daratan atau pulau yang lain tetapi juga manusia yang hidup di dalamnya yang oleh Velasco disebut sebagai sebuah “kepulauan antara” atau “*islands in between*”

(Velasco, 2010: 99-104;) dengan memiliki dinamika kemasyarakatan tersendiri di tiap masanya. Secara khusus, Miangas adalah salah satu tonggak dari jembatan alami tersebut. Oleh karena itu, pada bagian ini dengan demikian, penting bagi kita untuk meninjau terlebih dahulu berbagai catatan pustaka yang ada mengenai wilayah Nusa Utara sebelum masuk pada tulisan ilmiah khusus tentang Miangas yang menjadi fokus studi ini.

Tulisan mengenai wilayah Nusa Utara yang bersifat etnografis dapat kita lihat dari catatan lapangan berbahasa Belanda dari misionaris D. Brilman, saat ia menjadi pendeta pelayan di wilayah Nusa Utara (2000[1938]) yang kemudian diterbitkan edisi Bahasa Indonesia oleh GMIST (Gereja Masehi Injili di Sangihe dan Talaud) bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan dengan judul *Kabar Baik di Bibir Pasifik*. Tulisan ini bukan hanya berisi pengalaman kegiatan pekabaran Injil. Selain berisikan kesan pribadinya, Brilman memberikan informasi mengenai lingkungan alam, keadaan masyarakat, beberapa aspek budaya dan kepercayaan yang mereka anut sebelum menerima agama Kristen. Tidaklah berlebihan kalau ada penulis yang menganggap bahwa karya ini sebagai karya pertama yang memberi keterangan tentang masyarakat Nusa Utara.

Secara umum, karya Brilman menyuguhkan informasi baik tentang latar geografis Nusa Utara serta penduduk dan aspek sosial dan budayanya maupun tentang kegiatan pekabaran Injil. Meskipun ia tidak merinci satu per satu keterangan kelompok-kelompok komunitas di Nusa Utara, namun dalam bagian tentang keadaan geografis dapat ditemukan sedikit keterangan mengenai Miangas. Brilman menulis sebagai berikut:

“.... Pulau terpencil ini yang terletak jauh di samudera, 11 km<sup>2</sup> luasnya dan didiami oleh sekitar 800 orang, beberapa tahun yang lalu menjadi pokok pembicaraan mengenai persoalan apakah daerah ini sesungguhnya merupakan milik Belanda ataukah milik Amerika Serikat. Menurut putusan perdamaian pada tanggal 4 April 1928, maka ditetapkan oleh Dr. Max Huber, bahwa keseluruhan daerah ini termasuk pada wilayah kerajaan Belanda. Pada tanggal 7 Mei 1929 bendera tiga warna dinaikkan di pulau ini dengan upacara resmi oleh raja kepulauan

Talaud dengan dihadiri oleh Residen Manado. Jadi, daerah perbatasan yang terpencil ini hanya dikunjungi sekali dalam setengah tahun oleh kapal besar yang sesudahnya menuju Lirung, kemudian kembali ke Petta di gugusan pulau Sangihe” (Brilman, 2000:18).

Disertasi tahun 1987, yang kemudian menjadi buku dari sejarawan maritim A. B. Lapian, (2011[2009]) patut dikemukakan secara khusus di sini. Beliau dalam studi wilayah lintas-teritorial ini, melihat kawasan ini sebagai sebuah sistem Laut Sulawesi terpadu yang melampaui batas geografis-administratif yang menjadi jalur penting pelayaran pada abad ke IX, termasuk secara bersamaan menjadi wilayah yang menghubungkan komunitas yang hidup dan beraktivitas di dalamnya didasarkan pada hubungan perdagangan hingga sosial, *patroon-client*, termasuk relasi dalam rangka perebutan wilayah kekuasaan kolonial dan religi.

Tulisan Alex J. Ulaen berjudul *Nusa Utara: Dari Lintasan ke Daerah Perbatasan* (2003) dapat dikemukakan di sini. Tulisan yang kemudian menjadi salah satu rujukan utama tentang studi di wilayah kepulauan Utara Sulawesi ini mendokumentasi masyarakat Nusa Utara dalam ruang lingkup kajian *ethnohistory*, sehingga sebagai konsekuensi logis sistematika buku ini terdiri dari dua kelompok besar, yaitu: (1) dokumentasi mengenai Dinamika Sejarah Maritim Nusa Utara sebagai jembatan alami yang menghubungkan dua daratan besar yaitu bagian utara kepulauan Hindia dan Selatan Filipina atau aspek kronologis dari wilayah ini; dan (2) informasi tentang kehidupan komunitas di Nusa Utara sebagai bagian etnografis dari tulisan ini. Dalam karyanya ini, dapat dijumpai keterangan tentang Miangas. Pertama, dengan mengutip keterangan dari H.J. Lam atas dunia flora dan fauna di pulau Miangas, salah satu pulau dalam struktur geologi-karang menunjukkan gambaran yang spesifik dari ekologi pulau karang (2003:24); kedua, keterangan tentang keberadaan pemukiman warga Miangas di pulau Karakelang (2003:123); ketiga, tentang salah satu pola pemukiman dengan sistem blok dan yang ber-

pangkal pada pelabuhan di satu sisi (2003:126); keempat, tentang Miangas yang pernah menjadi pokok sengketa Belanda dan Amerika Serikat (2003:160); kelima, tentang status pulau Miangas sebagai pintu keluar-masuk (*check-point*) pelintas-batas (2003:164); keenam, tentang penunjukan mantan Camat Lintas-Batas di Miangas sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) sebagai perutusan “kelompok masyarakat terasing” (2003:173). Karya-karya lainnya oleh penulis yang sama, juga banyak menginformasikan mengenai daerah perbatasan di Nusa Utara, yaitu: (1) *Nusa Utara Dalam Peta Sejarah Bahari* (2010a); dan (2) *Membaca Sangihe Talaud Bibliografi 1724-2006* (2010b).

Karya Winsulangi Salindeho dan Pitres Sambowadile, *Kawasan Sangihe – Talaud – Sitaro, Daerah Perbatasan-Keterbatasan-Pembatasan* (2008) patut juga dicatat. Karya mereka kaya akan informasi mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah kepulauan Nusa Utara termasuk di dalamnya suka-duka yang mereka alami dalam mengelola wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Hal ini menjadi mungkin didasarkan pada pengalaman pribadi para penulis, yang satu adalah birokrat (Bupati) dan yang satunya lagi aktivis sekaligus budayawan. Selebihnya, mereka juga sebagai orang lokal, sehingga tanpa disadari mereka telah berlaku sebagai *insider researchers* dan memberikan banyak informasi baik secara emik maupun secara etik.

Tentang Miangas, dapat ditemukan sejumlah keterangan menarik. Pertama, tentang kedudukan pulau Miangas sebagai acuan pangkal wilayah teritorial laut (2008:15); kedua, mengenai Miangas (Nanusa) dalam kontrak 22 Nopember 1899, antara Raja Taruna Salmon Dumalang dengan Pemerintah Hindia Belanda, sebagai bagian dari kerajaan Tahuna (2008:28); ketiga, mengenai perjanjian Robertus Padtbrugge, Gubernur VOC dengan Fransisco Macaampo, Raja Tabukan yang mempengaruhi keputusan arbitrase internasional dalam memutuskan kepemilikan pulau Miangas (2008:58, 173, 176,); keempat, mengenai pendudukan

secara efektif oleh Belanda atas pulau Miangas (2008:64); *kelima*, mengenai struktur geologi dan topografi pulau Miangas (2008:96, 105, 107); *keenam*, tentang pulau Miangas dilanda angin puting-beliung pada 29 April 1932 (2008:145); *ketujuh*, tentang posisi pulau Miangas sebagai wilayah paling utara dari Kabupaten Kepulauan Talaud (2008:177, 178, 180, 181); *kedelapan*, tentang letak koordinat pulau Miangas baik dalam peta wilayah Indonesia maupun dalam sengketa Belanda dan Amerika Serikat (2008:183, 184, 185, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198); *kesebelasan*, Miangas sebagai pulau terdepan dari wilayah NKRI (2008:199, 200, 201-202, 203, 204, 205); *keseperuluh*, Miangas dalam konteks Perjanjian Lintas Batas dan kejahatan transnasional (2008:221, 224, 225, 226, 227, 228, 232). Keterangan-keterangan tersebut di atas bukanlah merupakan satu bagian yang utuh, selain merupakan bagian dari sebuah gambaran yang lebih umum tentang Nusa Utara dalam beberapa aspek tersebut di atas. Keterangan yang utuh mengenai Miangas dapat ditemukan pada halaman 201-202.

Berbagai karya dari para peneliti dalam dan luar negeri baik buku dan artikel yang menulis tentang area perbatasan utara Sulawesi-selatan Filipina sebagai satuan wilayah juga ditemukan. Kajian-kajian tersebut menekankan pada aspek-aspek sejarah, sosial budaya masyarakat transnasional termasuk mobilitas penduduk di dalamnya. Ini dapat ditemukan pada publikasi: Shinzo Hayase, Domingo M. Non dan Alex J. Ulaen (1999); Shinzo Hayase (2007); Djorina Velasco (2010); Alex Ulaen dan Takashi Shiraishi (2011[2004]); Aswatini Raharto (1993; 2000); Evelyn Tan-Culamar (1989) mengemukakan aspek-aspek tersebut di atas.

Tulisan-tulisan mengenai wilayah perbatasan di Nusa Utara – bukan Miangas – yang membahas secara khusus dinamika sosial-budaya, setidaknya dapat kita temukan dalam dua publikasi, yaitu karya: (1) Sri Suharjo, Nasrun Sandiah dan Pristiwanto; (2) Nasrun Sandiah (2008). Publikasi pertama mengambil kasus kegiatan lintas batas di Pulau Marore yang juga melihat pulau

ini sebagai satuan hidup dari masyarakat yang mendiaminya sedangkan tulisan kedua, mengambil kasus pranata sosial di kawasan perbatasan yang juga bagian dari masyarakat penerima program KAT (Komunitas Adat Terpencil) dari Departemen Sosial, yaitu pulau Nusa dan Kawio. Memang kedua karya ini tidak secara ekstrinsik menyoroti Miangas. Namun, karena secara khusus mengambil kasus di wilayah yang terkendali, maka secara intrinsik, kita dapat belajar bagaimana masyarakat, sekalipun berada dalam wilayah administratif dan kebudayaan serupa (Sangihe-Talaud), namun memiliki strategi khas tersendiri untuk menyasati kehidupan mereka.

Kembali ke publikasi ilmiah yang secara khusus menyoroti pulau Miangas, H. J. Lam dapat disebut sebagai pelopor. Bukunya berjudul *Miangas (Palmas)* (1932) didasarkan pada kunjungan ke pulau Miangas 11 – 12 Juni 1926. Adapun isi tulisannya tertata sebagai berikut: (1) Pengantar, yang isinya menjelaskan bagaimana ekspedisinya ke Miangas dapat direalisasi serta uraian semacam laporan perjalanan serta ucapan terima kasih kepada anggota tim dan pejabat pemerintah keresidenan Manado yang sudah membantu; (2) gambaran umum letak geografis pulau Miangas; (3) keadaan geologi serta petrografi; (4) mengenai fauna, flora; (5) keadaan penduduk; dan lampiran yang berupa daftar contoh bebatuan, tanaman serta gambar dan foto.

Tulisan lain dalam bentuk buku, adalah karya dari Alex J. Ulaen, Triana Wulandari dan Yuda Tangkilisan dengan editornya Endjat Djaenuderajat berjudul: *Sejarah Wilayah Perbatasan Miangas – Filipina, 1928 – 2010: Dua Nama Satu Juragan* (2011, 2012). Seperti terbaca pada judulnya, karya ini berupaya memberikan keterangan terutama tentang status pulau Miangas. Para penulis menelusuri pemberitaan media tentang ‘pulau Miangas’ yang menurut mereka, sejak awal tahun 2003 hingga tahun 2010, terbilang sering diberitakan jika diperbandingkan dengan ‘pulau-pulau di perbatasan’ semisal Marore dan Marampit

yang berdekatan. Selanjutnya, para penulis karya ini menemukan adanya komentar dan pemberitaan yang kurang cermat terutama tentang status pulau Miangas, meskipun pihak yang berkompeten seperti Menteri Luar Negeri RI sudah pernah menjelaskan bahwa 'tidak ada masalah dengan kepemilikan pulau Miangas' (2003, 2009). Buku yang terdiri atas enam bab ini diawali dengan (1) alasan mengapa sampai menulis buku itu; (2) menggali latar historis kawasan serta pengaruhnya terhadap pulau Miangas; (3) Miangas sebagai pulau yang dipersengketakan; (4) mengungkap peran Miangas dalam perjanjian lintas batas hingga dinamikanya semasa Orde Baru dan Pasca Soeharto; (5) mengungkap pandangan serta pendapat orang tentang Miangas yang ditemukan dalam media cetak maupun laporan kajian; dan (6) bagian penutup. Buku ini dilengkapi dengan daftar publikasi media tentang Miangas dalam dua media cetak nasional (Kompas & Tempo). Sayangnya, buku ini tidak mengungkap sedikitpun tentang aspek-aspek sosial dan budaya warga Miangas.

Peneliti muda di Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado, Pristiwanto, menerbitkan hasil penelitiannya tentang Miangas berjudul *Studi Perbatasan Indonesia Philipina (Kearifan Tradisional Masyarakat Pulau Miangas-Talaud-Sulawesi Utara)* (Bandung: Dewa Ruchi, 2009). Buku ini berupaya mengungkap kearifan-kearifan lokal warga Miangas khususnya dan warga Talaud umumnya.

Selain ketiga buku tersebut di atas, belum ditemukan buku lain yang membahas khusus tentang Miangas<sup>1</sup>, selain artikel hasil penelitian dan investigasi. Tulisan Andreas Harsono, *Miangas, nationalism and isolation* adalah hasil investigasi menarik mengenai keterisolasian serta hubungannya dengan nasionalisme di Miangas. Diterbitkan dalam majalah TEMPO, Edisi Inggris No. 13/V/November 30 – December 6, 2004; tulisan ini tidak hanya

---

1 Ada tulisan Pristiwanto & Tamba, tetapi isinya tidak banyak berbeda dari bukunya yang disebut di atas.

menunjukkan kepiawaian seorang jurnalis senior tetapi kemampuan berhubungan dengan warga sehingga ia memperoleh keterangan yang akurat.

Tulisan lain dari seorang antropolog muda pengajar di salah satu perguruan tinggi di Manila, Djorina Velasco, "*Between Manado and Davao: How the Indonesian Islands of Miangas is Making Use its Philippine Ties*", di dalam *Newsbreak Online* (11 Februari 2007); dan "*Navigating The Indonesian-Philippine Border: The Challenges of Life in The Borderzone*", di dalam *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies*, 25 (1-2) hlm. 95-118 (2010). Sama halnya dengan artikel Harsono, Velasco melakukan kunjungan lapangan ke Miangas dan memperoleh keterangan yang akurat. Selain memaparkan kehidupan ekonomi warga Miangas maupun Nusa Utara pada umumnya, Velasco melihat juga bagaimana mobilitas warga antar negara lebih bersifat kunjungan sosial dan kekeluargaan.

Tulisan berupa makalah yang dibacakan dalam Kongres Sejarah Nasional ke-9, (2011) "Miangas (Las Palmas) dalam Dinamika Wilayah Perbatasan" dari Alex J. Ulaen sepertinya tidak lebih dari semacam ringkasan dari buku yang ditulis olehnya bersama teman-temannya. Tulisan ini juga mengabaikan atau tidak membahas aspek sosial dan budaya warga Miangas.

Bertolak dari telusuran pustaka di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek sosial-budaya warga pulau Miangas belum dikaji. Untuk itulah, penulisan ini dilakukan sebagai upaya menghadirkan informasi tentang aspek sosial budaya.

### 1.1 1.3 Ruang Lingkup

Penulisan ini memiliki dua ruang lingkup, yang masing-masing terdiri dari sub-sub-bagian –sebagai fenomena yang teramati, yaitu:

1. Aspek-aspek budaya masyarakat Miangas, sub bagiannya mengikuti pembagian tujuh unsur kebudayaan (Koentja-



raningrat, 1992 [1967]: 7): sistem peralatan dan perlengkapan hidup (*material culture*); sistem mata pencaharian hidup (ekonomi); sistem kemasyarakatan (kekerabatan); bahasa; kesenian; sistem pengetahuan; sistem religi (agama).

2. Aspek-aspek sosial yang terdiri dari dua sub bagian, yaitu: Mobilitas dan Identitas

#### 1.4 Metodologi

Penelitian ini dikerjakan oleh tim dengan latar keilmuan yang berbeda. Ketua Tim memiliki latar ekologi manusia sekaligus sastra inggris, anggota tim terdiri atas dua peneliti dengan latar antropologi dan dua orang anggota tim lainnya memiliki latar ilmu kelautan. Perbedaan latar keilmuan ini tidaklah menjadi kendala karena pegangan utama dalam penelitian ini adalah tema kegiatan, kerangka acuan kerja serta judul penelitian yang disusun oleh pemberi kerja (BPNB-Manado). Adapun tema “Penelitian bidang Ekspresi Keragaman Budaya”, kerangka acuan kerja: Studi tentang daerah perbatasan ditujukan untuk penguatan jadi diri bangsa sehingga dengan pengetahuan sosial dan budaya yang dimiliki menjadikan penguatan dalam menuju NKRI”; serta judul: “Studi tentang Sosial Budaya Masyarakat Daerah Perbatasan: Studi Kasus Masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud”, menjadi pengikat dan pusat perhatian peneliti yang tergabung dalam tim ini.

Untuk mencapai tujuan, maka judul yang ada dipilah-pilah sebagai berikut: (a) ‘sosial; (b) budaya’; dan (c) ‘masyarakat daerah perbatasan’. Sebutan ‘masyarakat daerah perbatasan’ dibatasi dengan rumusan sub-judul: ‘studi kasus masyarakat di pulau Miangas, kabupaten Kepulauan Talaud.

Untuk memahami konsep ‘sosial’, setelah melalui kajian pustaka, tim memilih tiga hal yakni (1) mobilitas, (2) identitas, dan (3) ruang-jejaring sosial warga Miangas. Karena tiga orang dari

tim adalah pembelajar antropologi, pemahaman tentang kata budaya akan mengingatkan pelajaran dasar dalam antropologi yaitu adanya tujuh unsur kebudayaan yang ditemukan dalam kehidupan setiap kelompok masyarakat, yakni (1) sistem peralatan dan perlengkapan hidup; (2) sistem mata pencaharian hidup; (3) sistem kemasyarakatan; (4) bahasa dan sastra; (5) kesenian; (6) sistem pengetahuan; dan (7) sistem religi atau kepercayaan.

Selain menggunakan paradigma fenomenologi, yang artinya pemaparan akan sama seperti apa adanya yang tampak di lapangan (Ahimsa-Putra, 2009) sehingga, cara pengumpulan data yang paling relevan adalah turun ke lapangan penelitian dan melakukan wawancara mendalam serta observasi lapangan, penulisan ini juga menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari berbagai sumber. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut adakalanya diringkas, ada pula yang disajikan apa adanya dengan mengutip sebagian atau keseluruhan informasi. Dikandung maksud agar dari beragam informasi tertulis yang dikutip – lepas dari persoalan akurat atau tidak - juga akan tampak perkembangan pengetahuan tentang Miangas serta warganya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika tulisan ini ditata dalam lima bab. Setiap bab dipilah-pilah atas sub-sub bab, dan garis besar setiap bab dan sub bab akan dipaparkan berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang menggambarkan latar belakang penelitian dan penulisan ini dilakukan, dilanjutkan dengan ulasan tentang kajian-kajian yang pernah dilakukan baik menyangkut masyarakat di daerah perbatasan maupun secara khusus tentang orang Miangas. Bagian ketiga dalam bab pendahuluan berisikan ruang lingkup kajian, disusul dengan paparan tentang metodologi yang digunakan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua diberi judul Miangas: Dahulu dan Kini. Dalam bab ini dipaparkan berbagai keterangan baik tentang pulau Miangas secara fisik maupun tentang warganya serta kehidupan sosial dan budaya. Penggalan informasi dimulai dengan menelusurinya dalam tradisi lisan (*oral tradition*), catatan-catatan para pelaut, peneliti alam dan para pekabar injil atau misionaris. Upaya penggalan informasi juga dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen pemerintah baik kolonial atau Hindia Belanda maupun pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pemaparan informasi yang lebih spesifik dilakukan dengan menyajikan bagaimana Miangas dalam kebijakan serta strategi pembangunan nasional. Bab ini diakhiri dengan pemetaan keadaan Miangas sekarang dalam berbagai aspek seperti geografis, demografis, sosial, budaya, ekonomi secara umum.

Bab ketiga diberi judul Wajah Budaya dalam unsur-unsur Kebudayaan. Dalam bab ini, pemaparannya dilakukan dengan mengikuti pakem yang berlaku di kalangan pembelajar antropologi dengan mengurut ketujuh unsur kebudayaan sebagaimana yang diajarkan oleh bapak antropologi Indonesia, Profesor Koentjaraningrat. Mulai dari paparan tentang sistem peralatan dan perlengkapan hidup, sistem mata pencaharian, sistem kemasyarakatan (kekerabatan), bahasa, kesenian, pengetahuan, dan sistem kepercayaan. Penyajian ketujuh unsur kebudayaan tersebut diusahakan dengan menelusuri keterangan yang ada dalam kepustakaan. Bagaimana ketujuh unsur itu ada seperti yang disaksikan oleh para penulis pada masanya dan bagaimana keadaannya dewasa ini. Model penyajian seperti ini dimaksud agar informasi yang ada tidak sekedar keterangan yang datar, melainkan dapat mencerminkan, realita budaya apa yang pernah ada dan bagaimana jadinya sekarang ini. Dengan demikian diharapkan agar pembaca sekaligus dapat melihat perubahan budaya yang terjadi pada suatu kurun waktu.

Bagian keempat, diberi judul Tiga Aspek Sosial: Mobilitas, Identitas, dan Ruang Jejaring. Pembatasan atas ketiga aspek sosial ini tidak berarti bahwa tidak ada aspek sosial lainnya dalam realitas kehidupan warga Miangas. Pertimbangan memilih ketiga aspek tersebut dimaksud didasari pertimbangan bahwa ketiganya lebih menonjol dalam kehidupan sehari-hari warga Miangas. Bagaimana mobilitas warga Miangas baik secara massal maupun individual pernah terjadi. Bagaimana warga Miangas mempertautkan dirinya dengan dua kelompok masyarakat-bangsa yang ada. Bagaimana ruang-jejaring yang tercipta di kalangan warga Miangas sebagai konsekuensi mobilitasnya. Ketiga pertanyaan tersebut dijadikan penuntun dalam pemaparan informasi dalam bagian ini.

Bagian kelima merupakan catatan akhir. Tidak sekedar simpulan-simpulan serta saran yang dikemukakan di sini. Sebuah catatan akhir digunakan baik untuk menggaris bawahi keterangan yang sudah diajukan terdahulu atau juga melengkapinya, sehingga diharapkan pemaparan ini menjadi sebuah kumpulan informasi yang dapat menjawab pertanyaan utama: Bagaimana sesungguhnya ekspresi budaya yang tercermin dalam aspek-aspek sosial-budaya sebuah masyarakat yang berada di daerah perbatasan, lebih khusus warga pulau Miangas.

Paparan ini disertai dengan rekaman gambar untuk memper-tegas keterangan yang dipaparkan.



## BAB II

# MIANGAS: DAHULU DAN KINI

Pemahaman tentang aspek sosial maupun budaya dari suatu kelompok masyarakat atau komunitas sangat berkaitan erat dengan lokasi pemukiman, sekitaran alam, dan pengalaman yang terekam dalam “ingatan bersama” (*collective memory*) dari kelompok masyarakat tersebut. Pemahaman tentang “ingatan bersama” atau *collective memory* adalah kisah-kisah kesejarahan, pengalaman pribadi yang dapat mengungkap bagian dari realitas sosial-budaya dalam masyarakatnya. Atas dasar pemikiran inilah maka keberadaan pulau Miangas serta warganya, baik yang ditemukan dalam berbagai catatan, dokumen, laporan resmi hingga hasil kerja lapangan akan dideskripsikan.

### **2.1. Dari Tradisi Lisan hingga Catatan Pelaut/Peneliti Alam dan Misionaris**

Silsilah atau *genealogy* dan kisah-kisah kesejarahan adalah jenis tradisi lisan yang hingga kini masih dituturkan di kalangan warga Nusa Utara pada umumnya dan warga Miangas pada khususnya. Biasanya kedua tradisi lisan itu dituturkan sendiri-sendiri baik dalam situasi formal maupun informal. Namun, adakalanya ke-

duanya dituturkan bersamaan dengan maksud untuk saling melengkapi satu dengan lainnya. Seorang lelaki maupun wanita yang dipandang sebagai keturunan pendiri pemukiman wajib menguasai pengetahuan tentang silsilah. Termasuk didalamnya para kepala *clan* yang dalam bahasa setempat disebut *timmaddu ruanga* atau 'kepala suku', dalam hal ini mereka yang dituakan dalam kelompok keluarganya.

Di pulau-pulau Nanusa – di mana Miangas merupakan bagian dari gugusan pulau-pulau ini – di setiap kampung, dapat ditemukan seorang tokoh adat yang dipercayai sebagai *bawunian* atau 'pemegang-rahasia kampung'. Jika kepala-kepala *clan* atau *ruanga* atau juga yang mereka sebut 'kepala suku' biasanya hanya terbatas pada mengetahui silsilah dan kisah-kisah kesejarahan dari *clan*-nya, maka kewajiban seorang pemegang rahasia kampung adalah menguasai seluruh silsilah dari *clan* atau *ruanga* baik yang ada di kampungnya maupun yang ada di kampung tetangga atau yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya.

Kisah kesejarahan serta silsilah warga Miangas, dapat ditelusuri atau dicari di empat tempat di pulau-pulau Nanusa, yaitu masing-masing di Karatung, Luluhe, Dampulis dan Kakorotan. Hal-hal dan nama-nama yang diyakini sebagai pemukim awal pulau Miangas akan sama bagi ke 4 tempat yang disebut di atas.

Peristiwa penyerangan perompak dari Sululah yang mengawali kisah kesejarahan dan silsilah keturunan warga Miangas. Ceritera dimulai dengan kedatangan perompak, warga merasa tidak aman. Dengan kedatangan mereka, *Datu Bawarodi'* berinisiatif mengungsi ke pulau-pulau Nanusa dan mendarat di pulau Marampit. Tiba di Marampit *Datu Bawarodi'* tertarik dan kemudian mengawini seorang perempuan asal Marampit. Tiga orang anak masing-masing bernama *Langgu*, *Lumano* dan *Larungan* lahir dari hasil perkawinan ini. *Langgu* menetap di Karatung, *Lumano* di Marampit dan *Larungan* disuruh ayahnya kembali ke pulau Miangas yang saat itu sudah tidak berpenghuni. Kelak, kemudian hari *Larungan*

inilah yang dianggap sebagai cikal bakal atau nenek moyang warga Miangas sekarang ini. *Larungan* tidak kembali sendirian ke Miangas. Ia ditemani oleh sejumlah laki-laki terpilih dan berani berkelahi untuk mempertahankan pulau Miangas dari serangan perompak Sulu. Lelaki-lelaki pemberani, atau oleh penutur kisah ini disebut dengan gelar “Johan” atau pemberani diberangkatkan ke Miangas disertai istri-istri mereka.

Kisah yang dituturkan oleh narasumber<sup>2</sup> ini tidak jauh berbeda dengan kisah yang diperoleh H.J. Lam yang dicatat oleh Mr. Eckenhausen dengan bantuan raja Tahuna (S. Ponto) dan raja Talaud (J.S. Tamawiwi) sebagai penerjemah dari seorang narasumber bernama Jacob Naung, salah seorang tetua warga Miangas pada saat H.J. Lam berkunjung ke pulau Miangas (1926). Narasumber kami (C. Rumewo, 67 tahun), mengungkapkan bahwa ia mendengar kisah itu sewaktu masa mudanya di Karatung, dari seorang kepala suku karena tentu saja keduanya tidak membaca bukunya Lam yang ditulis dalam bahasa Inggris, apalagi tidak semudah itu mendapatkan bukunya Lam di pulau-pulau Nanusa dan Miangas khususnya.

Versi lain tentang asal-muasal nenek moyang orang Miangas, menyebut tokoh bernama *Sinyo* yang dikisahkan berasal dari bukit Bagobo Mindanao. Kemudian beranak-cucu di pulau tersebut. Kisah ini tidak didukung oleh adanya silsilah yang dimiliki oleh warga Miangas. Versi lainnya mengisahkan bahwa penduduk pulau Miangas adalah keturunan dari *Padudu* yang berasal dari desa Mailu di Mindanao. Sama halnya dengan versi pertama, tidak ada dukungan silsilah yang menjelaskan keturunan *Padudu* di Miangas. Padahal, tradisi mewariskan silsilah kepada anak-cucu turun temurun tidak hanya kebiasaan yang berlaku di kalangan warga Talaud, tetapi juga dengan kelompok komunitas etnis manapun di Mindanao. Orang Mindanao menyebutnya *tarsilas*. Tentang silsilah

---

2 Oleh narasumber Clorius Rumewo (67 tahun)



dan tarsilas penduduk di daerah perbatasan, khususnya pesisir selatan Mindanao dan kepulauan Sangihe dan Talaud, pernah dikaji oleh Shinzo Hayase, Domingo M. Non, dan Alex J. Ulaen. Ketiga peneliti ini mengkompilasi kumpulan silsilah/tarsilas dan kisah-kisah kesejarahan yang diberi judul: *Silsilas/Tarsilas (Genealogies) and Historical Narratives in Sarangani Bay and Davao Gulf Regions, South Mindanao, Philippines, and Sangihe-Talaud Islands, North Sulawesi, Indonesia* (1999), diterbitkan oleh Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University. Menurut keterangan salah seorang pengumpulnya, mereka tidak menemukan silsilah dan tarsilas warga kelompok etnis yang ada di Mindanao dengan warga Miangas. Naskah tarsilas yang ada hubungan antara beberapa keluarga di Glan, Sarangani, justru berhubungan dengan beberapa keluarga di Lirung-Talaud. Juga ditemukan tarsilas di kalangan keluarga Dabayan (salah satu etnis di Davao) yang mencatat perkawinan anak mereka dengan orang Karatung bermarga Sasube.

Kembali ke persoalan versi-versi tradisi lisan tentang nenek moyang orang Miangas, adalah nama tokoh *Sumawelambung* yang berasal dari desa Luluhe pulau Marampit dan hidup pada abad ke-15. Di duga, *datu Bawarodi* adalah keturunan dari *Sumawelambung*. Nama *Sumawelambung* juga ditemukan dalam catatan Lam yang diperolehnya dari kunjungan ke Miangas. Atas dasar pertimbangan itu maka dalam tulisan ini hanya menyebut kehadiran tokoh *datu Bawarodi* dan anaknya *Larungan* yang diperintah ayahnya untuk kembali ke Miangas yang sudah tidak berpenghuni disertai warga pulau Nanusa yang dianggap dapat membantu mempertahankan Miangas seandainya ada serangan perampok, karena laki-laki tersebut dipandang memiliki kemampuan berkelahi atau berperang. Keterangan tentang tokoh *Bawarodi* dan *Larungan*, dicatat di sini karena ditemukan dalam beberapa kisah kesejarahan, tradisi lisan maupun dokumen tertulis.

Keberadaan bekas benteng yang ada di pulau Miangas adalah bagian lain dari kisah kesejarahan yang diperoleh dari narasumber

kami. Benteng pertahanan dengan konstruksi batu tersusun rapi terletak di atas bukit. Warga menyebutnya dengan kata *Ota (Kota)*. Puncak bukit yang mereka sebut Gunung Kota (ketinggiannya 105 meter di atas permukaan laut. Pada sisi timur dan utara topografinya terjal, sedangkan pada sisi barat dan selatan agak landai. Sisa-sisa batu yang disusun sebagai benteng ini terdapat pada sisi yang topografinya agak landai. Untuk mendaki dan mencapai tempat ini, harus melewati sisi yang landai atau dari arah barat. Benteng kedua terletak di pulau Baŕonto, di ujung selatan pulau Miangas.

Dalam tradisi lisan disebut-sebut *tinonda* yang tampaknya signifikan karena mengacu pada rekaman peristiwa mobilitas warganya, yang bermakna bahwa cikal-bakal warga adalah mereka yang diutus untuk membela dan mempertahankan pulau kecil ini. Istilah *Tinonda* acapkali disebut oleh para penutur dalam suasana resmi sebagai penanda kesatuan kepulauan Talaud, yaitu: “dari *Tinonda* sampai *Napombaŕu*” yang berarti bahwa rentang-geografi kepulauan Talaud dari *Tinonda* atau Miangas sampai *Napombaŕu*, sebuah pulau karang yang berada di ujung selatan pulau Kabaruan.

Selain *Tinonda* ada juga nama lain seperti *Poilaten* untuk pulau Miangas. Sebutan ini dapat ditemukan dalam kisah kesejarahan yang menuturkan pelayaran penduduk masa lampau. Pulau ini ditemukan oleh pelaut dari pulau-pulau Nanusa atas bantuan cahaya kilat yang memencar sehingga menerangi posisi pulau dari kejauhan. Harafiah, *poilaten* adalah gabungan dari dua kata *poi* = di sana, dan *ilaten* (*ila'* = cahaya kilat). Kisah lain, menghubungkan sebutan *poilaten* dengan kehadiran pemukim awal dari daratan Mindanao yang juga menemukan pulau ini karena adanya kilatan cahaya.

Dalam kartografi Eropa, pulau Miangas dinamai *las Palmas* atau juga *islas de las Palmas* dan *Palmas Island*. H.J. Lam (1932) memberi judul bukunya dengan menggunakan sebutan Miangas (*Palmas*). Tentang sebutan *las Palmas* menurut Ulaen, Wulandari

dan Tangkilisan (2012:92), dipersoalkan oleh Max Huber. Argumenasinya Max Huber adalah pelaut yang memberi nama *Palmas* tidak menyinggahi pulau ini apalagi ketemu warganya, sehingga mereka hanya menandai pulau ini dengan tanaman *Palmae* yang bertumbuh mengelilingi pulau. Karena kalau mereka ketemu dengan penduduknya, pasti mereka mencatat nama-nama lokal seperti *Tinonda*, *Meanga*, dan *Poilaten*.

Tentang letak geografis pulau Miangas, dokumen kolonial, "*Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*" jilid II (1918), pada artikel tentang Miangas memberi keterangan tentang kedudukan pulau ini pada 5° 31' 4" Lintang Utara dan 126° 33' Bujur Timur. Catatan dalam "*Cencus of the Philippine islands*" hasil survei dari Amerika Serikat tahun 1919 menandai bahwa pulau ini berada pada 5° 30' Lintang Utara dan 126° 30' Bujur Timur.

Sumber Belanda lainnya, berupa dokumen resmi yang merujuk pada laporan dari Letnan (laut) Graaf van Hogendorp yang berkunjung kesana dengan kapal-patrol (perang) Belanda SS "Raaf" yakni peta laut nomor 183, no. 9 menyatakan bahwa pulau ini berada pada 5° 35' Lintang Utara dan 126° 35' Bujur Timur. Keterangan tersebut dikoreksi oleh H.J. Lam (1932:15), dan menyatakan bahwa pulau Miangas berada pada 5° 33' Lintang Utara dan 126° 34' Bujur Timur. Lam selanjutnya memberikan deskripsi tentang pulau yang agak memanjang dari selatan ke utara sepanjang 2.5 km., dan lebarnya dari timur ke barat, 1.6 km. Keterangan H.J. Lam ini merupakan hasil pengukuran yang akurat karena di dalam timnya, ia menyertakan beberapa ahli di antaranya geolog dan petrografer. Selain itu H.J. Lam juga mendeskripsikan letak pulau Baŕonto dengan diameter 150 – 160 meter yang berada di ujung selatan pulau Miangas; letak puncak Kota dan puncak Soŕo masing-masing dengan ketinggian 105 meter di atas permukaan laut, mengapit puncak Batu, puncak tertinggi dari perbukitan yang ada dengan ketinggian 110 meter di atas permukaan laut.

Pulau Miangas pernah dikunjungi oleh Misionaris dan Pekabar Injil. Para misionaris itu adalah Pendeta bernama Kroll bertugas di Manado yang mengikuti kunjungan Residen Manado, Jellesma pada tahun 1895, yang membaptis 254 orang Miangas sebagai penganut Kristen Protestan<sup>3</sup>. Sesudah itu, datang juga Pendeta Pennings, yang berkunjung pertama kali pada bulan April 1909; dan kedua kali pada bulan Oktober tahun yang sama. Dua orang pendeta yaitu Pendeta Zwaan dan pendeta Stokking, pekabar Injil yang bertugas di pulau-pulau Sangihe dikabarkan berkunjung ke Miangas mendampingi Pendeta Pennings. Namun demikian sejauh ini belum ditemukan catatan mereka tentang Miangas. Peneelusuran dokumen dipihak pekabar Injil yang memiliki keterangan tentang pulau Miangas baru sebatas pada karya Brilman (1986[1938]). Deskripsi Brilman tentang pulau Miangas dapat dibaca dalam kutipan berikut:

“... **Pulau Miangas.** Pulau terpencil ini yang terletak jauh di samudera, 11 km<sup>2</sup> luasnya dan didiami oleh sekitar 800 orang, beberapa tahun yang lalu menjadi pokok pembicaraan mengenai persoalan apakah daerah ini sesungguhnya merupakan milik Belanda ataukah milik Amerika Serikat. Menurut putusan perdamaian pada tanggal 4 April 1928, maka ditetapkan oleh Dr. Max Huber, bahwa keseluruhan daerah ini termasuk pada wilayah kerajaan Belanda. Pada tanggal 7 Mei 1929 bendera tiga warna dinaikkan di pulau ini dengan upacara resmi oleh raja kepulauan Talaud dengan dihadiri oleh Residen Manado dan lagi banyak orang lain. Jadi, daerah perbatasan yang terpencil ini hanya dikunjungi sekali dalam setengah tahun oleh kapal besar yang sesudahnya menuju Lirung, kemudian kembali ke Petta yang ada di gugusan pulau Sangi.” (1986:12).

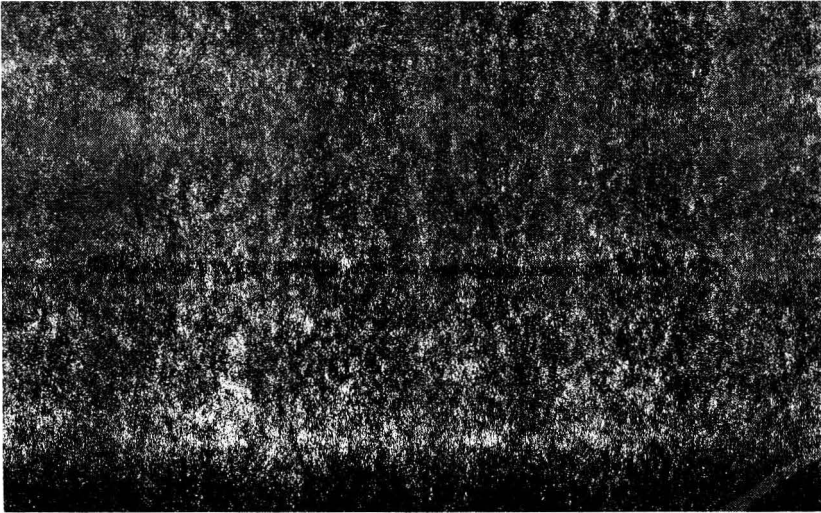
---

3 H.J. Lam, 1932:44.



bahwa pada tahun 1825, Pulau Miangas dinyatakan sebagai jajahan dari kerajaan Taruna. Kerajaan ini memang sudah mengklaim Pulau Miangas sebagai bagiannya sejak tahun 1726. Nanti pada tahun 1889, Pemerintah Kolonial Keresidenan Manado, melantik seorang tokoh adat utama yakni *ratumbanua* yang bernama Abaten menjadi *kapiten laut* atau Kepala Kampung Miangas. Hanya saja, tokoh adat atau *Ratumbanua* ini sudah lanjut usianya. Atas usulan *Jogugu* Nanusa, Lantaka II, agar Timpa dilantik menggantikan ayahnya dan ia diberi tugas untuk menyatukan rumah warga yang tersebar di beberapa tempat di pemukiman yang ada sekarang<sup>5</sup>.

Gambar 2.2 Pulau Miangas tampak dari arah selatan



Meskipun Miangas dianggap sebagai wilayah Keresidenan Manado, namun dalam hal urusan niaga, orientasi mereka bukan ke Manado tetapi ke Mindanao. Tidak ada catatan yang merekam tentang waktu kapan pelayaran niaga yang dipimpin oleh *kapiten laut* Timpa terjadi. Dikisahkan, ketika dalam pelayaran

5 H.J. Lam, 1932:43 – 44.

ke Mindanao, mereka berpapasan dengan kapal patroli Spanyol. Pada saat itu pula, pihak Spanyol memberikan bendera Spanyol kepada *kapitenlaut*. Namun, pemberian itu ditolak dengan alasan bahwa mereka (Miangas) sudah turun-temurun menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda.

Baik Lam maupun Ulaen, Wulandari dan Tangkilisan yang memaparkan perihal kedatangan Residen Manado Jellesma di Miangas pada tahun 1895 dengan menggunakan kapal perang S.S. Raaf sebagai kunjungan istimewa, penyerahan medali (kepatuhan) kepada *kapitenlaut* atas sikapnya tersebut, tidak mencatat adanya keterangan dan sumber tentang terjadinya penolakan pemberian bendera Spanyol. Kisah ini, rupanya, mereka dasarkan pada narasi-kesejarahan yang hingga kini masih dikisahkan terutama di lingkungan keturunan *kapitenlaut* Timpa tentang kisah heroik dari nenek moyang mereka sehingga memperoleh medali. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang tahu, apakah medali itu masih ada atau sudah hilang, sama halnya dengan simbol kerajaan Belanda yang diserahkan ke warga Miangas dan kini tidak berbekas lagi.

Pulau Miangas memiliki arti khusus dalam pemerintahan Hindia Belanda khususnya dan Kerajaan Belanda. Dengan menyangand nama *Las Palmas* atau *Palmas Island*, pulau kecil seluas  $\pm 3.15 \text{ km}^2$  ini pun tercatat sebagai bagian dari wilayah kepulauan Filipina, jajahan Spanyol yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Amerika Serikat. Di satu pihak, statusnya sebagai bagian dari wilayah Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda memiliki sejarah jauh ke belakang, yakni sejak adanya Perjanjian antara kerajaan pribumi dengan VOC, dan oleh dua kerajaan yaitu Kerajaan Tabukan dan Kerajaan Tahuna sebagai bergantian mengklaim pulau Miangas sebagai bagian dari wilayah mereka; di pihak lain, sejak adanya Perjanjian yang tertuang dalam sebuah dokumen yang disebut Traktat Paris 1898 khususnya dalam bagian yang menentukan titik titik-titik koordinat wilayah Filipina, pulau Miangas berada di dalamnya. Upaya saling mengklaim pulau

ini kemudian oleh kedua pihak dibawa ke Lembaga Arbitrase Internasional dan pada akhirnya Max Huber yang ditunjuk menangani masalah ini pada bulan April 1928 memutuskan bahwa pulau Miangas adalah bagian dari Hindia Belanda atau berada di wilayah Hindia Belanda. Hanya saja, dalam keputusan itu tidak menyinggung soal batas-wilayah sehingga pulau Miangas yang diakui sebagai milik Hindia Belanda (kemudian Indonesia) berada di wilayah Filipina (sebuah kajian yang secara khusus membahas topik ini telah dilakukan oleh Ulaen, Wulandari, dan Tangkilisan, *Sejarah Wilayah Perbatasan Miangas – Filipina 1928 – 2010: Dua Nama Satu Juragan*, 2012).

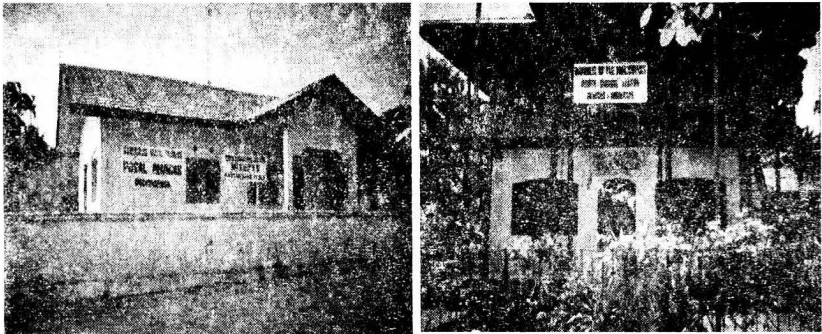
Temuan lain dalam dokumen pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah 1928 adalah posisi Miangas sebagai pelabuhan terakhir dari Batavia ke Manado – yang juga jarang dikunjungi selain dua kali dalam setahun – dalam jaringan pelayaran yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran *Koninklijke Paketvaar Maatschappij* (KPM). Status sebagai pelabuhan terakhir atau tepatnya paling ujung (utara) dalam jaringan pelayaran ini masih berlangsung hingga kini dalam jaringan pelayaran yang berpangkalan di pelabuhan Samudera Bitung dan melayari wilayah kepulauan Sangihe dan Talaud. Selain pelayaran perintis yang dioperasikan oleh Direktorat Pelayaran Laut Departemen Perhubungan, perusahaan negara PT Pelni juga melayari jalur pelayaran dalam jaringan pelayaran ini. Di sebut sebagai pelabuhan terujung karena ada satu masa di awal tahun 2000-an, setelah 4 negara di ASEAN menyepakati perjanjian kerjasama yang disebut BIMP-EAGA, ada pelayaran dari PT Pelni yang menghubungkan pelabuhan Bitung dengan Davao. Pelayaran ini menyinggahi dua pelabuhan yaitu pelabuhan Lirung dan Tahuna, tetapi tidak menyinggahi dua pos lintas-batas (Marore dan Miangas) dalam Perjanjian Lintas Batas antara Indonesia dan Filipina.

Dalam dokumen Perjanjian Lintas Batas atau *Border Crossing Agreement* yang disingkat BCA, antara Pemerintah Indonesia dan



Pemerintah Filipina (1956) dan tetap berjalan hingga sekarang, pulau Miangas (dan pulau Marore) ditetapkan menjadi Pos Lintas Batas. Tidaklah mengherankan kalau di pulau ini terdapat perwakilan negara tetangga (Filipina) menempati pos pelintas batas (*Border Crossing Station*) mewakili tiga institusi yaitu Bea Cukai (*Custom*), Imigrasi, dan Marinir. Begitu pula di pihak Indonesia, terdapat petugas Bea Cukai, Imigrasi dan TNI-AL sebagai mitra kelompok kerja dalam naungan perjanjian di atas.

**Gambar 2. 3 Pos Angkatan Laut RI & *Border Crossing Station* Republik Filipina di Miangas**



Nama pulau Miangas dapat ditemukan juga dalam berbagai dokumen pemerintah kabupaten Kepulauan Talaud (dahulu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud dan sudah dimekarkan menjadi dua wilayah kabupaten), dokumen pemerintah propinsi Sulawesi Utara dan dalam dokumen sejumlah departemen dan lembaga negara Republik Indonesia, terutama yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan. hal mana akan diuraikan dalam sub-bab berikut.

### **2.3 Miangas Dalam Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional**

Beberapa sumber yang dapat menggambarkan geo-politik kepulauan Sangihe dan Talaud hendak diungkapkan dalam bagian

ini. Dengan geo-politik dimaksud bagaimana sebuah wilayah geografis ditata menurut sistem pewilayahan administrasi pemerintahan. Penataan pertama yang dapat menggambarkan geo-politik kepulauan ini adalah pewilayahan berdasarkan pemerintahan tradisional dalam hal ini kerajaan. Dalam sistem ini, sistem pewilayahan bukanlah sebuah pembagian wilayah yang tegas batas-batasnya melainkan berdasarkan pada pusat (kerajaan) dan wilayah pengikutnya. Sistem ini pada masa pemerintahan Hindia Belanda tetap dipertahankan. Para raja tetap diakui dan pemerintah Hindia Belanda menempatkan seorang *Controleur* di kepulauan Sangihe dan Talaud sebagai bagian dari Keresidenan Manado.

Perlu disebut di sini bahwa terdapat masa-masa transisi atau peralihan sistem pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Masa peralihan pertama, terjadi semasa pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT). Kepala Daerah pertama yakni W. Sarapil, pada waktu itu tidaklah lebih dari seorang pejabat yang menggantikan status *Controleur* pejabat pemerintahan Hindia Belanda, karena para raja yang ada masih memiliki kekuasaan. Masa peralihan kedua terjadi pada tahun 1949 – 1950. Pada masa itu, D.J. Medellu menjadi Kepala Daerah Kedua dan saat bersamaan dibentuklah Federasi Raja-raja. Pada tahun 1951, Daerah Sangihe dan Talaud diperintah oleh lembaga yang disebut Dewan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas seorang ketua (J.K. Janis) dan empat orang anggota (L. Wuaten, A. Tompoh, D. Lampah, dan A. Jacobus). Masih di tahun yang sama, Pemerintah Pusat menetapkan H.D. Manoppo sebagai Bupati Kepala Daerah Sangihe dan Talaud (keempat). Satu hal yang perlu dicatat ialah pada tahun 1950, daerah wilayah raja-raja menjadi swapraja dipimpin oleh Kepala Swapraja.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayah kabupaten kepulauan Sangihe dan Talaud meliputi dua wilayah *onderafdeeling* yaitu (*onderafdeeling* Sangihe dan *onderafdeeling* Talaud). Di bawahnya terdapat pewilayahan yang disebut kejojuguan. Jumlah

wilayah kejojuguan seringkali berubah-ubah dari masa ke masa. Berkaitan dengan wilayah kejojuguan, pulau Miangas merupakan bagian dari kejojuguan Nanusa. Setelah terjadi peralihan dari wilayah kejojuguan menjadi wilayah kecamatan, maka kejojuguan Nanusa menjadi kecamatan Nanusa dan pulau Miangas menjadi salah satu pulau yang ada di dalamnya.

Pada sub-bab 2.2 di atas telah disinggung soal adanya perjanjian lintas batas. Adanya perjanjian ini dapat dilihat sebagai titik awal keberadaan pulau Miangas dalam kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Dari berbagai sumber yang membahas topik perjanjian lintas batas antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina (Ulaen, 2003; Ulaen & Takashi Shiraishi, 2004, 2008; Salindeho & Sombowadile, 2008) diperoleh keterangan bahwa setelah dua bangsa (Indonesia dan Filipina) memproklamkan kemerdekaannya, pemerintah kedua negara menyadari bahwa ada warganegara mereka yang menetap di wilayah negara tetangga secara tidak sah. Ribuan warga Indonesia menetap di pulau Mindanao, pulau Balut, pulau Sarangani. Begitu pula dengan ratusan warga Filipina menetap secara tidak sah di kepulauan Sangihe dan Talaud, pulau Lembah dan pesisir Minahasa. Keberadaan mereka pada dasarnya bukan sebuah pelanggaran (secara hukum) melainkan terjadi karena hubungan-hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin sejak lama. Ketika Kongres Tingkat Tinggi Asia – Afrika dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 – 24 April 1955, dengan semangat kebersamaan Asia-Afrika, beberapa petinggi dua negara membicarakan persoalan keberadaan warga tersebut. Pembicaraan lebih formal kemudian dilanjutkan di Manila pada tahun yang sama dan setahun kemudian, ketika pertemuan antara petinggi kedua negara dilaksanakan di Jakarta, tercapailah persetujuan 4 Juli 1956 yang dikenal dengan *Agreement on Immigration between the Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia*. Perjanjian ini ditandatangani oleh Soekardjo Wirjopranoto yang kala itu menjabat sebagai

Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh atas nama pemerintah Indonesia dan koleganya yang juga menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh, Jose Fuentesbella. Dalam perjanjian ini pulau Miangas ditetapkan sebagai salah satu dari empat wilayah perbatasan di Indonesia, dan empat wilayah perbatasan lainnya ada di wilayah Republik Filipina. Sembilan tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 16 September 1965, disepakati persetujuan lanjutan dari yang disepakati pertama. Kesepakatan yang dikenal dengan sebutan *Joint Directives and Guidelines on the Implementation of the Immigration Agreement on Repatriation and Border Crossing Arrangement Between Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines*, ini ditandatangani di Manila oleh Jusuf Ronodipuro yang menjabat sebagai Menteri-Counsellor Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Leon T. Garcia, Konsul Jenderal Republik Filipina. Dalam perjanjian inilah, pulau Marore, pulau Miangas, dan Mabila (pulau Balut) ditetapkan sebagai Pos-pos Lintas Batas. Setiap pelintas batas dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Lintas Batas harus melewati pos di pulau Miangas atau pos di pulau Marore, kemudian pos Mabila di wilayah Filipina untuk melegalisir dokumen-dokumen perjalanannya. Begitu pula sebaliknya.

Keterisolasian pulau Miangas dengan kendala cuaca menjadi bahan pertimbangan Bupati kepulauan Sangihe dan Talaud untuk menempatkan seorang wakil camat di pulau itu yang dalam hal ini sertamerta meningkatkan statusnya menjadi Kecamatan Perwakilan. Alasan diadakannya Kecamatan Perwakilan di Talaud, selain Miangas, juga Kecamatan Perwakilan Lirung di Melonguane, adalah karena bagian selatan dari pulau Karakelang mulai dari kampung Tarun sampai kampung Bowombaru (meliputi tujuh kampung) yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lirung berada di pulau lain yang dipisahkan oleh sebuah selat dan hal ini mempengaruhi layanan pada masyarakat. Ketika arus pelintas-batas makin ramai, Pemerintah Kabupaten Sangihe dan

Talaud menetapkan Kepala Kecamatan Perwakilan sekaligus merangkap sebagai Camat *Border Crossing Area* atau Camat BCA. Setelah Talaud dimekarkan dari Sangihe pada tahun 2003, status Miangas pada tahun 2007 menjadi Kecamatan Khusus. Miangas menjadi satu-satunya kecamatan yang unik, karena dalam satu wilayah kecamatan hanya ada satu kampung berstatus desa.

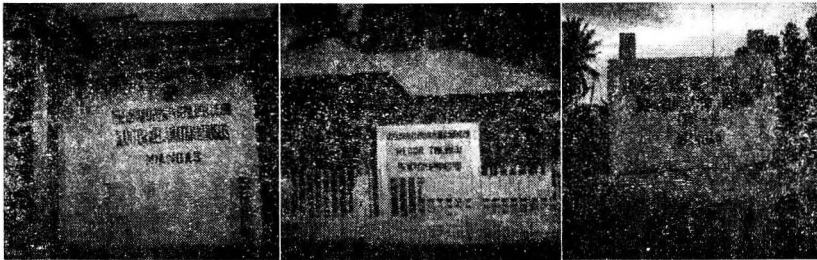
Sejak tahun 1980-an, baik yang terbaca lewat media cetak dan media pandang-dengar atau *audio visual*, pulau Miangas diwacanakan sebagai salah satu pulau terluar di wilayah Republik Indonesia. Dari pihak keamanan, mewacanakannya sebagai pulau terdepan. Para perencana dan penyusun rancangan pembangunan negara mulai dari aras pemerintah kabupaten, propinsi, hingga pusat pemerintahan mewacanakan pulau Miangas sebagai “beranda depan” NKRI. Status yang tidak dikenakan terhadap pulau Marore – meskipun berada di wilayah kabupaten induk pemekaran dan satu wilayah propinsi – tetapi paling ramai dalam hal jumlah dan intensitas pelintas batas.

Untuk menandai batas-batas wilayah negara, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 38 Tahun 2002, tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang ditanda-tangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 28 Juni 2002. Dalam Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, Nomor urut 38 tercantum nama Pulau Miangas yang berada pada koordinat 05° 34' 02" Utara dan 126° 34' 54" Timur, adalah Titik Dasar No. TD. 056, Pilar Pendekat No. TR. 056, antara TD. 056 – TD.056A sebagai Garis Pangkal Biasa, dan pada 05° 33' 57" Utara dan 126° 35' 29" Timur, adalah Titik Dasar No. TD. 056A, Pilar Pendekat No. TR. 056, Jarak TD. 056A – TD.057A = 57.91 nm, Garis Pangkal Lurus Kepulauan.

Sepertinya, penamaan sebagai “pulau terluar” memperoleh legitimasi dari Peraturan Pemerintah tersebut (38/2002) terutama pada pasal 11 ayat (3) yang bunyinya sebagai berikut: “... Apabila

di kemudian hari Koordinat Geografis Titik-Titik Terluar, pulau-pulau terluar, dan seterusnya.” Wacana sebagai “pulau terluar” atau “pulau terdepan” menjadi alasan bagi beberapa lembaga pemerintahan untuk menyusun program pembangunan yang dapat dilakukan di pulau Miangas. Dalam konteks pertahanan keamanan, status sebagai “pulau terluar” seperti ini harus dikawal. Atas dasar itulah maka di pulau kecil ini dihadirkan sebuah Pos TNI-Angkatan Darat dari Batalion 712 dengan sebelas aparat disamping kehadiran Pos Koramil sebagai bagian dari Korem Santiago Manado, dengan enam orang aparatnya.

**Gambar 2.4 Kantor Kecamatan, Pos Resor Kepolisian dan Pos Koramil di Pulau Miangas**



Sebagai pulau terluar atau terdepan, diperlukan pula kehadiran kekuasaan negara baik dalam bentuk pranata pemerintahan maupun simbol-simbol kenegaraan. Di atas telah disebut tentang kehadiran pemerintah di tingkat kecamatan, yaitu Kepala Kecamatan Khusus (Miangas) dengan Kantor Kecamatan serta aparatnya. Dalam sistem pemerintahan, kehadiran sebuah wilayah yang berstatus kecamatan tidak sekedar diperintah atau dipimpin oleh seorang kepala kecamatan. Kelengkapannya adalah dari pihak kepolisian setingkat Polsek (kepolisian Sektor) dan dari pihak TNI-AD adalah kehadiran institusi militer setingkat Koramil. Institusi-institusi pemerintahan seperti Kecamatan, Pos Polsek, Pos Koramil beserta aparat yang memimpin institusi pemerintahan tersebut di Miangas fungsi utamanya lebih berupa

unjuk-kehadiran kekuasaan negara dan bukan sekedar layanan terhadap warga. Anggapan ini didasarkan pada jumlah penduduk yang dilayani. Jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di tanah air yang menyandang status serupa yaitu kecamatan yang memiliki jumlah penduduk puluhan ribu hingga ratusan ribu jiwa dibandingkan dengan warga pulau Miangas yang setiap tahunnya berada pada kisaran 600-an jiwa.

Perhatian terhadap pulau Miangas sebagai “pulau terluar” di daerah perbatasan sejak tahun 2005 merupakan konsekuensi logis dari kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Pemerintah berupaya menjadikan pulau-pulau terluar ini sebagai “beranda depan”. Dalam dokumen yang masih bersifat draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, pemerintah merumuskan konsep “..... ‘beranda depan’ adalah kawasan yang secara geografis berbatasan dengan negara lain dan menunjukkan gambaran tentang kondisi wilayah serta jatidiri bangsa Indonesia yang bermartabat.” Pada bab 26 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, tercantum kegiatan-kegiatan pokok yang berhubungan dengan pembangunan wilayah perbatasan (dalam hal ini Kabupaten Talaud yang ditetapkan sebagai wilayah perbatasan) dan pulau Miangas sebagai bagiannya, antara lain meliputi:

1. Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil melalui, antara lain, penerapan berbagai skema pembiayaan pembangunan seperti: pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), public service obligation (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, penerapan universal service obligation (USO) untuk telekomunikasi, program listrik masuk desa;

2. Peningkatan kerja sama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan) dan mencegah penyelundupan barang, termasuk hasil hutan (*illegal logging*) dan perdagangan manusia (*human trafficking*). Namun demikian perlu pula diupayakan kemudahan pergerakan barang dan orang secara sah, melalui peningkatan penyediaan fasilitas kepa-beanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan per-tahanan;
3. Peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara. Selain dari pada itu, perlu pula dilakukan pengembangan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal melalui pengembangan sektor-sektor unggulan;
4. Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat; dan pene-gakan supremasi hukum serta aturan perundang-undang-an terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan. (PerPres No. 7/2002, IV. 26-7)

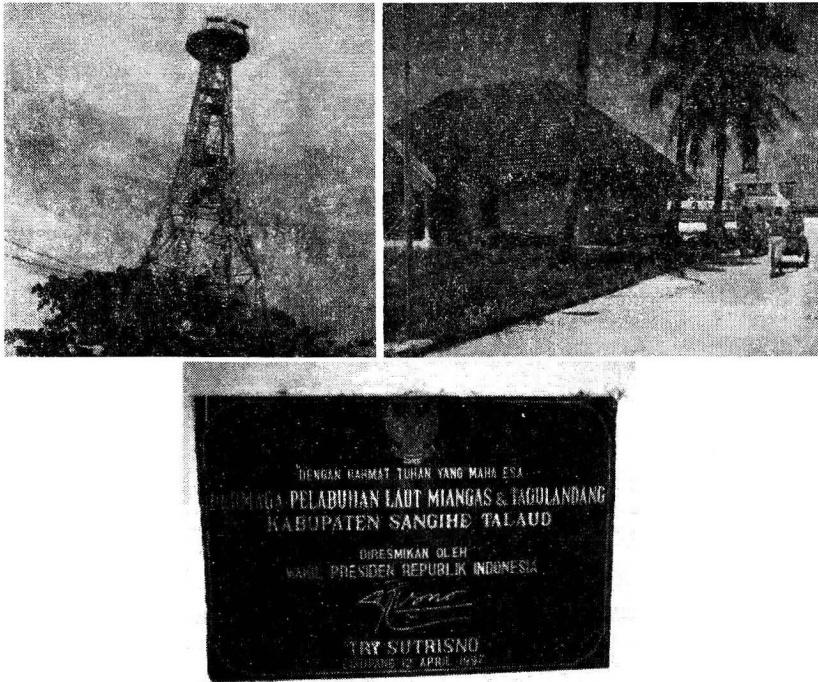
Mengacu pada strategi pembangunan di atas, baik pemerintah pusat melalui Kementerian serta Badan yang ada, maupun pemer-intah daerah (Propinsi Sulawesi Utara serta Kabupaten Kepulauan Talaud) memberi prioritas pembangunan di pulau Miargas. Pihak Departemen Perhubungan (Laut) melihat status pulau terdepan atau terluar ini sebagai alasan perlu adanya “mercu suar” bagi ke-pentingan navigasi. Selain itu, sebagai titik terujung dari sebuah jaringan pelayaran, maka diperlukan sarana-prasarana penun-jangannya. Maka dihadirkanlah petugas yang melayani mercu-suar bagi kepentingan navigasi atau pelayaran serta pengelola dermaga, dilengkapi dengan bangunan perkantoran dan peru-mahan. Kehadiran petugas Direktorat Jenderal Perhubungan laut yang mengelola dan mengawasi dermaga maupun mercu suar



dan navigasi menunjukkan adanya aktivitas pelayaran dan bukan sekedar menjaga fasilitas negara tersebut. Sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto, dengan Dirjen Perhubungan Laut, Habibie, dibuka pelayaran perintis yang menjangkau pulau-pulau terpencil. Untuk wilayah propinsi Sulawesi Utara, kapal motor perintis bertolak dari pelabuhan Bitung secara reguler menempuh route: (1) Bitung – Tagulandang – Siau – Tahuna; (2) dari Tahuna ada dua route yakni route barat: Tahuna – Petta – Marore – Miangas – Karatung – Rainis – Melonguane – Lirung – Mangaran – Tahuna. Route timur: Tahuna – Petta – Mangaran – Lirung – Melonguane – Beo – Essang – Gemeh – Karatung/Kakorotan – Miangas – Marore – Petta – Tahuna. Kini pemerintah mengoperasikan tiga buah kapal perintis di wilayah perairan Sulawesi Utara. Selain itu, jaringan pelayaran yang menjangkau pulau Miangas adalah jaringan pelayaran yang dioperasikan oleh PT Pelni. Pelayaran ini baru pada tahun 2000-an dengan route: Bitung – Siau – Tahuna – Lirung – Karatung – Miangas – Karatung – Lirung – Tahuna – Siau – Bitung. Sejak pertengahan tahun ini (2012) pulau Marore sudah dijangkau oleh route pelayaran ini yaitu dari Tahuna – Marore – Lirung – Karatung – Miangas, kemudian kembali menyinggahi pelabuhan-pelabuhan tadi sebelum tiba di pelabuhan Bitung. Pelayaran ini dijadwalkan sebanyak dua kali dalam sebulan. Namun dalam kenyataannya, acapkali ada pembatalan<sup>6</sup> atau juga kapal (Sangiang) hanya sampai di pelabuhan Karatung dan kembali sehingga penumpang Miangas harus turun di Karatung menunggu pelayaran perintis.

6 Hal ini dialami langsung oleh Tim Peneliti yang sudah menjadwalkan keberangkatannya ke pulau Miangas pada tanggal 19 Oktober 2012. Anggota tim sudah berada di pelabuhan Bitung bersama puluhan calon penumpang dan terpaksa harus kembali ke Manado dan menggunakan kapal motor reguler yang melayani route Tahuna dan Melonguane.

**Gambar 2.5 Instalasi Menara Suar Ruang Tunggu dengan latar KM Sangiang dan Prasasti Dermaga Miangas**



Ketersediaan fasilitas penunjang perhubungan laut serta jaringan pelayaran baik yang dioperasikan oleh Direktorat Perhubungan Laut yang dikenal dengan Pelayaran Perintis yang sudah dijadwalkan setiap dua minggu dan jadwal pelayaran yang dioperasikan oleh PT Pelni dua kali dalam sebulan dengan rentang waktu dua minggu tampaknya memudahkan gerak mobilitas warga, selama cuaca alam bersahabat. Karena, pada musim-musim kencang, tidak ada kapal Perintis maupun Pelni yang berani melayari route ini. Tabel berikut akan menggambarkan berapa banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh warga untuk tiba di tiga pelabuhan (Bitung, Lirung, Melonguane).

**Tabel 2.1 Biaya dan lamanya pelayaran dari Miangas ke tiga pelabuhan.**

No	Dari	Tujuan	Jenis Pelayaran	Lamanya	Biaya
1.	Miangas	Lirung	PT Pelni	10 Jam	Rp. 80.000,-
2.	Miangas	Bitung	PT Pelni	36 jam	Rp. 218.000,-
3.	Miangas	Melonguane	Kapal Perintis	48 jam	Rp. 35.000,-
4.	Miangas	Bitung	Kapal Perintis	96 jam	Rp. 55.000,-

Diolah dari sumber Ditperla & PT Pelni

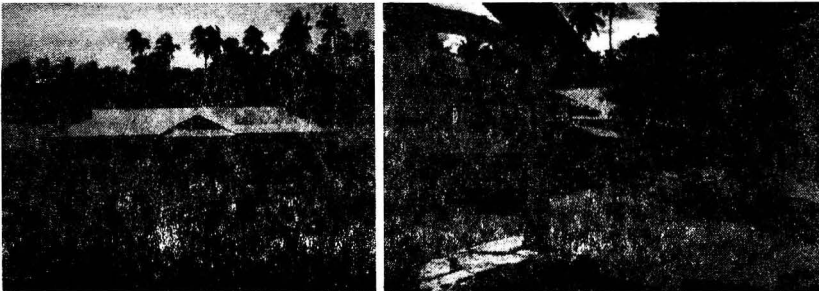
Di sektor pendidikan, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan mulai tingkatan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Amatan atas fasilitas pendidikan yang tersedia, dengan menggunakan hitungan jumlah murid dengan luas ruang belajar mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Kejuruan sudah lebih dari memadai. Baik kompleks Sekolah Dasar maupun kompleks Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan, meskipun menyatu dengan pemukiman, tetapi berjarak dengan rumah penduduk. Selain itu memiliki halaman yang luas dan tanah lapang yang dapat digunakan sebagai tempat olahraga. Persoalan yang dihadapi di tingkat SMP dan SMK adalah keterbatasan peralatan laboratorium serta ketersediaan staf pengajar yang sesuai dengan kurikulum. Dari sisi jumlah guru sudah berimbang dengan jumlah kelas dan rombongan belajar atau siswa. Tabel di bawah ini dapat memberikan gambaran tentang fasilitas pendidikan serta jumlah peserta didik di Miangas.

**Tabel 2.2 Keadaan fasilitas pendidikan serta peserta didik di pulau Miangas**

Sekolah	Jumlah siswa	Jumlah guru	Jumlah kelas	Keadaan ruang kelas
Taman Kanak-kanak	29	2	2	Baik (Permanen)
Sekolah Dasar	77	9	6	Baik (Permanen)
Sekolah Menengah Pertama	46	10	3	Baik (Permanen)
Sekolah Menengah Kejuruan	n.d.	n.d.	n.d.	Baik (Permanen)

Sumber: BPS: Kepulauan Talaud dalam Angka 2011.

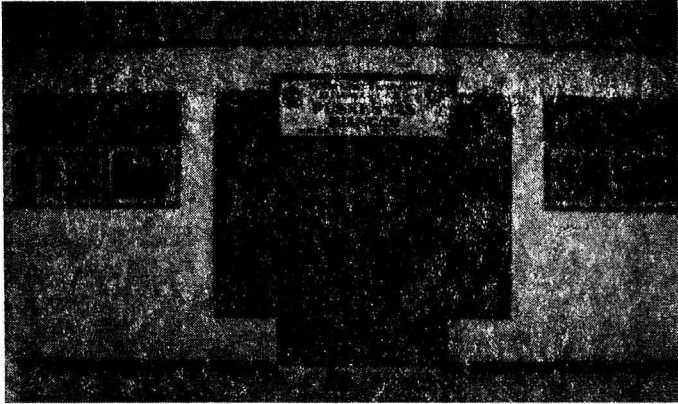
**Gambar 2.6 Bangunan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Miangas**



Untuk layanan kesehatan, pemerintah telah membangun Pusat Layanan Kesehatan dengan fasilitas Rawat Inap dan sebuah rumah dinas yang disiapkan bagi tenaga medis atau istilah setempat menyebutnya dengan rumah dokter. Puskesmas ini dilayani oleh 3 orang tenaga paramedis dan seorang dokter umum yang jarang berada di tempat. Beberapa waktu lalu, yaitu pada tahun 2007 – 2009, ada dokter kontrak yang dikirim langsung dari Jakarta.

Para dokter muda ini dianggap warga sebagai abdi-abdi negara yang begitu tekun dan mau menetap dalam waktu yang lama di Miangas. Mereka juga meninggalkan kesan baik karena suka bergaul dengan warga.

**Gambar 2.7** Pintu utama Pusat Kesehatan Masyarakat di Miangas



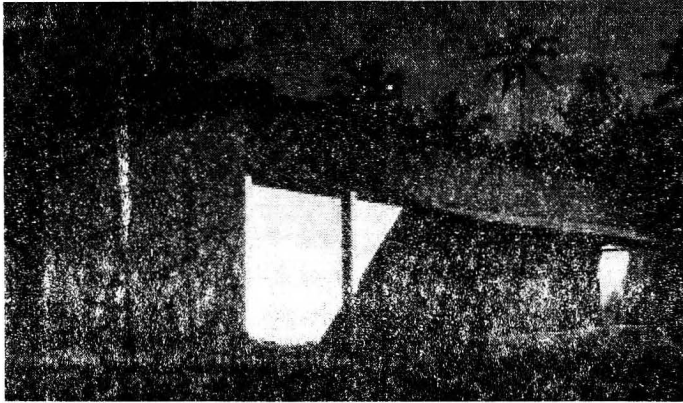
Menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Litbang Depsos bahwa derajat kesehatan penduduk cukup baik. Mereka menilai bahwa kesadaran warga untuk berobat ke Puskesmas cukup tinggi. Namun demikian terkait dengan kesehatan ini, sebanyak 70 persen penduduk belum memiliki jamban keluarga. Hal ini tentu memperburuk kondisi kesehatan lingkungan<sup>7</sup>.

Pusat-pusat layanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah seperti Puskesmas, serta beberapa bangunan perkantoran merangkap pos, sebelumnya dilengkapi dengan alat penerang berupa panel tenaga surya. Setelah itu, dengan hadirnya fasilitas penerangan dari PLN yang menggunakan tenaga diesel, bangunan perkantoran serta rumah warga menggunakan alat penerangan

<sup>7</sup> Lihat: Revitalisasi Model Pemberdayaan Pranata Sosial di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, 2008.

yang disediakan oleh PLN dengan waktu operasi jam 17.00 sampai jam 02.00. Fasilitas penerangan pada jam-jam tersebut dapat dinikmati selama ketersediaan solar terpenuhi. Tidak jarang, pada musim-musim kencang, ketika pasokan solar sudah terbatas, jam operasi dibatasi sampai pukul 21.00. Untuk meneruskan aktivitasnya setelah jam operasi PLN dihentikan, warga menggunakan alat penerangan seperti lampu gas (petromaks) dan jenis lampu yang menggunakan minyak tanah. Pengalaman seperti itu kini mungkin tidak akan terulang. Pemerintah pusat telah menyalurkan puluhan panel tenaga surya ke Miangas dan kini sebagian sudah dimanfaatkan.

Untuk menghilangkan anggapan bahwa Miangas adalah sebuah pulau yang terisolir, PT Telkom pada bulan Februari 2006 mengirim Tim Merah Putih ke Miangas untuk pengadaan fasilitas komunikasi. Meskipun CEO PT Telkom, Garuda Sugardo, pada bulan Maret gagal menyeberang dari Davao ke Miangas, tetapi misi Telkom yang dibawa oleh Tim Merah Putih terlaksana dengan baik. Warga Miangas bisa menyaksikan wajah serta disapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui sebuah teleconference. Hingga kini terdapat lima saluran fasilitas tersebut dapat digunakan oleh warga dari Miangas ke luar maupun dari luar Miangas ke Miangas melalui telpon genggam.

**Gambar 2.8 Gudang Depot Logistik yang dibangun di pulau Miangas**

Pada awal Januari 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan proyek senilai 12,9 milyar di Tomohon, dan salah satunya adalah proyek pembangunan Gudang depot logistik di Miangas. Menurut keterangan warga Miangas, gudang tersebut sejak dibangun belum pernah diisi stok beras. Hal serupa terjadi pada proyek pasar desa yang baru dibangun tetapi tidak menarik minat pelaku-usaha untuk menempatinnya.

Tidak semua fasilitas pemerintah bernasib serupa dengan kedua proyek di atas. Proyek yang mendapat tanggapan baik dalam bentuk digunakan secara maksimal adalah bak penampungan air bersih.

Sebelum adanya Peraturan Presiden di atas, warga Miangas juga telah menikmati sejumlah program non-fisik yang disalurkan oleh pemerintah seperti bantuan perahu sekoci dilengkapi dengan motor tempel (*outboard machine*) sebanyak 4 (empat) unit pada tahun 1996; empat unit perahu katinting pada tahun 1999; sembilan unit perahu motor pada tahun 2006; perahu pajeko dua unit; bantuan natura berupa bahan makanan dan bantuan perumahan. Program bantuan tersebut disalurkan melalui departemen sosial lewat dinas sosial propinsi dan kabupaten. Pengadaan berbagai program bantuan tersebut berkaitan erat dengan cara pandang institusi ini

melihat keberadaan warga Miangas baik itu melalui dinas sosial kabupaten (Sangihe dan Talaud) dan propinsi Sulawesi Utara.

Adanya Kebijakan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden tersebut, sejumlah lembaga pemerintahan melakukan kajian baik secara umum terhadap kawasan-kawasan tertinggal dan perbatasan, maupun secara khusus kajian tentang pulau-pulau terluar. Antara lain, yang melakukan kajian khusus di pulau Miangas adalah Tim Peneliti Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI. Hasil kajian yang menggunakan parameter Pusdatin tentang Kriteria dan Indikator Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menemukan, bahwa:

“... Sebagian besar penduduk Miangas termasuk kategori keluarga miskin. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, terutama makan sehari-hari, tempat tinggal dan pendidikan anak. Terlebih selama enam bulan, yaitu bulan Oktober hingga Maret setiap tahun, mereka tidak bisa mencari ikan di laut karena cuaca dan gelombang laut. Tingginya harga kebutuhan pokok semakin memperburuk kehidupan penduduk Miangas”.

Tim kajian itu juga merinci keberadaan warga Miangas yang terjaring dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

1. Terdapat sebanyak 168 kepala keluarga (323 jiwa) pada kategori Fakir Miskin. Indikatornya ialah mereka tidak memiliki pekerjaan (tetap) atau memiliki pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari secara layak.
2. Sebanyak 105 orang menempati rumah yang tidak layak huni. Suradi, dkk tidak merinci berapa banyak rumah yang tidak layak huni.
3. Terdapat sebanyak 77 orang anak yang dikategorikan sebagai terlantar, dengan alasan antara lain anak yang ditinggal mati oleh salah satu dari kedua orang tuanya dan anak-anak dari rumah tangga miskin.



4. Terdapat 90 orang manula yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal sehari-hari karena secara fisik sudah tidak berdaya.
5. Terdapat 24 orang penyandang cacat menyebabkan mereka mengalami hambatan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial dan ekonomi sehari-hari.
6. Terdapat 31 orang masuk pada kategori Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Mereka adalah para janda yang sekaligus kepala keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya<sup>8</sup>.

Temuan tim kajian dari Depsos seperti yang sudah dikutip di atas bahwa sebagian besar penduduk Miangas termasuk kategori keluarga miskin tidaklah mengejutkan karena pada waktu penelitian tersebut mereka lakukan, jumlah kepala keluarga di Miangas tercatat sebanyak 203 Kepala Keluarga (762 jiwa). Jumlah yang cukup besar untuk sebuah pulau yang memiliki keterbatasan daya dukung alam dan hasil buminya. Belum lagi dengan rotasi iklim yang lebih lama masa berombak dan berangin kencang dibandingkan dengan masa tenang. Lebih rinci, tim peneliti Departemen Sosial memaparkan data mereka atas kategori wilayah administrasi desa, yakni keberadaan warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di setiap dusun sebagaimana tampak dalam tabel yang kami kutip dari laporan tersebut berikut:

---

8 Lihat: Revitalisasi Model Pemberdayaan Pranata Sosial di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, 2008.

**Tabel 2.2 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di pulau Miangas**

No.	Jenis PMKS	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Jumlah
1.	Keluarga Miskin (KK)	53	49	66	168
2.	Rumah Tidak Layak Huni (unit)	36	49	15	100
3.	Anak Terlantar (orang)	20	10	47	77
4.	Lanjut Usia (orang)	23	27	30	90
5.	Penyandang Cacat (orang)	4	11	9	24
6.	Wanita Rawan Sosial/ Janda (orang)	4	3	24	31

Dikutip dari laporan Tim Depsos RI, 2008, halaman 7.

Tim Peneliti Depsos juga mencatat penyebab permasalahan di atas, antara lain: keterisolasian dan cuaca alam yang tidak menentu selama periode bulan Oktober sampai dengan bulan Maret setiap tahun sehingga warga tidak bisa melaut. Paparan atas realita sosial-kini yaitu banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial membawa kita pada pertanyaan apakah hal itu memang terjadi sejak masa lalu? Hal ini perlu dikaji karena “ingatan-kolektif” generasi tua memberi kesan akan adanya periode di mana warga Miangas terkenal dengan prinsip dan praktik kemandirian ketika mereka masih merupakan pendukung tradisi bahari.

Menilik arus pemberian bantuan selama dua tahun terakhir, sepertinya laporan tim peneliti Depsos sudah mendapat perhatian pemerintah. Bertambahnya penyaluran bahan makanan khususnya yang disebut “beras miskin” atau disingkat “raskin” yang dikelola langsung dari pusat, masuknya proyek PNPM, dan sebagainya dapat ditafsirkan sebagai indikator tingginya perhatian pemerintah. Hal yang kurang terpahami adalah pemberian atau penyaluran bantuan sepertinya tidak serta-merta diiringi dengan

upaya penyuluhan, pemberdayaan dan pendampingan. Jika hal ini tidak diperhatikan, tidaklah berlebihan kalau ada anggapan bahwa penyaluran bantuan tersebut justru “.... akan melumpuhkan kemampuan warga untuk bertahan hidup dan mereka akhirnya terjebak dalam situasi menunggu dan berharap pada bantuan pemerintah semata.”<sup>9</sup>

Menilik jumlah bantuan yang ada, sebagian besar bantuan dibawa langsung oleh pejabat pemerintah seperti bupati, gubernur, menteri yang berkunjung ke sana banyak yang berupa natura terutama bahan makanan (beras dan mie instan) serta uang dan langsung dibagikan tanpa adanya upaya penyuluhan, pendampingan, serta pemberdayaan warga. Perhatian pemerintah di atas membuat warga dua pulau yakni pulau Marampit dan pulau Marore merasa seperti kurang diperhatikan. Padahal, mereka berstatus sama sebagai pulau terdepan atau terluar.

Di pulau Miangas ditemukan ‘penanda kehadiran kekuasaan negara’ dalam rupa monumen. Monumen pertama adalah “tugu pancasila”. Monumen kedua, “tugu perbatasan”. Keduanya berlokasi di pelabuhan lama. Dua monumen lainnya, yakni sebuah monumen yang dibangun semasa pemerintahan Presiden Megawati dan tidak pernah selesai apalagi diresmikan. Monumen ini dibangun tidak lama setelah Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Warga setempat – entah lupa – tidak ada yang dapat menjawab pertanyaan tentang siapa yang membangunnya. Jawabannya adalah: ‘pemerintah’. Monumen terakhir adalah “monumen Santiago” yang dibangun dengan biaya

---

9 Komentar penelpon yang mengaku bernama Bapak Alex di Malalayang pada acara Dialog Interaktif dengan tema Membangun Daerah Perbatasan di Sulawesi Utara dengan narasumber Anggota DPD Jenderal Purnawirawan F. X. Tinggogoy; Kepala Badan Perbatasan Propinsi Sulawesi Utara, B. Mononutu, SH., pengamat masalah perbatasan, Steven Pailah, SH. MSi; Rabu, 14 Nopember 2012, jam 7.00 – 8.00 malam di TVRI Manado.

satu milyar dua ratus juta dan sudah diresmikan oleh Menteri Pertahanan pada bulan Agustus 2009. Keduanya berlokasi di pelabuhan baru yang berdermaga.

**Gambar 2.9** Monumen Perbatasan, Monumen Pancasila, dan sebuah monumen belum bernama dan belum rampung dikerjakan

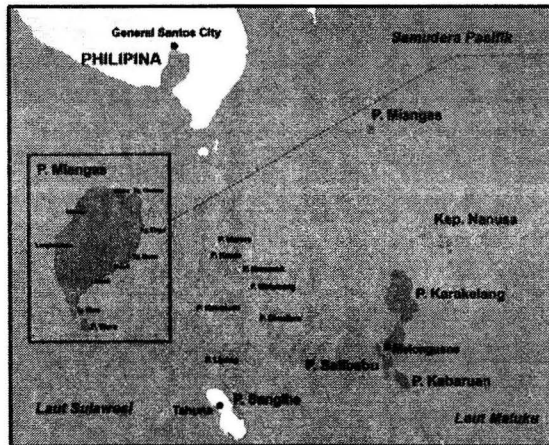


## 2.4 Wajah Miangas kini

Hingga akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1892, warga Miangas tersebar di beberapa pemukiman. Mereka mengelompok berdasarkan ikatan keanggotaan dalam *ruanga* atau 'suku'. Ketika Dr. H.J. Lam bersama timnya berkunjung ke pulau Miangas bulan Juni 1926, ia memberi deskripsi sebagai berikut: "...semua penduduk Miangas bermukim di kampung Miangas" (1932:47). Keputusan mengumpulkan warga yang sebelumnya menetap terpencar dalam dua belas pemukiman ke satu pemukiman adalah kerja keras dari *kapitenlaut* Timpa, sebagaimana diperintahkan oleh *Jogugu* Lantaka II. Sebelum ditunjuk sebagai *kapitenlaut*, Timpa menetap di Karatung. Ada juga keterangan bahwa Timpa ini adalah orang Karatung yang disiapkan oleh *Jogugu* Lanta'a II menjadi pembantunya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena kecekatan serta kecerdasannya sehingga tidaklah mengherankan apabila ia diutus oleh *jogugu* Lanta'a II untuk menata pemukiman di Miangas, sebagaimana layaknya pemukiman di Karatung yang

sudah tertata rapi waktu itu (awal abad ke 20). Timpa bukannya anak kandung Abaten, tetapi anak menantu.

Gambar 2.10 Peta Kepulauan Talaud (insert: Pulau Miangas)



Lebih lanjut Lam menulis: “ (Miangas), sebuah kampung yang rapi, terletak di pesisir pantai barat-daya dan terdapat sebuah jalan utama yang lebar dan lurus ke arah pantai, dan dua jalan yang lebih sempit yang sejajar dengan jalan utama tadi”(1932:47). Sistem penataan kampung dengan jalan utama yang membujur dari pelabuhan di ujung barat dan rumah ibadah (gereja) pada ujung timur, masih dipertahankan hingga kini. Bedanya, jalan utama – yang pada saat kunjungan Lam – tampak lebar, kini diberi pembatas-beton setinggi 10 cm. dengan lebar 50 cm., terdapat tiang listrik terpancang dengan jarak tertentu, dan dalam beton pembatas ditanami bunga. Begitu juga dengan konstruksi jalan. Lam mendeskripsikan jalan yang tertata rapi dan bersih tertutup pasir-kerikil putih. Permukaan pasir-kerikil putih itu kini sudah diganti dengan coran beton. Begitu pula dengan pelabuhan (lama). Tepat di tepi pantai dapat dijumpai dua buah monumen, masing-masing Tugu Perbatasan dan Tugu Benteng Pancasila. Tidak jauh

dari kedua monumen ini terdapat Pos Angkatan Laut, Kantor dan Aula Kecamatan dan beberapa bangunan pemerintah. Di ujung timur jalan utama yang semula batas pemukiman adalah rumah ibadah, kini sudah ketambahan pemukiman di belakangnya, dan menjadi kompleks persekolahan, khususnya untuk SLP dan SMK Negeri Miangas.

**Gambar 2.11 Jalan Utama di Miangas**



Jalan utama diapit oleh dua jalan yang sejajar dan pada jarak tertentu ketiga jalan ini dihubungkan oleh jalan-jalan yang membentuk persimpangan. Sekarang, permukaan jalan tersebut diberi coran beton. Selain itu, salah satu simpang jalan sekarang menjadi jalan utama yang menghubungkan pemukiman dengan dermaga yang terletak di teluk Lobo, sisi selatan pulau Miangas. Di kedua sisi jalan utama yang menghubungkan kompleks pelabuhan dan dermaga, dapat ditemukan rumah-rumah dinas kepolisian, markas (rumah dan kantor) marinir dan petugas Lintas-Batas (*border crossing station*) Republik Filipina. Di pelataran dermaga terdapat dua bangunan, masing-masing bangunan Terminal Penumpang, Kantor Syahbandar dan ke arah timur terdapat gudang depot logistik. Di samping gudang depot logistik terdapat markas (rumah dan kantor) TNI-AD. Kesemuanya merupakan bangunan

permanen. Antara bangunan terminal penumpang dengan kompleks PLN terdapat tangki penampungan BBM.

Selain bangunan pemerintah, militer, dan perwakilan Republik Filipina, di kedua sisi jalan utama maupun jalan lainnya terdapat rumah penduduk. Lam (1932:47) menggambarkan rumah-rumah yang ada berdinding rendah tapi padat, rumah lainnya didirikan di atas pilar-pilar persegi empat kira-kira satu meter tingginya, berjarak lebar dari pagar-beton yang terbentang sepanjang jalan. Beranda depan rumah, diberi tangga yang ditempatkan di depan pada posisi tengah. Hampir seluruh rumah menggunakan bahan batang kelapa. Gambaran yang diberikan Lam ini, tidak dijumpai sekarang. Sebagian dari rumah warga adalah bangunan permanen yang menggunakan dinding serta lantai beton dan atap seng. Sebagian besar rumah masih menggunakan papan atau batang kelapa dan beratapkan daun rumbia maupun anyaman daun kelapa.

Hal menarik dari catatan Lam (1932:46) adalah soal jumlah penduduk. Pada tahun 1926, warga Miangas sebanyak 680 jiwa (laki-laki 325 jiwa dan perempuan 355 jiwa). Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan hasil sensus penduduk 2010, yakni 728 jiwa yang tergabung dalam 169 kepala keluarga dengan komposisi serupa yakni laki-laki 350 jiwa dan perempuan 378 jiwa (Kepulauan Talaud dalam Angka 2011:75). Pada tahun 2008, tercatat jumlah penduduk sebanyak 203 Kepala Keluarga yang meliputi 762 jiwa.

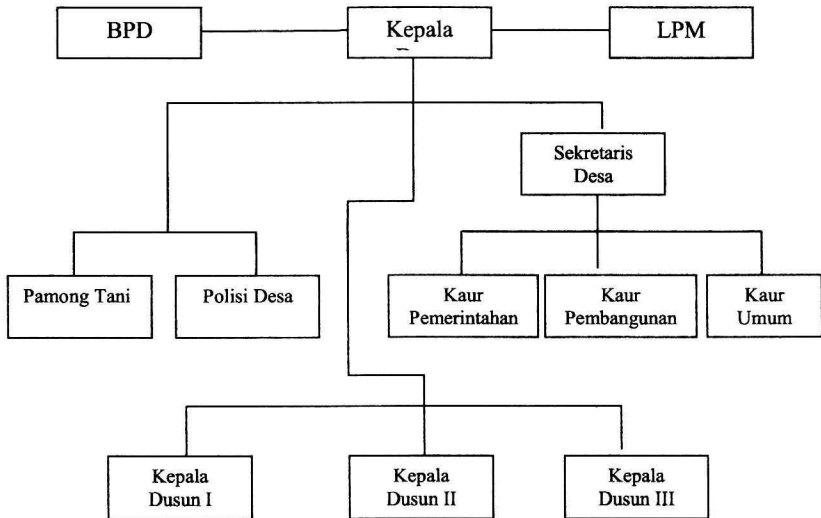
Jumlah penduduk yang dicatat oleh Lam dan jumlah penduduk pada tahun 2010 di atas tidak dapat diartikan bahwa tidak ada pertumbuhan penduduk, melainkan karena tingkat mobilitas yang tinggi. Data penduduk tahun 2008 mempertegas hal itu. Hanya dalam kurun waktu dua tahun, telah terjadi out-migrasi atau eksodus sebanyak 34 Kepala Keluarga muda, karena jumlah jiwa yang berangkat juga sebanyak 34 jiwa. Kalau pembaca menengok kembali catatan-catatan demografis Miangas, telah terjadi perpindahan penduduk secara besar-besaran pada tahun 1963 ke lokasi pemukiman Bengel di pulau Karakelang dan seratus

kepala keluarga pada tahun 1972 ke lokasi pemukiman Dodap di Bolaang-Mongondow (wilayah Bolaang-Mongondow Timur, sekarang). Belum dihitung dengan mobilitas penduduk individual baik untuk alasan bersekolah, mencari pekerjaan dan sebagainya. Dapat diduga bahwa dengan adanya pembangunan bandara sekarang, akan terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah yang signifikan, terutama warga yang sudah menerima ganti rugi lahan. Mereka akan bergabung dengan kerabat mereka yang kini sudah bermukim baik di kepulauan Talaud (Bengel dan Resduk) maupun di kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu di Dodap. Dalam hal angka perbandingan penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki.

Sebagai satuan administratif, pemukiman warga yang sejak dulu disebut kampung dan dipimpin oleh *kapitenlaut* atau sehari-harinya mereka sebut *apitalau*, berdasarkan keputusan pemerintah pusat (Surat Menteri Dalam Negeri No. 5/1/69 tertanggal 29 April 1969) dinamakan *desa* dan *kapitenlaut* menjadi kepala desa. Sejak pemberlakuan keputusan pemerintah pusat tersebut, belum ada struktur organisasi pemerintahan desa dan pelayahannya. Yang ada hanya kepala desa dilengkapi dengan seorang jurutulis. Nanti setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, struktur organisasi pemerintahan desa di tata seperti yang ada dalam bagan berikut:



Bagan 2.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Miangas

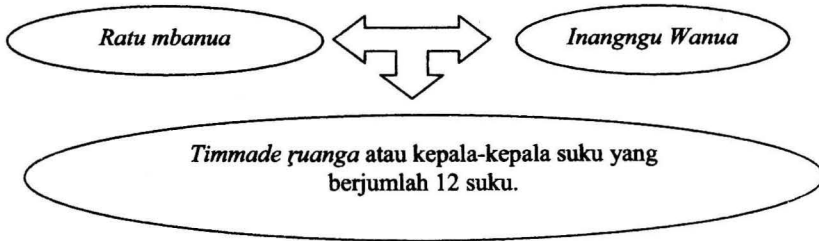


Sumber: Ktr. Desa Miangas, 2012

Selain struktur kepemimpinan formal dalam hal ini pemerintahan desa, terdapat struktur kepemimpinan tradisional yang diwarisi turun-temurun dan oleh warga disebut “kepemimpinan adat”. Di Pulau Miangas terdapat 12 (dua belas) kelompok “suku” atau dalam bahasa setempat disebut *ruanga*. Adapun kedua belas *ruanga* itu adalah: (1) *ruanga* atau suku Ratu Uli; (2) *ruanga* atau suku Lanta’a; (3) *ruanga* suku Tulungan-Lupa; (4) *ruanga* atau suku Tine; (5) *ruanga* atau suku Larengen; (6) *ruanga* atau suku Essing; (7) *ruanga* atau suku Siliratu; (8) *ruanga* atau suku Arunda’a; (9) *ruanga* atau suku Pape’a; (10) *ruanga* atau suku Bawala; (11) *ruanga* atau suku Langu; dan (12) *ruanga* atau suku Talu. Setiap kelompok suku dipimpin tetua yang disapa *timaddu ruanga* atau tetua suku. Adakalanya mereka gunakan sebutan para pemangku adat. Struktur kepemimpinan atau lebih tepat disebut pranata kepemimpinan tradisional ini akan dipaparkan dalam bab III

(butir 3.3 Sistem Kemasyarakatan). Di sini hanya akan ditampilkan bagannya.

**Bagan 2.2 Struktur kepemimpinan adat (kepemimpinan informal)**



*Diolah dari keterangan para narasumber. Nama-nama kelompok suku tersebut dipaparkan dalam bab III (3.3)*

Berbeda dengan struktur pemerintahan desa yang memiliki garis komando yang jelas, struktur kepemimpinan adat sifatnya kolektif-dialogis. Baik *ratumbanua* maupun *inangnguwania* merupakan *primus inter pares* di kalangan para kepala suku. Begitu pula dengan kepala suku merupakan *primus inter pares* di kalangan warga. Entah karena kebijakan pemerintah Keresidenan Manado dahulu yang menunjuk seorang *ratu mbanua* menjadi kapiten laut atau karena alasan lain, pemilihan kepala desa selalu mempertimbangkan status kekerabatan si calon kepala desa dengan kelompok suku atau *ruanga* yang anggotanya sering menjadi pemimpin di desa. Sehingga yang menonjol adalah famfam Namare, Pade, Tine, Lantaa yang asal kelompok sukunya dipandang sebagai kelompok suku para pemimpin di desa. Selain itu tentunya adalah latar pendidikan. Pada saat penelitian ini dilakukan, kepala desa Miangas adalah seorang anak muda tamatan SMK Negeri Miangas dan dari keluarga Pade, cucu dari kepala desa Miangas atau *kapitenlaut* Pade. Dari segi usianya masih terbilang muda. Tetapi dukungan keluarga dan warga anggota *ruanga* di mana ia tergabung sangat kuat.

Sudah dipaparkan di atas bahwa ketika kunjungan Residen Manado Jellesma, ke pulau Miangas, ia disertai seorang pendeta Kroll yang telah membaptis sebanyak 254 jiwa menjadi Kristen. Belum ditemukan sumber yang dapat menjelaskan apakah mereka merupakan orang kristen pertama di Miangas. Dari tuturan narasumber, dan beberapa catatan memberi keterangan bahwa sebelumnya telah ada misionaris yang berkunjung ke Miangas dan menyebarkan ajaran kristiani. Umumnya, penduduk Miangas menganut agama Kristen dan tersebar dalam dua denominasi. Mayoritas berstatus sebagai anggota jemaat Gereja Masehi Injili Talaud atau Germita dan sebagian kecil tergabung di Gereja Pantekosta di Indonesia. Kedua denominasi ini memiliki rumah ibadah sendiri-sendiri dan yang paling tua adalah rumah ibadah jemaat Germita. Di Miangas juga terdapat sebuah musholah dan pemeluk agama Islam di sini umumnya adalah para aparat pemerintah serta anggota militer yang bukan orang Miangas yang bertugas di sana.

Pranata keagamaan, dalam hal ini di kalangan pemeluk agama kristen, juga terdapat struktur organisasi gereja. Struktur ini sama di semua gereja di kepulauan Talaud yang tergabung dalam Sinode Germita. Warga gereja mengelompok dalam beberapa kelompok organisasi seperti Kaum Bapa/Pria, Kaum Ibu/Wanita, Pemuda/Remaja, dan anak-anak. Selain itu ada pewilayahan yang disebut 'kolom'. Pembagian kolom didasarkan pada wilayah tempat tinggal mereka.

Selain pranata pemerintahan, tradisi, dan agama, di pulau Miangas – pada aras kecamatan dan bukan desa – terdapat berbagai organisasi partai politik bersama pengurusnya. Keberadaan organisasi politik ini biasanya hanya tampak pada masa-masa menjelang Pilkada dan Pemilu. Pos atau kantor organisasinya pun berada di rumah pengurus, terutama rumah ketua atau sekretaris partai yang mengurusinya dan biasanya mereka sebut korcam singkatan dari koordinator kecamatan.

Paparan di atas selain hanya menyatakan bahwa Miangas adalah pulau terluar, pulau paling utara di wilayah propinsi Sulawesi Utara dan juga di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, namun belum menjelaskan bagaimana caranya dan seberapa jauhnya pulau itu. Pembaca hanya disuguhi dengan data koordinat pulau Miangas. Data tentang jarak antara Manado (ibukota propinsi) dengan Miangas maupun antara Melonguane (ibukota kabupaten) dengan Miangas agak beragam. Brilman mencatat jarak antara Manado – Lirung, 198 mil laut (satu mil = 1852 meter); dan Lirung – Miangas, 102 mil laut; Miangas – Karatung, 58 mil laut; Miangas – Beo, 94 mil laut (Brilman, 1938:245). Badan Pusat Statistik, mencantumkan jarak Melonguane – Miangas, 129 mil laut (BPS, 2011:7). Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud mencantumkan jarak Manado – Miangas, 274 mil laut; Lirung – Miangas, 105 mil laut; Karatung – Miangas, 80 mil laut; Beo – Miangas, 90 mil laut (Dep P&K Kabupaten Sangir-Talaud, 1979:18). Data dari Wanadri dan Rumah Nusantara ketika melakukan Ekspedisi Garis Depan Nusantara mencatat jarak Manado – Miangas, 310 mil, dan jarak Melonguane – Miangas, 75 mil (Kompas, 2011:238). Lepas dari perbedaan tersebut, jarak antara Miangas – Melonguane (75 mil); Miangas – Karatung (57 mil); atau Miangas – Marore (82 mil); masih lebih jauh dibandingkan dengan jarak antara Miangas – tanjung San Agustin (48 mil).

Jarak yang jauh dari ibukota negara dan propinsi maupun kabupaten, status pulau yang terpencil dan terpisah; keadaan cuaca yang tidak menentu inilah mungkin yang menjadi pertimbangan bagi para perencana pembangunan tentang perlunya sebuah lapangan terbang.

Di satu sisi Miangas semakin menarik perhatian pemerintah pusat dan propinsi. Di sisi lain, pemerintah kabupaten berupaya menggali kembali tradisi bahari yang diharapkan menjadi daya tarik wisatawan domestik, yaitu acara *manammi*. Setelah berhasil menjadikan praktek penangkapan ikan secara tradisional di lokasi

penangkapan setelah memberlakukan pantang-berkala (menangkap ikan) di lokasi tersebut selama setahun penuh, yaitu acara *mane'e* di pulau Kakorotan (Nanusa) menjadi agenda pariwisata, pemerintah kabupaten Kepulauan Talaud mulai menggiatkan kembali acara serupa yaitu *maniu'* di Karatung dan *manammi* di Miangas.

Tentang praktek *manammi* yang mau dipromosikan sebagai salah satu agenda pariwisata di Miangas, perlu kiranya sebelum meneruskan rencana promosi ini, belajar dari kasus *mane'e* di Kakorotan. Pristiwanto, peneliti di Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado, menghasilkan sebuah kajian menarik berjudul: Komodifikasi dan Pergeseran Makna Kearifan Lokal: Studi Kasus Upacara Tradisional *Mane'e* Pada Masyarakat Di Perbatasan Indonesia-Philipina.<sup>10</sup> Pelajaran yang dapat dipetik dari kajian tersebut adalah:

1. Dalam tradisi *Mane'e* tercermin sejumlah nilai-nilai budaya, religius dan sosial yang dihayati masyarakat daerah perbatasan di pulau Kakorotan.
2. Tradisi ini dapat pula dikategorikan sebagai kearifan lokal dalam hal memanfaatkan sumber laut secara bergiliran dari satu tempat atau lokasi ke lokasi yang lain.
3. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka diberlakukan pantang-berkala atau *eha* di lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan *mane'e*.
4. Pelaksanaan *mane'e* sebagai sebuah tradisi yang mencerminkan kebersamaan warga, oleh pemerintah daerah (Sangihe dan Talaud, waktu itu) dijadikan sebagai agenda wisata.
5. Masyarakat setempat sebagai pendukung tradisi ini menyambut baik keputusan pemerintah dan melihatnya

---

<sup>10</sup> Tesis yang dipertahankannya di Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya (2011)

sebagai kesempatan pengaktualisasian diri serta pencarian identitas budaya.

6. Dalam pelaksanaannya selama menjadi agenda wisata, muncullah kesadaran warga bahwa upaya masyarakat yang selama setahun penuh berpantang ternyata tidak menikmati hasilnya karena sebagian besar hasil tangkapan disiapkan bagi para wisatawan. Sementara pihak wisatawan datang tanpa susah payah serta memberi imbalan bagi pengorbanan warga berpantang selama setahun menikmati sajian ikan bakar. Bahkan juga pulang dengan bawaan.

Bukan tidak mungkin pelajaran yang terjadi di pulau Kako-rotan seperti yang dikaji oleh Pristiwanto di atas, akan terjadi di Miangas kalau praktek *manammi* sebagai agenda wisata dan bukan sekedar tradisi penangkapan ikan. Proses pergeseran makna tradisi *mane'e* telah berlangsung tanpa kendali. Telah terjadi riak-riak protes dalam pelaksanaan *mane'e* di tahun-tahun terakhir ini.

Persoalannya adalah bagaimana jika praktek-praktek pantang-berkala (*eha*) sebagai bagian dari kearifan lokal dan proses pengaktualisasian jatidiri lewat tradisi *mane'e* semakin menegaskan dikhotomi antara warga yang berpantang kemudian bersyukur tanpa menikmati hasil; sementara tamu yang datang – tanpa pengorbanan dan berpantang – dengan mudah menikmati hasilnya. Bagaimana jadinya kalau proses komodifikasi berlangsung di tengah warga yang jelas-jelas berada pada kondisi labil karena statusnya sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti hasil amatan pihak Departemen Sosial R.I.

Miangas kini, ibarat primadona pulau-pulau terluar. Menurut kajian Ulaen, Wulandari dan Tangkilisan (2012:3), Miangas adalah pulau yang paling banyak diberitakan. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun Miangas terbaca dalam kurang lebih 100 buah artikel, reportase dan surat pembaca dari dua media cetak yaitu Kompas dan Tempo plus sebuah artikel dari Gatra. Jumlah ini

tidak mencakup puluhan dan bahkan ratusan tulisan di media cetak yang terbit di daerah Sulawesi Utara. Pulau terluar yang berdekatan, yaitu pulau Marampit dan pulau Marore tidak mendapat perhatian serta dipublikasi se intensif publikasi tentang Miangas. Pulau ini juga tercatat dalam buku rekor Museum Rekor Indonesia, karena peristiwa pembentangan bendera merah putih terpanjang, yaitu 7.000 meter mengelilingi pulau kecil ini pada tahun 2010. Setahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2009, universitas terkemuka di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia menempatkan 70 orang mahasiswa melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. Peristiwa seperti ini barangkali perlu pula dicatat dalam buku rekor Muri, mengingat tradisi pelaksanaan KKN di berbagai universitas biasanya hanya menempatkan seorang mahasiswa di setiap desa. Kalau tokh lebih dari seorang, maka penempatan itu sifatnya adalah "satuan tugas" atau satgas.

Dalam hal mendapatkan kunjungan para pejabat, politisi, aktivis, pemerhati dan sebagainya, Miangas memegang rekor dibandingkan dengan pulau-pulau terluar lainnya. Persoalannya adalah bagaimana suasana batiniah warga Miangas setelah menerima kunjungan-kunjungan ini. Apakah betul, kunjungan sekelompok aktivis dan seniman Uly Sigar yang mengibarkan bendera merah putih raksasa pada tanggal 17 Agustus 2006 membuat warga merasa semakin nasionalis, seperti keinginan Uly dan teman-temannya yang terbaca dalam wawancaranya bahwa tujuan mereka adalah menggugah rasa nasionalisme warga? Jang-jangan justeru yang mencuat adalah kekesalan seperti yang di-suarakan oleh salah seorang warga dan menjadi isi reportase wartawan Kompas, Jean Rizal Layuck & Edna Pattisina (15 Agustus 2009) dan dikutip oleh Ulaen, Wulandari dan Tangkilsan (2012:190): "... kami, masyarakat Miangas, mau percaya sama siapa lagi kalau terus dibohongi pemerintah". Para penulis yang disebut terakhir ini melakukan penelusuran dan menemukan bahwa sesungguhnya bukanlah oknum pejabat pemerintah yang

mengumbar janji kepada warga Miangas, tetapi oknum politisi. Bagi warga yang lugu, terlampau sulit membedakan mana pejabat pemerintah mana politisi, mana aktivis, mana wisatawan, mana peneliti selama para pengunjung begitu mudah mengucapkan janji-janji dan berlaku seperti “penguasa” yang dijemput ketika turun dari kapal, mendapat kesempatan berpidato di depan warga, dijamu dengan keramah-tamahan padahal jamuan yang diberikan adalah hak anak yang sejak pagi belum mendapat sarapan dan makan siang, dan sebagainya.

Belum lama ini, warga Miangas juga sempat menjadi bahan pembicaraan, ketika mereka mendapat hibah beberapa buah pambut dari warga keturunan Miangas yang sudah menjadi pengusaha perikanan yang sukses di Mindanao. Muncul silang pendapat di kalangan para petinggi. Ada pendapat yang mengharamkan hibah itu dan bahkan Kepala Kecamatannya pun disoroti seakan menjual negara ke negara tetangga. Padahal, menurut keterangan yang diperoleh, bantuan itu melambangkan sebuah ketulusan dan ingin mengajak warga bekerjasama “*mammancari*” di wilayah lautan yang kini lagi menjadi topik pembahasan perwakilan dari kedua negara (Indonesia dan Filipina) untuk menentukan tapal batasnya. Pertemuan yang sudah makan waktu puluhan tahun dan menyeret puluhan *fuso* dan *pambut* menjadi barang sitaan karena melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan yang sudah diklaim sebagai wilayah negara namun belum diakui oleh pemerintah negara tetangga.

Kasus tersebut mengundang munculnya pertanyaan: untuk apa pemerintah empat negara (Brunai-Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philippina) menandatangani kesepakatan yang dinamai BIMP-EAGA. Apakah kesepakatan itu juga memberi ruang kepada warga perbatasan turut aktif di dalamnya?





### **BAB III**

## **WAJAH BUDAYA DALAM UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN MASYARAKAT PULAU MIANGAS**

Pemaparan unsur-unsur kebudayaan di sini diperlukan untuk memahami ekspresi budaya sebuah kelompok komunitas yang tercermin didalam setiap unsur kebudayaan yang ada. Caranya adalah dengan memaparkan unsur-unsur kebudayaan baik yang tampak – apabila itu berupa unsur yang teraba dan tampak seperti halnya sistem peralatan dan perlengkapan hidup – maupun unsur-unsur kebudayaan yang belum lekang dari ingatan warga meskipun tidak lagi dilakoni dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian akan terpapar sebuah proses peralihan setiap unsur kebudayaan, dan hal itu dapat membantu memperjelas pemahaman tentang perjalanan-budaya yang didukung oleh kelompok komunitas Miangas.

Cara pemaparan tulisan dalam bab ini mengacu pada model-model karya etnografis baik yang dipublikasi di Indonesia seperti “Manusia dan Kebudayaan” di Indonesia yang disunting oleh Koentjaraningrat maupun beberapa tulisan dari luar Indonesia tetapi tentang Indonesia, yang mengurut satu per satu mulai dari (1) sistem peralatan dan perlengkapan hidup; (2) sistem mata

pencaharian hidup; (3) sistem kemasyarakatan atau kekerabatan; (4) bahasa dan sastra; (5) kesenian; (6) sistem ilmu pengetahuan, dan (7) sistem religi atau kepercayaan.

### 3.1 Sistem Peralatan dan Perlengkapan Hidup

Generasi yang kini berusia 50 – 60 tahun di Miangas – merupakan generasi akhir dari pendukung ‘tradisi bahari’ dalam artian yang luas. Mereka adalah pelaut-pelaut handal dan biasa mendayung perahu layarnya ketika tidak ada hembusan angin sampai mencapai pulau-pulau terdekat seperti pulau-pulau Nanusa dan pulau Karakelang, atau juga menyeberang ke utara ke tanjung San Agustin di Mindanao. Pengetahuan navigasi, perbintangan, tempat-tempat di mana terjadi pusaran arus yang membahayakan pelajaran dan tidak terkecuali mantra-mantra yang berhubungan dengan aktivitas pelayaran mereka kuasai dengan baik. Mantra-mantra tersebut misalnya mantra untuk membuyarkan pembentukan awan-angin dan hujan di arah haluan perahu atau yang mereka sebut *a’ambon*, mantra penjinak jin laut yang menyebabkan pusaran arus menguat yang mereka sebut *pallome saga*, dan sebagainya. Bahkan sampai dalam hal pertukangan dan pembuatan perahu. Ulaen (2003) mengutip kesaksian Thomas Forest menyatakan bahwa orang-orang Nanusa dan Miangas terkenal sebagai pembuat perahu. Kesaksian ini berdasarkan pengalamannya ketika dalam pelayaran niaganya dari Maluku ke Mindanao, Forest harus mereparasi bagian dari kapal layarnya.

Ketrampilan serta keahlian yang disebut di atas, kini sayangnya, hanya tinggal kenangan. Yang tersisa hanyalah otot-otot tangan – bicep dan tricep – serta bahu yang kekar yang terbentuk dari kebiasaan mendayung berjam-jam bahkan berhari-hari yang mereka lakoni selama bertahun-tahun. Kenyataan tersebut juga telah menandai berakhir dan hilangnya seperangkat peralatan

perlengkapan hidup yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah dan alat transportasi tetapi dengan alat mana warga Miangas telah dan pernah mengaktualisasikan dirinya sebagai “bangsa pelaut”. Peralatan dan perlengkapan hidup dimaksud adalah perahu layar atau yang mereka sebut *sa’alan*<sup>11</sup> atau *parake*<sup>12</sup>.

Bermula dari adanya kemudahan yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya pelayaran perintis pada paroh kedua abad ke- 20, maka perahu-perahu layar dengan rancang-bangun sekoci atau dalam bahasa setempat disebut *sa’alan* atau juga *parakeyang* terjejer di pantai pelabuhan (tua) Miangas tidak lagi tampak. Begitu pula dengan bentangan layar atau *senggo’* yang biasanya di simpan di samping rumah, kumpulan-kumpulan dayung-bulat bergagang panjang atau *balan* yang disimpan oleh hampir semua lelaki pelaut. Semuanya tinggal kenangan. Pada masa mudanya – demikian tutur pak Pape’a (72) – setiap *ruanga* atau kelompok suku, masing-masing memiliki sebuah perahu layar atau sekoci dengan panjang lunas bervariasi antara 7 – 10 meter yang berarti terdapat 12 (dua belas) perahu layar milik keluarga. Belum terhitung perahu milik perorangan. Orang tua kami dahulu membuat perahu di pulau Garat atau di pulau Karakelang dan di pesisir selatan Tanjung San Agustin Mindanao. Ada juga yang membuatnya di Miangas, tapi mereka harus menunggu bertahun-tahun sampai kayu yang ditanam sudah dapat digunakan baik sebagai lunas, gading, dan papan perahu. Lenyapnya tradisi bahari terutama pembuatan perahu, tidak hanya di pulau Miangas dan Nanusa, tetapi di seluruh kepulauan Talaud<sup>13</sup>. Ikutan dari hilangnya peralatan dan perlengkapan hidup yang disebut *sa’alan* atau juga *parake* ini diikuti dengan tidak terwariskannya sebuah ketrampilan membuat perahu, kepiawaian melayarkan

11 Kata *Sa’alan* digunakan sebagai sebutan umum untuk berbagai jenis perahu.

12 Kata *Parake* digunakan sebagai sebutan untuk tipe perahu layar

13 Lihat, antara lain: Laporan Veriyanto Madjowa: “Sabuk terluar Bernama Miangas” dalam Tempo, 22-08-2004.

perahu, tidak dipraktikkannya lagi sistem pengetahuan navigasi tradisional mulai dari ilmu perbintangan, pembagian musim yang didasarkan pada posisi bulan di langit, kemampuan membaca pembentukan awan-hujan dan awan-angin, pengetahuan tentang pergerakan arus laut, dan penguasaan mantra serta *sasambo* atau puisi-lirik yang dinyanyikan kala mendayung perahu. Sisa-sisa pengetahuan tradisional mana seperti pengetahuan tentang perbintangan dan pembagian musim berdasarkan posisi bulan di langit sebagian masih dijadikan pedoman dalam hal pertanian. Begitu pula dengan *sasambo*, sebagian kecil masih dilagukan dikala *maccampe* atau *masamper*.

Alasan yang dituturkan oleh beberapa narasumber kami adalah sulitnya mendapatkan bahan baku kayu, seandainya masih ada yang berminat untuk membuat perahu. Kesulitan ini bukan hal yang baru dirasakan sekarang atau pada paroh kedua abad ke-20. Pada awal abad ke-20 pun hal itu sudah terasa, sebagaimana yang disaksikan oleh Lam (1932:47). Menurutnya, bahwa kurangnya kayu di Miangas membuat banyak rumah, termasuk di antaranya bangunan sekolah dan gereja, menggunakan bahan baku batang kelapa. Untuk memenuhi kebutuhan kayu bahan baku rumah, maka warga menanam kayu nato (*palaquium oblusifolium*, Burck). Menurut keterangan narasumber kami (Pape'a, 72), kayu nato sudah dapat dipanen antara 7 – 10 tahun. Adapun bahan baku untuk perahu biasanya adalah pohon ketapang (*Terminalia Catapa*) dan pohon nyamplung (*Calophyllum inophyllum*) atau warga setempat menyebutnya *dingkañan* serta beberapa jenis lainnya dari kelompok famili *bruquiera* dengan usia panen juga sama yakni berkisar antara 7 – 10 tahun. Karena kesulitan bahan baku kayu, maka warga tidak lagi mengusahakannya.

Jika dalam ingatan generasi 50 – 60 tahun, pantai di pelabuhan penuh sesak dengan rumah (sabua) tempat perahu-perahu sekoci didaratkan maka hal itu sudah berbeda dengan saat ini. Perahu dengan prototipe sekoci yang dikisahkan oleh narasumber kami

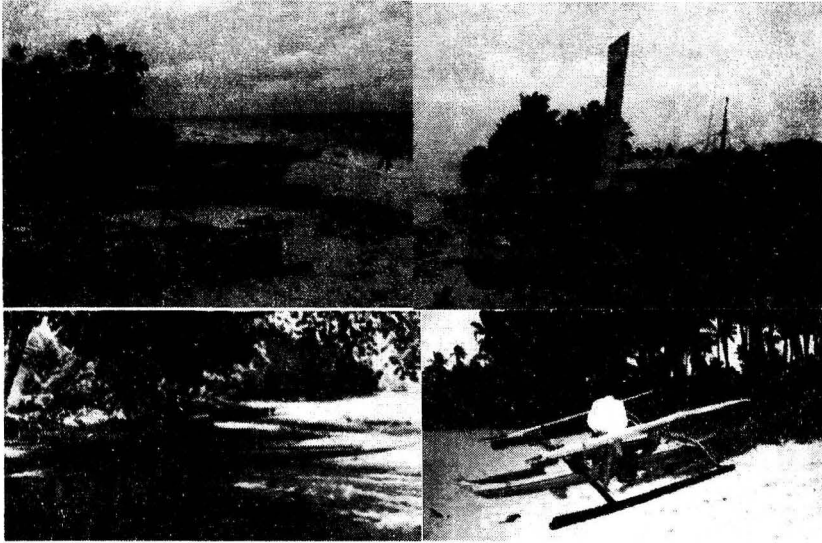
tinggal diwakili oleh sebuah perahu tipe pajeko bantuan pemerintah yang sudah tidak terawat. Tipenya mirip sama. Bedanya, pajeko tidak memiliki tiang untuk layar dan sepanjang sisi bagian atas perahu tidak memiliki landasan untuk dayung karena sudah digerakkan oleh mesin tempel atau *outboard*. Begitu pula dengan rancang-bangunnya. Menurut penjelasan narasumber kami, ia memperbandingkan rancang-bangun pajeko dengan *parake* dalam hal ukuran dan bentuk badannya. Menurut mereka, rancang-bangun *parake* lebih tinggi dari pajeko jika lunas keduanya sama panjang. Selanjutnya, bentuk badannya *pajeko* agak lebar sedangkan *parake* dirancang agar tidak mudah terbalik walaupun memiliki layar dan tiang yang tinggi.

Di sepanjang pesisir pantai baik di pelabuhan lama yang berada di sisi barat pulau Miangas maupun di pelabuhan baru, di sekitar dermaga kapal penuh sesak dengan puluhan bahkan ratusan sampan bercadik ukuran kecil maupun sedang dan besar. Ada tipe sampan tradisional yang mereka sebut *londe*. Jenis ini pada bagian haluan memiliki ujung sepanjang setengah hingga satu meter yang disebut *tatoda* atau tanduk panjang dan melengkung yang berfungsi sebagai hiasannya. Pada bagian buritan ujung serupa sebatas sepuluh sampai lima belas centimeter. Tipe ini digerakkan dengan dayung dan layar. Ada yang berukuran muatan seorang dewasa dan paling besar untuk dua orang dewasa. Ada dua tipe *londe*. Tipe pertama yang memiliki *tatoda* dan tipe kedua tidak memiliki *tatoda* pada haluan maupun buritannya disebut *pelon*. Tipe *pelon*, yang berukuran kecil untuk satu orang hanya digerakkan oleh dayung dan layar. *Pelon* atau sampan bercadik yang berukuran lebih besar dapat menampung tiga sampai lima orang dewasa selain digerakkan oleh dayung, sebagian besar sudah menggunakan mesin tempel. Hal ini terindikasi pada rancang bangun sampan yang pada buritannya memiliki tempat untuk mesin tempel. Sampan-sampan yang disebut *londe* dan *pelon* terbuat dari batang kayu yang diameternya sekitar 75 sentimeter

hingga 100 centimeter dengan panjang 4 – 5 meter. Batang kayu itu dilubangi pada bagian tengahnya dan dibentuk sesuai model yang dikehendaki. Jenis ini biasanya dipakai untuk melaut jarak dekat pantai. Ada juga sampan jenis ini menggunakan mesin katinting yang diperoleh dari proyek-proyek bantuan pemerintah.

Selain *londe* dan *pelon*, ada tipe sampan bercadik yang dilengkapi dengan mesin pompa dengan gaya dan rancang-bangunnya dari Mindanao disebut *pambut* yang berasal dari kata (Inggris) *pump boat*. Berbeda dengan pembuatan *londe* dan *pelon* yang memerlukan batang kayu berdiameter hingga satu meter, bahan baku yang diperlukan adalah sebuah balok setebal 10 atau 15 sentimeter dan panjangnya antara 5 – 7 meter atau sesuai ukuran *pambut* yang diinginkan. Lunas tadi dirangkaikan dengan balok-balok kayu setebal 2 – 3 sentimeter menjadi rangkanya, kemudian diberi dinding papan dari kayu lapis atau *multipleks* berkualitas nomor satu dan tahan air. Untuk merekatkan dindingnya selain menggunakan paku juga menggunakan perekat lem kayu. Cadiknya menggunakan bambu jenis khusus berdiameter 5 – 10 sentimeter. Ada juga yang sudah menggunakan paralon berukuran besar yang biasanya dipakai sebagai saluran air sebagai cadik.

**Gambar 3.1 Sampan dan Pambut yang terparkir di pelabuhan Miangas**



Keterangan gambar: kiri atas, sampan paling depan jenis pelon menggunakan mesin tempel  
Kanan atas, tipe pambut, kiri bawah, tipe pelon yang tidak memiliki ujung atau tatoda dan kanan bawah, tipe londe yang memiliki ujung atau tatoda pada bagian haluan.

Kepemilikan sampan bercadik tradisional atau *londe* dan *pelon* maupun *pambut* dapat dikenali di setiap rumah pemiliknya karena biasanya mereka menempatkan kelengkapan tersebut di samping rumah. Kelengkapan sampan *pambut* dikenali galon plastik wadah BBM yang berserakan di samping rumah, bersama jangkar kecil dan berbagai tali-temali untuk jangkar. Sedangkan kelengkapan sampan bercadik tradisional *londe* dan *pelon* terdiri atas adanya dayung, layar yang terbuat dari kain-kain bekas seperti kain bekas iklan partai serta baliho. Ada yang menggunakan lembar karung plastik sebagai layar. Ada juga yang menjahit layar sampannya dari bahan kain bekas karung terigu.



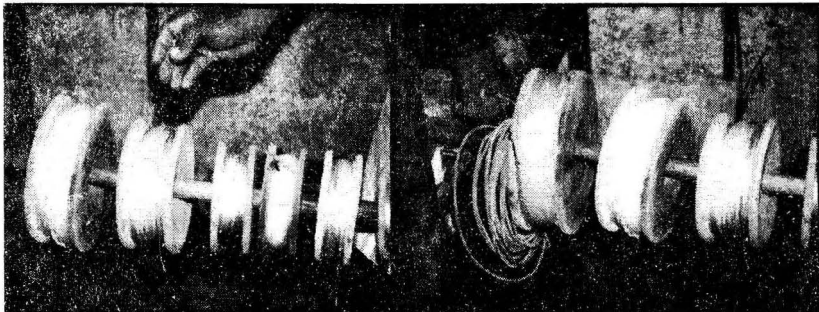
Aktivitas melaut sebagai nelayan mengharuskan mereka memiliki perlengkapan berupa alat tangkap atau *aḷaḷa'*, sebutan untuk semua alat pancing. Alat tangkap yang mereka gunakan adalah alat tangkap modern yang digunakan di kalangan nelayan manapun baik di seluruh kepulauan Talaud bahkan Sulawesi Utara. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa justeru mereka memiliki alat tangkap yang berkualitas seperti tali nilon atau *snaar*, mata kail, cincin atau *ring* yang sebagian besar mereka beli di daratan Mindanao. Kalau tokh peralatan tersebut di beli di kota Melonguane atau Tahuna dan Manado, mereka mendatangi toko-toko alat tangkap yang mendatangkan bahan-bahan buatan Jepang dan Filipina.

Alat tangkap paling sederhana dan umum dijumpai adalah pancing joran. Alat pancing ini menggunakan tangkai bambu atau kayu berdiameter 2 – 3 sentimeter, diberi tali senar atau nilon sepanjang 5 meter dan pada ujungnya diberi mata kail, disebut *bawarun*. Warga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa menggunakan pancing bertangkai atau *bawarun* ini di sepanjang pantai dan karang. Alat pancing lainnya terdiri dari tali senar atau nilon panjangnya puluhan hingga ratusan meter atau nelayan setempat menggunakan ukuran depa, setiap 10 depa mereka katakan *santanni*, dua puluh depa disebutnya *duantanni*, tiga puluh depa disebut *talluntanni* dan seterusnya. Baik ukuran senar dan ukuran mata kail tergantung pada peruntukkan kail sebagai alat penangkap jenis ikan mana.

Seperangkat pancing alat penangkap ikan jenis pelagis biasanya memiliki puluhan mata kail dan pada ujungnya diberi pemberat dari besi maupun timah. Pada mata kail diberi umpan artifisial mulai dari serat tumbuhan sejenis keladi, serat daun nenas, benang-benang yang berwarna menarik dan umpan yang sudah tersedia dan dijual di toko perlengkapan nelayan. Ukuran mata kail dan senar tergantung pada besarnya jenis ikan yang akan ditangkap atau dipancing. Sedangkan pancing untuk jenis

ikan demersal biasanya hanya terdiri dari tiga sampai lima mata kail. Umpan yang digunakan adalah sayatan daging ikan, dan daging kerang. Pancing untuk menangkap ikan yang berukuran besar seperti tenggiri, kakap, hiu, biasanya menggunakan umpan hidup seperti ikan-ikan jenis pelagis.

**Gambar 3.2** Seperangkat alat pancing miliki nelayan tertata pada setiap kumaran



Tali atau senar nilon dikemas tergulung pada kumaran kayu (lihat gambar 3.2) agar tidak kusut. Dari hasil amatan, peralatan pancing yang mereka miliki tidak berbeda dengan yang digunakan oleh nelayan di kepulauan Talaud, nelayan kepulauan Sangihe dan bahkan perlengkapan nelayan yang tinggal di pesisir pantai Manado. Ini disebabkan sumber alat-tangkap tadi bukan dirancang sendiri tetapi dibeli di toko-toko peralatan nelayan baik di kota-kota yang ada di wilayah Sulawesi Utara maupun di daratan Mindanao.

Alat tangkap lainnya yang dimiliki oleh beberapa nelayan adalah jaring yang mereka sebut *landa*, digunakan untuk menjaring ikan terbang (*exocotidae*), atau dalam bahasa setempat mereka sebut *maʔaluʔ*. Anak-anak menyebutnya, ikan Indo Siar, karena jenis ikan ini menjadi logo acara TV Indo Siar. Jaring ini lebarnya hanya satu meter, tetapi panjangnya antara seratus hingga dua ratus meter. Pada satu sisi diberi pelampung kayu, dan pada sisi

lainnya diberi pemberat dari timah. Selain jaring jenis *landa*, ada juga jaring khusus jenis pelagis.

Perlengkapan rumah tangga pada umumnya diperoleh dari toko-toko. Barang-barang seperti belanga, piring dan gelas pecah-belah maupun plastik, dapat ditemukan di setiap dapur. Pada paroh pertama abad ke dua-puluh, orang tua kami menggunakan "*urii leta*" ungkap bapak Pape'a (72). "*urii leta*" yang dimaksud narasumber kami adalah belanga yang terbuat dari tanah liat atau biasa disebut tembikar. Untuk mendapat barang-barang tembikar seperti belanga maupun wadah penampungan air, orang tua kami melakukan barter tikar pandan, ikan asin, ikan kayu dengan warga di pulau Karakelang. Warga di pulau Karakelang (Talaud) adalah pengrajin-pengrajin tembikar. Belanga tembikar biasanya lebih murah dibandingkan dengan belanga besi dan aluminium. Namun, harus diperlakukan dengan hati-hati karena mudah pecah. Pasangan dari "*urii leta*", wadah untuk makanan masak yang umum digunakan adalah batok kelapa. Kami menyebutnya '*pala*', kenang bapak Kase' (67). Ada dua teknik pembuatan alat makan dari batok kelapa. Kalau batok kelapa dibuat agak ceper, atau sewaktu membelah kelapa tidak dibelah sama tetapi dibagi tiga, maka belahan sepertiga inilah yang dipakai sebagai wadah disebut '*pala*', dan berfungsi sebagai piring. Kalau yang mau dipakai dua per tiga dari belahan kelapa, biasa dipakai sebagai wadah untuk air minum atau lauk yang berkuah, disebut '*uwan*'. Batok kelapa juga digunakan sebagai alat penyendok makanan dari belanga. Sayangnya, peralatan makan yang terbuat dari batok kelapa ini sudah ditinggalkan dan warga sekarang lebih menyenangi wadah dan peralatan makan yang terbuat dari bahan plastik dan melamine. Sebelum merembahnya penggunaan peralatan makan dari plastik dan melamine, warga menggunakan peralatan makan pecah-belah atau porselen dengan pasangannya sendok-garpu alpaka dan gelas atau mangkuk pecah-belah, jika pada acara-acara khusus sedangkan untuk wadah yang digunakan sehari-hari

mereka menggunakan peralatan makan seperti piring, mangkuk yang terbuat dari kaleng. Kedua jenis peralatan makan ini masih terlihat dalam hasil observasi lapangan.

Perlengkapan yang diproduksi sendiri dan menggunakan bahan lokal tinggal sebatas keranjang dalam berbagai ukuran baik yang digunakan sebagai wadah untuk hasil bumi dari kebun maupun keranjang ikan. Keranjang-keranjang seperti ini ada yang menggunakan bahan baku rotan dan rotan tikus. Bahan baku rotan harus dibeli di pulau Karakelang, sedangkan bahan baku berupa rotan tikus maupun sejenis rotan yang mereka sebut *ua'* bertumbuh di hutan pulau Miangas.

Alat rumah tangga yang digunakan untuk berkebun dan mengolah buah kelapa yang digunakan pertama-tama adalah 'peda' (parang). Ada beberapa jenis parang yang dirancang sesuai fungsinya. Sebagai alat pemotong kayu, bentuk serta ukurannya lebih besar dari parang yang digunakan untuk menyiang tetanaman. Begitu pula dengan parang yang digunakan untuk memanjat kelapa, memiliki sisi tajam pada bagian ujung seperti halnya dengan parang yang digunakan untuk menyiang tetanaman. Bedanya hanya pada ukurannya. Ada juga bentuk parang yang khusus digunakan oleh para tukang dan biasa mereka sebut *peda tada* digunakan untuk menadah papan. Bentuknya agak bengkok.

Telah disebut di atas tentang bentuk parang yang berbeda-beda. Lebih kecil dari parang adalah pisau yang biasanya digunakan untuk keperluan masak-memasak. Ada satu jenis pisau yang digunakan ketika melaut yaitu *sondan*. Bentuknya sama dengan pisau lainnya. Perbedaannya pada hulu atau gagang. Gagangnya lebih besar dan terbuat dari kayu ringan. Alasannya, kalau jatuh ke laut maka mudah ditemukan karena tetap mengapung. Ini berbeda dengan pisau dapur yang menggunakan gagang dari kayu keras agar lama dipakai. Selain *sondan*, nelayan melengkapi peralatannya dengan tombak. Ada beberapa jenis tombak. Bermata

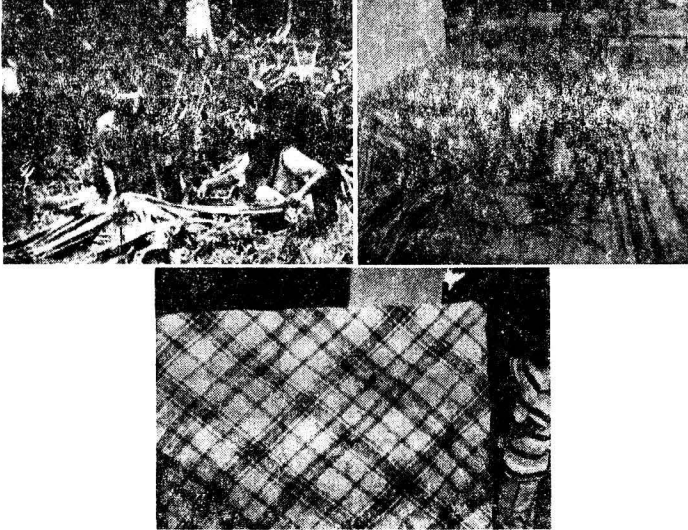
satu, bermata dua, dan bermata tiga. Gagang yang biasa digunakan adalah bambu agar kalau jatuh ke laut tetap mengapung.

Peralatan serta perlengkapan lain yang diproduksi lokal adalah anyam-anyaman yang menggunakan bahan baku daun pandan. Dalam hal menghasilkan tikar pandan atau *bewila'*, ibu-ibu Miangas dan Nanusa umumnya adalah penganyam-penganyaman yang trampil. Cara kerja mereka untuk menghasilkan tikar pandan, dimulai dengan proses memangkaskan pohon pandan yang mereka tanam sendiri. Setelah daun pandan diambil dari pohonnya, tulang daun dan kedua sisinya dibuang dan daun yang tersisa diiris memanjang mengikuti urat daun dengan ukuran sekitar setengah sentimeter atau tergantung pada jenis anyaman yang mau dihasilkan. Daun yang sudah diiris kemudian dijemur beberapa hari di panas matahari hingga kering. Sebagian dari daun itu disisihkan, dipilah-pilah mana yang mau diwarnai dan mana yang tidak. Untuk mewarnainya, warga menggunakan kesumba berwarna merah, biru, kuning, hijau, dan warna lainnya, kecuali hitam. Daun yang mau diwarnai dicelup dalam rebusan air kesumba beberapa waktu, kemudian diangin-anginkan. Setelah kering barulah dianyam.

Tikar-pandan sejak jaman dulu menjadi alat tukar yang digunakan warga maupun dibutuhkan baik oleh penduduk Talaud terutama di pulau Karakelang sebagai pengalas tempat tidur dan untuk mendapatkannya mereka melakukan pertukaran barang atau barter. Biasanya tembakau, padi, babi, jagung, kacang-kacangan yang menjadi alat tukar untuk mendapatkan tikar pandan. Hingga akhir tahun 1990-an, warga Miangas juga menjadikan tikar pandan sebagai alat tukar untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari mereka dengan penduduk di pesisir selatan Mindanao, terutama di sekitar tanjung San Agustin. Hasil kerajinan tikar pandan kini sudah kurang diminati baik oleh penduduk kepulauan Sangihe dan Talaud maupun penduduk di sepanjang pesisir pantai tanjung San Agustin di Mindanao. Warga di sana sudah mulai beralih

menggunakan tikar buatan pabrik yang berbahan baku plastik. Alasannya, tikar pandan kalau kena air atau dicuci, warnanya jadi pirang dan perlu waktu untuk mengeringkan, sedangkan tikar berbahan plastik sesudah dicuci tidak memerlukan waktu lama langsung dapat dipakai.

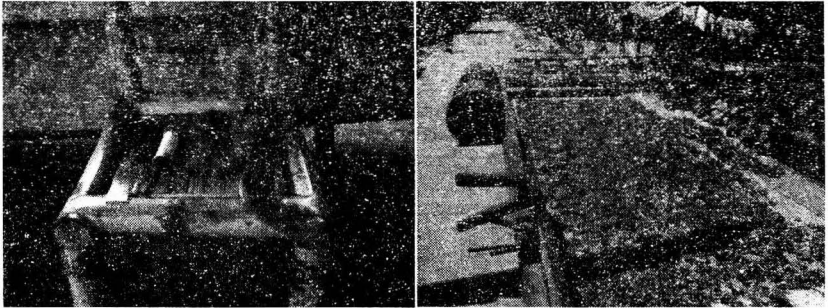
Gambar 3.3 Meramu daun pandan, menganyam tikar, dan hasil anyaman



Amatan atas ruang tamu dari beberapa rumah warga yang terbilang mampu melengkapi peralatan rumahnya, ditemukan kursi dan meja tamu baik yang terbuat dari kayu, bambu batik, maupun kursi dan meja plastik berbagai merek. Ada yang menggunakan kursi tamu buatan pabrik bermerek Ligna. Tidak sedikit yang menggunakan kursi meja untuk tamu hasil kerajinan tukang-tukang setempat. Tempat duduk yang umum dijumpai dan dimiliki oleh hampir semua keluarga adalah bangku. Panjang bangku berkisar antara satu meter hingga dua meter. Terbuat dari sebilah papan selebar 30 hingga 50 sentimeter dengan ketebalan ±

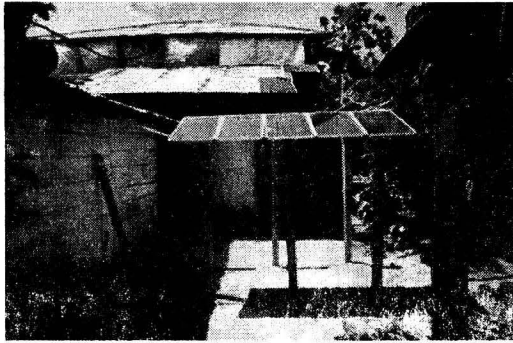
5 sentimeter. Bahan baku kayu bermacam-macam. Ada yang menggunakan kayu kualitas terbaik seperti kayu besi, ada juga yang menggunakan batang kayu nato (*palaquium oblusifolium*, Burck) yang banyak ditanam oleh warga di Miangas. Bangku tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk diduduki, tetapi juga menjadi tempat tidur, terutama bangku yang papannya agak lebar serta panjang. Selain itu juga digunakan sebagai penyangga maupun pembatas barang jemuran seperti yang tampak dalam gambar 3.4 berikut:

Gambar 3.4 Kursi bambu dan , bangku dan fungsi gandanya sebagai pembatas kepra yang dijemur



Seperti telah disinggung dalam bab II di atas bahwa di pulau Miangas sudah tersedia fasilitas penerangan baik yang dioperasikan oleh Perusahaan Listrik Negara menggunakan mesin tenaga diesel dan beberapa rumah dinas, kantor, dan rumah warga menggunakan panel tenaga surya. Cara penempatan panel tenaga surya pun banyak yang tidak mengikuti anjuran dalam hal pemasangannya seperti yang tampak dalam gambar berikut:

Gambar 3.5 Panel Surya dan cara penempatannya



Baik dari hasil telusuran dokumen maupun wawancara dengan para narasumber, tidak ditemukan keterangan tentang jenis-jenis busana yang diproduksi sendiri seperti halnya yang ditemukan di beberapa tempat di pulau Karakelang (Talaud) yang menenun kain kofu dari serat pisang abaka atau mereka sebut *rote*. Satu-satunya petunjuk tentang hal ini dapat dibaca dalam Lam yang mendeskripsikannya sebagai berikut:

*'... Like those of other Talaud Islands their old national dress of koffo clothes has been substituted by a quasi European dress. Ornaments are made from shells (btacelets) and from brass or gold, imported from Mindanao' (1932:48-49)*

*'...Sama halnya dengan penduduk Talaud lainnya pakaian tradisional mereka yang terbuat dari koffo telah digantikan dengan pakaian cara Eropa. Perhiasan-perhiasannya terbuat dari kerang (gelang), emas atau kuningan yang didatangkan dari Mindanao'.*

Sepertinya, kontak niaga semasa jayanya perniagaan kesultanan Sulu sejak abad ke- 14, telah mengenalkan busana tekstil, berlanjut dengan kontak mereka ke warga Mindanao yang ketika itu menjadi wilayah jajahan Spanyol kemudian Amerika Serikat, dan berada di pusat-pusat perniagaan. Kebutuhan akan pakaian atau busana juga terpenuhi ketika warga Miangas masih memilih Mindanao sebagai tempat untuk *mancari*, dan bukan ke daratan utara Sulawesi. Narasumber kami bapak Kase (67) tahun menuturkan bahwa ketika ayahnya kembali dari Mindanao, ia mengenakan celana



berwarna biru dan sangat kasar dan tebal. Ketika ia dikirim oleh orang tuanya dan disekolahkan di Manado pada tahun 1950-an, ia belum melihat jenis kain seperti itu diperjual belikan di toko-toko di Manado, nanti setelah tahun-tahun 1970-an, baru ada dan ia baru mengetahui bahwa celana seperti itu bernama *jeans*. Sebelumnya, mereka kakak beradik menyebut celana ayahnya itu *salana tarapale*, atau celana terpal, karena bahannya setebal terpal. Sang ayah pun tidak pernah menjelaskan bahwa itu adalah *jeans*. Tentang asesoris yang digunakan oleh kaum wanita, mulai dari anak-anak hingga wanita dewasa, amatan Lam juga teramati sekarang. Bedanya, asesoris yang digunakan oleh kaum wanita semakin beragam. Tidak lagi sekedar berbahan kerang, tembaga dan emas, tetapi juga bahan-bahan lainnya seperti plastik dan sebagainya.

Baik kaum wanita maupun kaum pria akan mengenakan busana terbaiknya pada hari minggu mengikuti upacara ibadah di gereja. Selain itu, pada acara-acara yang diselenggarakan sepanjang daur hidup seperti pusta syukuran baptisan anak-anak, pesta perkawinan, dan tidak kalah pentingnya ketika ada kunjungan tamu-tamu pejabat baik dari kabupaten, propinsi, dan pejabat pusat (Jakarta). Keadaan ini berbeda dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Teriknya matahari dan tingginya suhu udara membuat kaum lelaki lebih banyak bertelanjang dada dan mengenakan celana pendek. Dari busana yang disandang, dengan mudah kegiatan warga dikenali. Para petugas paramedis setiap harinya mengenakan seragam putih, beberapa staf pegawai negeri sipil di kantor kecamatan dan institusi pemerintahan, para guru mengenakan seragam hansip setiap hari senin, seragam warna kheki hari selasa hingga rabu, seragam "kain bentenan" pada hari kamis dan seragam olahraga pada hari jumat. Beberapa orang pensiunan dan purnawirawan, mantan kepala dan aparat desa sering mengenakan baju yang dijahit dengan pola safari. Begitu pula halnya dengan anak-anak sekolah dengan seragam putih merah untuk siswa-siswi Sekolah Dasar, putih biru untuk

siswa-siswi SMP dan putih abu-abu untuk siswa-siswi SMK. Para petugas dengan mudah dikenali dari seragam yang disandangnya, meskipun tidak jarang ditemukan aparat yang tidak mengenakan seragam kesatuannya, kecuali pada hari-hari kapal (hari-hari datangnya kapal perintis maupun pelni).

### 3.2 Sistem Mata Pencaharian Hidup

Setiap individu di bagian dunia manapun dia berada harus mampu berstrategi untuk dapat tetap hidup. Warga masyarakat pulau Miangas pun tidak akan luput dari kecenderungan umum ini. Untuk mempertahankan hidup kesempatan memungkinkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian hidup. Maksudnya, karena kondisi alam setempat tidak ada satu jenis pekerjaan atau mata pencaharian apapun yang dapat ditekuni sepanjang hidup. Jangankan sepanjang hidup. Sepanjang tahun pun tidak ada kecuali jenis pekerjaan formal seperti halnya warga yang berprofesi sebagai PNS. Seorang lelaki Miangas tidak akan mungkin menjalankan profesi sebagai nelayan sepanjang tahun karena cuaca dan iklim yang berubah-ubah. Jika laut tenang, mereka melaut. Namun, jika laut berombak karena angin, mereka bercocok tanam atau menjual jasa tenaga. Jika tidak tersedia pekerjaan, terpaksa mereka menganggur.

Berbeda dengan sistem pencatatan penduduk berdasarkan mata pencaharian di desa-desa di pulau Karakelang kabupaten Kepulauan Talaud yang mengklasifikasikan warga atas berbagai jenis pekerjaan seperti petani, nelayan, tukang di mana warga yang terklasifikasi dalam pekerjaan tersebut menekuni aktivitas dimaksud dapat menghidupi anggota keluarganya, keadaan seperti itu tidak dapat disamakan dengan pengklasifikasian mata pencaharian di pulau Miangas. Aktivitas apa pun yang mereka lakukan dapat dikategorikan pada pendapat para pakar sebagai bentuk dari perekonomian subsisten. Mencari nafkah sekedar

untuk bertahan hidup. Anggapan ini diperkuat oleh hasil temuan kajian tim peneliti dari Departemen Sosial pada tahun 2008 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dimana terdapat 168 Kepala Keluarga termasuk kategori fakir miskin<sup>14</sup>. Ini berarti 82,7 % dari jumlah kepala keluarga meskipun memiliki pekerjaan tetapi dari hasil pekerjaannya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pada masa lalu, setidaknya hingga pertengahan abad ke- 20, aktivitas *mancari* dan menjual atau menjajakan ikan kayu ke pulau-pulau Talaud dengan menggunakan perahu layar menjadi mata pencaharian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan melaut. Pada musim ikan cakalang dan tuna, nelayan mampu menangkap sebanyak mungkin karena ikan itu menjadi bahan utama ikan kayu. Tidak jarang stok ikan kayu melimpah dan itulah yang di-jajakan ke pulau lainnya. Dewasa ini, menurut narasumber kami bapak CR (67) dan AT(67), aktivitas seperti itu tidak lagi ditekuni karena warga sudah “dimanjakan” oleh bantuan pemerintah yang dalam setiap kunjungannya membawa bahan makanan terutama beras dan mie instan. Warga menjadi semakin malas lagi pada saat munculnya program fakir miskin dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Propinsi dan Kabupaten. Waktu yang sangat singkat untuk penelitian lapangan tidak sempat menyaksikan keterangan di atas, namun di kantor desa tampak tumpukan karung beras dan karton mie instan, jatah untuk warga.

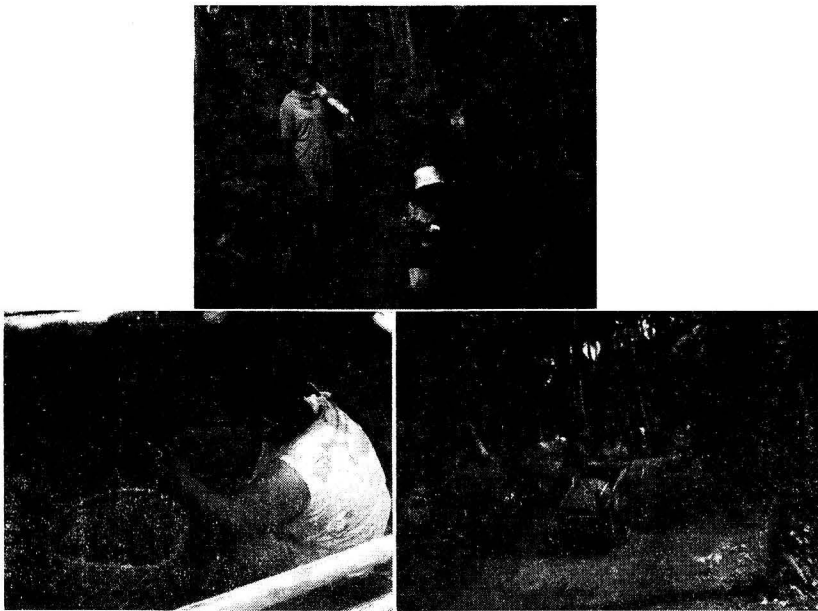
Lepas dari persoalan di atas, yaitu apakah hasil pekerjaan yang mereka tekuni dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang jelas adalah ketika musim tenang, laut tidak berombak dan tidak ada angin kencang, kaum lelaki melakukan aktivitas penangkapan ikan pada siang dan malam hari. Siang hari mereka menangkap ikan-ikan jenis pelagis maupun demersal, malam hari mereka menebat jaring yang disebut *landa*, menjaring ikan terbang. Pada musim melaut seperti itu istri-istri nelayan akan mengambil tanggung jawab pekerjaan kaum pria di ladang. Kegiatan yang ditekuni para

---

14 Hasil penelitian tersebut secara rinci sudah dikutip pada bab dua tulisan ini.

istri nelayan di ladang mencakup kegiatan-kegiatan menyangi tanaman, mengumpulkan kelapa yang sudah tua sehingga jatuh dari pohon, memanen hasil tanaman seperti umbi-umbian. Namun demikian, pekerjaan utama seperti mencangkul, memanjat kelapa, mengolah kopra, tetap menjadi tugas kaum pria.

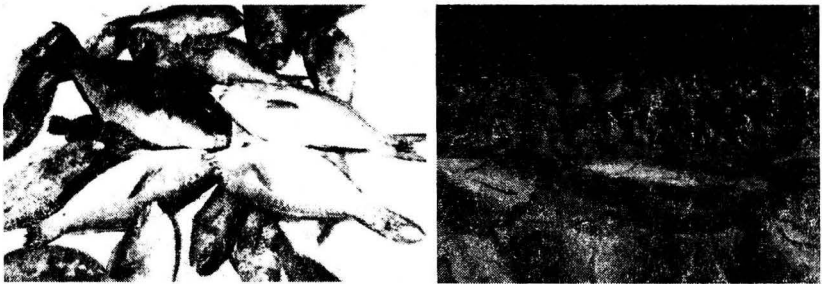
**Gambar 3.6** Suami, istri dan anak pulang dari kebun (kiri); dan seorang ibu memanen ubi jalar (*ipomea batatas*) (tengah); dan seorang ibu mendorong roda, wadah untuk mengumpul kelapa



Pada musim teduh atau musim ikan, hasil melaut melimpah. Nelayan di Miangas tidak berbiasa mengkonsumsi hasil tangkapannya sendiri. Kebiasaan turun-temurun adalah membagi-bagikan hasil laut kepada sanak saudara, terutama mereka yang sudah lanjut usia dan berstatus janda. Sesudah memenuhi kewajiban mereka memberi hasil tangkapan itu, sisanya diproses menjadi ikan asin atau *ikang garam* atau ikan asin dan *ikang fufu* atau mereka sebut *tinapa*. Tidak semua jenis ikan cocok untuk dijadikan

ikan asin atau ikan yang di asapi. Misalnya, ikan cakalang hanya cocok untuk diasapi, tapi tidak enak kalau dijadikan ikan asin. Hingga tahun 1970-an awal, nelayan Miangas biasanya menjadikan cakalang sebagai bahan baku ikan kayu. Ikan Kakap, ikan terbang dan beberapa jenis ikan demersal, lebih cocok dijadikan ikan asin. Sudah menjadi kebiasaan di Miangas dan pulau-pulau Nanusa, ketika sore hari anak-anak bermain di pantai. Mereka tidak sekedar bermain, tetapi sekaligus menunggu orang tua mereka pulang melaut. Setiap ada perahu nelayan mendarat, anak-anak ini membantu mengangkat perahu ke pantai. Imbalannya adalah setiap anak mendapat seekor ikan. Jika hasil tangkapannya banyak, anak-anak yang datang membantu si nelayan mendapat lebih dari sekedar seekor.

**Gambar 3.7 Hasil tangkapan yang masih segar (kiri) dan dijemur sebagai ikan asin**

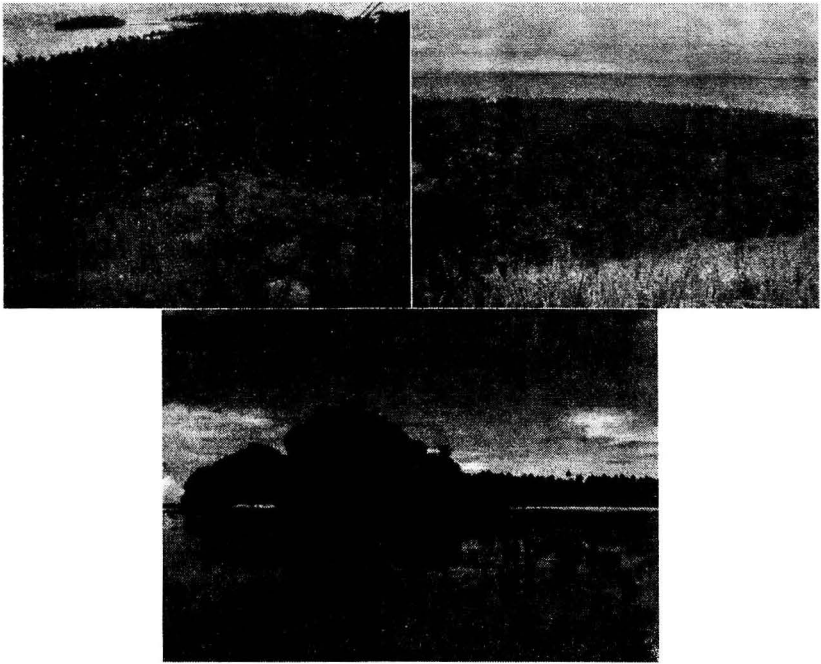


Pada musim kencang, satu-satunya cara untuk mendapatkan ikan adalah mengoperasikan pancing joran di sepanjang pesisir pantai terutama pada sisi pulau yang tidak kena angin dan ombak. Misalnya, kalau yang bertiup angin selatan, maka pesisir utara pulau Miangas sangat ramai dipenuhi warga yang memancing. Begitu pula kalau pada musim angin barat, maka warga akan memancing ikan di sisi timur pulau.

Struktur dan topografi tanah serta sebaran tanaman kelapa di pulau Miangas tidak memungkinkan adanya areal terbuka yang

khusus dijadikan lahan bercocok-tanam. Jika kita memandang dari puncak gunung Batu (110 m) ke arah utara, tampak daerah perbukitan yang didominasi oleh bebatuan. Begitu pula arah timur gunung ini. Bahkan lebih terjal dari bagian utara. Kawasan yang tampak hijau dengan pohon kelapa hanya ada pada sisi barat dan selatan dari gunung Batu. Itu pun di antarai oleh hamparan alang-alang yang bertumbuh di sela-sela bebatuan serta empat hamparan rawa masing-masing mereka sebut *lota amari*, *lota banga*, *lota sala*, dan *lota larawan*. Ketiga hamparan rawa ini penuh ditumbuhi talas air atau laluga yang dalam bahasa setempat mereka sebut *puṛaha* (*Cyrtosperma Merkussi*, Schoot). Talas air atau laluga (*puṛaha*) merupakan persediaan makanan di masa-masa paceklik. Pada usia panen, berat umbinya bisa mencapai 10 sampai 15 kg., dengan ukuran panjang sekitar setengah meter dan berdiameter 25 – 35 sentimeter. Hampir semua kepala keluarga membudidayakan pohon laluga di hamparan rawa yang ada. Hanya dengan mengelola lahan-rawa seluas lima meter persegi, setiap keluarga sudah memiliki cadangan makanan untuk sebulan hingga dua bulan lamanya. Mengalirnya bantuan pemerintah dalam bentuk natura berupa beras dan mie instan, warga Miangas semakin jarang mengkonsumsi laluga. Hamparan rawa yang satunya berada di bagian selatan perkampungan dan ditumbuhi mangrove.

**Gambar 3.8 Sisi selatan dan sisi barat pulau Miangas dilihat dari gunung Kota dan sisi utara dilihat dari ujung karang**



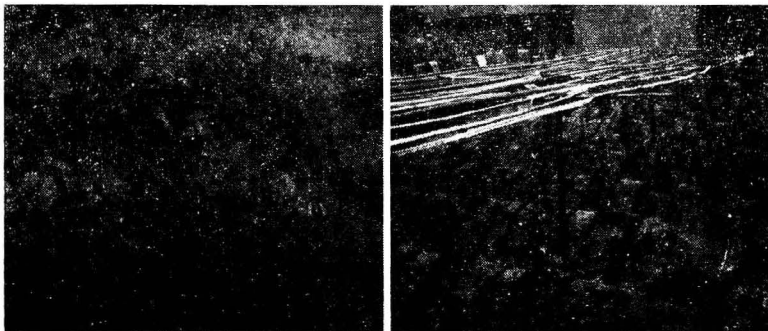
Topografi seperti ini tidak menyisakan areal terbuka yang dapat digarap sebagai lahan perkebunan. Satu-satunya cara yang dilakukan warga memanfaatkan lahan di bawah pepohonan kelapa ditanami umbi-umbian terutama keteloh pohon, ubi jalar dan talas. Padahal, jarak pohon kelapa yang ditanam warga terbilang sangat berdekatan, antara satu pohon dengan pohon yang lain hanya berkisar antara 3 sampai 5 meter, sedangkan teoritis, tanaman kelapa harus ditanam dengan jarak antara 7 – 8 meter.

Lapisan permukaan tanah dengan humusnya yang tidak tebal yakni antara 2 hingga 10 sentimeter setelah itu dibawahnya ditemukan lapisan pasir putih membuat warga memiliki teknik menanam yang tidak ditemukan di pulau-pulau Talaud lainnya. Pertama, yang mereka lakukan adalah menutupi ael yang akan ditanami dengan alang-alang dan daun kelapa kering. Setelah

dibiarkan selama satu atau dua hari, daun kelapa dan alang-alang itu dibakar untuk mendapatkan abu sisa-sisa pembakaran yang bermanfaat sebagai pupuk. Tanah tersebut kemudian dipacul dengan cara membuat gundukan-gundukan tanah tempat benih umbi-umbian ditanam. Gundukan tanah dengan benih umbi jalar tersebut kemudian ditutupi dengan sabut kelapa kering yang masih utuh dan diletakkan pada posisi telungkup.

Ada juga warga menanam halaman rumahnya dengan umbi jalar. Khususnya ubi jalar yang benihnya mereka peroleh dari Mindanao, mereka tanam dengan cara yang berbeda dengan cara penanaman ubi jalar di kepulauan Talaud umumnya maupun di Sulawesi Utara. Tanaman ini tidak dibiarkan menjalar di tanah tetapi dibuatkan para-para setinggi satu meter. Gundukan tanah pangkal tanaman ini ditutupi sabut kelapa (lihat gambar 3.8 berikut).

Gambar 3.9 Cara menanam ubi jalar pakai para-para



Selain ketela pohon, ubi jalar, talas, pisang, dan sagu yang menjadi stok bahan makanan setempat, warga mengonsumsi sejenis talas air atau laluga yang mereka sebut *puṛaha* (*Cyrtosperma Merkussi*, Schoot), dan *annuwu* (*Schefflera elliptica*, Harm). Kebiasaan makan umbi laluga sekarang makin jarang, sedangkan tepung umbi *annuwu* selain menjadi makanan bayi juga sebagai pengganti tepung terigu untuk bahan kue.



**Gambar 3.10** Laluga atau *puraha* dan *annuwu*



Kelapa memiliki arti penting dalam kehidupan warga Miangas. Pada masa-masa paceklik, kelapa muda yang dagingnya sudah mulai keras atau yang mereka sebut *amba'*, menjadi pilihan utama. Kegemaran makan kelapa muda seperti ini tidak jarang menjadi bahan cemoohan warga Talaud lainnya terhadap warga Miangas dengan menggunakan ungkapan *mangngamba'* atau memakan kelapa muda. Kelapa muda dengan kadar kekerasan dagingnya disebut *amba* ini setelah diparut biasanya dicampurkan pada daging kepala ikan hiu dan menjadi makanan yang lezat. Dari buah kelapa, warga memperoleh santan dan minyak goreng untuk keperluan masak-memasak. Hasil lainnya adalah kopra. Daunnya sering digunakan sebagai atap dan dinding rumah. Untuk fungsi ini, warga sangat terlatih dalam hal menganyam daun kelapa.

**Gambar 3.11 Tumpukan kelapa yang siap diolah menjadi kopra dan dua cara menghasilkan kopra, yaitu kopra yang diasapi dan kopra matahari**



Seperti sudah disinggung di atas, kaum wanita mengisi hari-harinya dengan menganyam tikar dari daun pandan. Kegiatan ini dapat disebut sebagai salah satu industri rumah tangga yang paling utama. Selain menganyam tikar, membuat jajanan seperti roti menjadi pilihan ibu-ibu. Setiap pagi dan sore, ibu-ibu menempatkan kue-kue jualannya di meja yang ditempatkan di depan rumah. Pembeli utama adalah anak-anak sekolah, atau pegawai di kantor kecamatan, desa serta instansi-instansi pemerintah yang ada, terutama bapak-bapak aparat yang datang bertugas dan tidak ditemani keluarganya, atau juga petugas paramedis.

Setiap kedatangan kapal – entah itu kapal perintis, km Sangiang, maupun tongkang yang membawa bahan bangunan proyek pemerintah di Miangas – yang bersandar di dermaga, memberi peluang bagi kaum lelaki tua dan muda menyediakan jasanya sebagai buruh angkut melayani kegiatan bongkar-muat. Imbalan yang mereka peroleh tergantung pada jumlah barang yang harus mereka pikul dan hasil tawar menawar dengan si pemilik barang. Lain lagi halnya dengan barang bongkaran berupa bahan bangunan. Ada dua cara yang mereka boleh pilih, yaitu upah harian dan upah borongan.

Pilihan lain untuk mendapatkan penghasilan adalah merantau. Pilihan ini dilakoni oleh kaum pria yang memiliki ketrampilan bertukang dan pria berusia muda yang trampil memanjat kelapa di perkebunan-perkebunan kelapa yang ada di Minahasa. Kecenderungan mencari pekerjaan di Mindanao semakin kecil, selain dilakoni oleh warga yang mempunyai sanak saudara di sana, hambatan bahasa menjadi penyebab utama. Ada juga kaum pria dan wanita yang masih berusia muda memilih untuk menjadi pembantu rumah tangga dan pelayan toko di Manado dan Bitung. Kemudahan untuk memperoleh pekerjaan seperti itu pun tidak lepas dari adanya jaringan keluarga dan sahabat yang memberi tahu sekaligus menjamin pemberi pekerjaan.

Sebagian dari aparat pemerintah terlebih marinir dan angkatan darat yang pernah bertugas di pulau Miangas berperan membantu warga untuk mendapatkan pekerjaan baik formal maupun informal. Sudah lebih dari 10 petugas terutama yang masih bujangan mengawini wanita Miangas. Ketika mereka kembali ke markas dari mana mereka ditugaskan, misalnya di Bitung atau Surabaya, mereka tidak hanya membawa istrinya tetapi juga adik dan kerabat istrinya. Ada yang disekolahkan dan ada pula yang atas jaminan mereka memperoleh pekerjaan di lingkungan kemiliteran di mana mereka bertugas.

### 3.3 Sistem Kemasyarakatan (Kekerabatan)

*Santaraanaan* yang harafiah berarti “anak-beranak” atau keluarga batih merupakan unit terkecil dalam satuan sosial yang ada di pulau Miangas. Setiap keluarga batih ini pada sisi pemerintahan merupakan warga yang terhisab sebagai warga dusun, sebuah satuan administratif desa; pada sisi keagamaan merupakan anggota “kelompok” atau “kolom”, yang juga pembagian berdasarkan organisasi gereja; dan berstatus pula sebagai “*ana’u ruanga*” atau anggota sebuah kelompok klan yang disebut *ruanga* atau suku. Hal

ini menunjukkan bahwa ada tiga kategori dalam memahami sistem kemasyarakatan warga Miangas. Pertama, sistem kemasyarakatan warga Miangas yang diwariskan turun temurun. Kedua, sistem kemasyarakatan yang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, dan ketiga, sistem kemasyarakatan yang didasarkan pada organisasi keagamaan. Adapun sistem kemasyarakatan yang diwariskan secara turun temurun berupa tatanan tradisi di sebut dengan 'adat'. Pemahaman kata 'adat' di sini lebih mengacu ke konsep "tradisi" atau "kebiasaan" bukan 'hukum adat'. Penjelasannya dapat diikuti pada alinea di bawah ini.

Seperti sudah dikemukakan di atas bahwa keluarga batih sebagai unit terkecil dalam kehidupan warga Miangas tergabung pada kelompok-kelompok *ruanga* atau biasa mereka sebut sebagai 'suku' (klan). Semuanya berjumlah 12 suku atau klan. *Ruanga-ruanga* itu adalah: (1) *ruanga* atau suku Ratu Uli; (2) *ruanga* atau suku Lanta'a; (3) *ruanga* suku Tulungan-Lupa; (4) *ruanga* atau suku Tine; (5) *ruanga* atau suku Larengen; (6) *ruanga* atau suku Essing; (7) *ruanga* atau suku Siliratu; (8) *ruanga* atau suku Arunda'a; (9) *ruanga* atau suku Pape'a; (10) *ruanga* atau suku Bawala; (11) *ruanga* atau suku Langu; dan (12) *ruanga* atau suku Talu. Setiap kelompok suku dipimpin tetua yang disapa *timaddu ruanga* atau tetua suku. Di atas para tetua suku, ada *ratu mbanua* dan *inangngu wanua*. Kepemimpinan *ratu mbanua* berhubungan dengan soal pemerintahan, pertahanan, dan sebagainya, sedangkan *inangngu wanua* berurusan dengan kesejahteraan warga dan penyelesaian masalah keluarga semisal sengketa tanah, sengketa dalam rumah tangga dan sebagainya. Umumnya mereka disapa sebagai "para pemangku adat".

Adapun tugas *ratu mbanua* yang berhubungan dengan soal pemerintahan, pertahanan, tidak berarti bahwa dia masuk ke ranah administrasi pemerintahan yang menjadi tugas kepala desa. Pemahaman mereka tentang pemerintahan di sini adalah secara adat dan pemahaman yang agak imajiner. Misalnya, kalau ada

kasak-kusuk dalam masyarakat yang mengarah pada melemahnya pengaruh kepala desa atau pimpinan agama, maka situasi seperti ini dipahami sebagai suasana yang tidak biasa dan ditandai dengan frasa *wanua wa alengka* artinya suasana kemasyarakatan tidak stabil. Penanganan atau pemecahan yang dilakukan oleh *ratu mbanua* bukan mencari masalah riil, menelusuri dan mencari kambing-hitam penyebab kasak-kusuk dan sebagainya. Yang ia lakukan adalah mengumpulkan seluruh tokoh adat, membahas persoalan itu dan melaksanakan upacara yang disebut *ma'ola' banua* artinya menata kampung. Caranya adalah mengajak seluruh warga untuk makan bersama. Setiap keluarga membawa makanan masing-masing ke tempat yang sudah di tentukan apakah itu di bangunan rumah sekolah atau gereja. Para tokoh adat ini urungan menyembelih seekor anak babi atau istilahnya *darꞑu wuꞑawan* atau 'darah emas' yang berfungsi sebagai simbol pemersatu. Daging babi ini akan cincang halus-halus, dimasak dengan banyak kuahnya lalu pada saat makan bersama dibagikan ke setiap warga, walaupun seorang hanya mendapat satu sendok. Pada awal acara *ma'ola'banua* seperti ini baik *ratu mbanua* maupun *inangngu wanua* akan menyampaikan nasihat, mengingatkan warga bahwa mereka adalah satu keturunan sehingga perlu menjaga persatuan adat dan tradisi. Bersamaan dengan nasihat itu *ratu mbanua* akan mengucapkan kata-kata adat yang disebut *aimpaꞑu* yang isinya mohon kepada arwah nenek moyang agar menjaga para turunannya, menyampaikan doa kepada Khalik Pencipta (*Mawu Ruata*) kiranya menjauhkan segala cobaan, godaan dalam kesatuan warga secara adat. Upacara seperti ini dapat dipahami sebagai cara memperkuat solidaritas warga.

Telah dikemukakan di atas bahwa tugas seorang *inangngu wanua* berurusan dengan kesejahteraan warga dan penyelesaian masalah keluarga semisal sengketa tanah, sengketa keluarga, dan sebagainya. Kesejahteraan warga dalam ukuran adat dan tradisi diterjemahkan ke dalam dua kata *an burꞑu ina'* artinya makanan

dan lauknya. Maksudnya, apakah dikedun, umbi-umbian berisi banyak; apakah pisang yang ditanam buahnya bernas; apakah kelapa berbuah dengan baik; tidak ada hama dan sebagainya. Begitu pula pencaharian di laut. Tentu tidak masuk di sini jika cuaca tidak bagus dan musim kencang. Jika *an burru ina* semuanya baik, tidak ada hama; hal ini ditafsirkan sebagai buah dari penentuan *ratu mbanua* dan *inangngu wanua* dikehendaki oleh *rimbuwu mbanua* termasuk di dalamnya jiwa-jiwa nenek moyang. Penilaian ini berlaku pula atas hasil pemilihan kepala desa. Jika hasil pemilihan kepala desa, *ratu mbanua*, *inangngu wanua* serta tokoh-tokoh adat lainnya bertepatan dengan kemarau misalnya sehingga umbi-umbian tidak berisi, buah pisang tidak bernas, maka pemimpin yang baru terpilih dianggap sebagai tokoh yang *tala ma an burru ma ina' banua* artinya pemimpin yang tidak dapat mendatangkan kesejahteraan serta kemaslahatan warga. Hal seperti ini tidak serta merta ditanggapi dengan pemilihan ulang. Para tokoh adat berupaya mencari jalan keluar dengan cara *marrengke banua* atau memperbaiki keadaan kampung. Jika pada upacara *ma'ola'banua* warga disertakan secara gotong-royong membawa makanan untuk dimakan bersama, maka dengan upacara *marrengke banua* pemimpin yang dipandang penyebab dari masalah inilah yang membiayai pelaksanaan upacara. Istilahnya *mapa an ana'u wanua* artinya memberi makan dan menjamu warga. Berbeda dengan pesta menjamu warga, dalam upacara *mapa an ana'u wanua*, jenis makanannya dibatasi pada masakan tradisional saja. Yang penting adalah adanya *darra wulawan* yang disembelih. Sekecil apa pun, dengan cara masak tradisional, yang penting warga mendapatkan bagiannya. Pada upacara seperti ini pemimpin yang menjadi pokok-acara diberi dukungan adat oleh para tetua. Salah satu formula yang diucapkan adalah *ariewe pa'illalai, indiwe ta'e tondo mpusi iamiu* yang artinya janganlah dicari tahu asal-muasalnya karena dia masih keturunanmu. Formula seperti ini seakan ditujukan kepada *rimbuwu mbanua* serta jiwa-jiwa pendiri

kampung agar berkenan menerima kepemimpinannya dan tidak lagi mendatangkan bala sehingga warga mendapat makanan yang cukup dan hidup sejahtera dalam ukuran mereka.

Tugas lain seorang *inangngu wanua* adalah menyelesaikan masalah keluarga. Hal yang sering ditemukan adalah menyelesaikan persoalan hubungan lelaki perempuan yang berakhir dengan kehamilan. Menghadapi persoalan seperti ini ada dua jalan keluar. Pertama, menikahkan mereka. Biasanya kejadian seperti ini bisa terjadi karena meskipun kedua anak sudah saling mencintai tetapi ada pihak orang tua yang tidak merestui sehingga satu-satunya cara adalah melakukan jalan pintas seperti itu. Kalau keadaannya sudah seperti ini maka yang mengambil alih peran orang tua adalah para tokoh adat dan tokoh agama. Kedua, jika hal itu terjadi semacam 'kecelakaan' dan kedua pihak tidak mungkin dinikahkan dengan berbagai alasan, apakah karena satu keduanya sudah bersuami dan beristri, maka keduanya dikenai denda adat. Pihak lelaki diwajibkan memberikan *tatarumea* artinya penebus rasa malu. Selain sejumlah uang yang diberikan kepada pihak perempuan, maka pihak laki-laki harus mengadakan upacara memberi makan kepada tokoh-tokoh adat, agama, pemerintah, dan keluarga yang dipermalukan. Kejadian ini sudah terjadi pada seorang petugas (yang sudah berkeluarga) dan menghamili anak gadis setempat. Pelaksanaan upacara serta pemberian *tatarumea* tidak otomatis menyelesaikan masalah hukum. Proses hukum jalan terus, meskipun secara adat sudah dijalankan. Karena alasan pelaksanaan sanksi adat menurut anggapan tokoh adat tidak hanya sekedar memberi sanksi, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan yang sifatnya supranatural dalam kehidupan warga. Acapkali warga yang 'dipermalukan' karena dihamili oleh seseorang yang tidak mau bertanggung-jawab, untuk sementara waktu 'diasingkan' dengan cara dititip tinggal menetap untuk sementara waktu, apakah itu di Bengel dan Resduk (Talaud) atau

di Dodap (Bolaang Mongondow Utara) di Manado dan di Bitung, tempat dimana ada kerabatnya.

Setiap persoalan keluarga yang ditangani oleh tokoh adat tidak langsung menjadi tanggung-jawab *inangngu wanua*. Pada awalnya menjadi urusan *timmaddu ruangnga* jika itu terjadi dalam satu kelompok *ruangnga* atau suku. Jika persoalan itu menyangkut urusan dari warga yang berbeda kelompok suku atau *ruangnga* maka kedua *timmaddu ruangnga* akan menyelesaikannya secara bersama. Dari keterangan yang terhimpun, pemecahan persoalan yang ditempuh oleh tokoh-tokoh adat dalam hal perselisihan dan persoalan keluarga tidak selamanya menyelesaikan persoalan itu secara hukum, selain perdamaian secara adat, namun masalahnya jadi mengendap dan sewaktu-waktu muncul kembali. Kenyataan seperti itulah yang mendorong warga untuk memilih persoalannya diselesaikan secara hukum mulai dari kantor desa atau ke kepolisian. Apalagi di Miangas Pos Kepolisian sudah ada sejak lama.

Dibandingkan dengan masa lalu, menurut narasumber kami CR (67 thn) dan AT (67), peran para kepala suku atau *timmaddu ruanga* dewasa ini sudah sangat terbatas. Ada fungsi-fungsi yang sudah diambil alih oleh pemerintah maupun gereja sesuai perkembangan jaman. Ia memberi contoh misalnya, pada masa lalu, perkawinan warga dapat diselesaikan dalam ruang lingkup kelompok suku sehingga ada istilah "kawin famili". Sebelum kawin famili diadakan, si calon mempelai wajib melewati beberapa tahap. Mulai dari tahap, yang mereka sebut sebagai *manginna* atau memperoleh kepastian soal status anak gadis, kemudian *mangono* atau melamar dilanjutkan dengan proses "kawin famili". Yang berperan dalam tahapan ini adalah kepala suku atau *timmaddu ruanga*. Sejalan dengan perkembangan jaman fase atau tahap *manginna* sudah tidak perlu dijalani karena perjodohan bukan lagi di tangan orang tua/keluarga tetapi sudah di tangan anak itu sendiri. Kemudian fase atau tahap "kawin famili", sudah diambil alih oleh gereja (pemberkatan nikah) dan pemerintah (pencatatan sipil). Jika



keluarga masih memerlukan tahap melamar secara simbolis, peran para tetua adat ini sebatas memberi petuah dan restu yang dibawakan dalam bahasa daerah dan disebut *mangimpaʼu*. Begitu pula halnya dengan peran *inangngu wanua* yang dulunya berfungsi mendamaikan warga yang bersengketa saat ini sudah ada polisi desa dan aparat kepolisian yang mengambil alih tugas tersebut.

*Ana'u wanua* atau warga kampung sekarang di mata tokoh-tokoh adat dan masyarakat terkesan sudah semakin individual dalam artian kedekatan dengan para tetua dalam *ruanga* beralih ke tokoh-tokoh formal maupun informal lainnya di Miangas, seperti halnya dengan kepala desa, kepala lingkungan, tokoh agama, kader partai, dan aparat serta petugas yang ada dengan tujuan adanya kemudahan untuk mendapatkan penghasilan. Singkat kata, warga semakin pragmatis. Sikap pragmatis yang terkesan menghindari peran tetua dalam *ruanga* terutama nampak dalam hal perkawinan. Tidak jarang warga yang mau mengawinkan anaknya, memilih untuk menyelenggarakan proses perkawinan di Manado atau di Bitung, dengan alasan bahwa sebagian besar keluarga berada di Manado atau Bitung dan sekitarnya. Namun, dari ungkapan beberapa informan yang sudah menjalani kegiatan seperti ini mengungkapkan alasan ekonomi lah yang paling utama. Kalau mengawinkan anak di Miangas – menurut mereka – biayanya jauh lebih besar dibandingkan dengan di Manado atau Bitung. Selain itu, ungkapan selamat dan doa restu bagi mempelai, jika di Miangas hanya dalam bentuk jabatan tangan serta kata-kata pidato dan *aimpaʼu*; sedangkan kalau di Manado atau Bitung, keluarga yang datang menyatakan restu dan ungkapan selamat juga memberikan uang dalam sampul yang kalau dijumlahkan sudah dapat mengembalikan sebagian dari pengeluaran. Biaya administrasi Pencatatan Sipil pun tidak beda malahan menguntungkan karena kalau di Manado dan Bitung, tidak perlu menunggu lama.

Keanggotaan *ruanga* tidak selamanya mengikuti garis ayah atau patrilineal. Mereka senantiasa memperhitungkan silsilah keluarga. Jika dalam satu keluarga dengan beberapa anak misalnya, anak yang sulung tetap menjadi anggota *ruanga* ayahnya. Jika ayahnya menikah dengan wanita dari *ruanga* lain, maka si anak akan menjadi anggota *ruanga* dari mana ibunya berasal. Karena ketika ayahnya menikah, maka ibunya akan ikut menjadi anggota *ruanga* ayahnya. Sebaliknya, jika si ibu dalam garis silsilah adalah keturunan dari yang dituakan dalam *ruanga*-nya, maka ayahnya harus ikut menjadi *dumaratin* yang harafiah berarti 'mereka yang ikut bergabung' dengan *ruanga* dari ibunya. Tidaklah mengherankan kalau saat penelitian ini dilakukan atau masa-masa sebelumnya juga, *ruanga* Ratu Uli dipimpin oleh seorang yang dituakan dengan nama keluarga Pape'a. Atau *ruanga* Tine dipimpin oleh seorang yang bukan bernama keluarga Tine, dan seterusnya. Hubungan-hubungan kesilsilahan seperti inilah yang menyebabkan ada anggapan bahwa selain setiap *ruanga* memiliki status yang sama, tetapi tetap ada satu dua *ruanga* yang seakan-akan mendapat perlakuan khusus terutama dalam hal penentuan *ratu mbanua* dan *inangngu wanua*. Selain itu, ada *ruanga* yang menganggap *ruanga* lainnya adalah *sepe'* atau pasangan, sehingga warganya dianjurkan untuk tidak saling kawin-mawin, kecuali kalau dalam hitungan generasi silsilah sudah membolehkan, yaitu setelah 4 (empat) keturunan atau mereka sebut lapis.

Seperti telah dikemukakan dalam sub-bab 3.1 di atas bahwa hingga tahun 1960-an setiap *ruanga* memiliki perahu layar yang biasa digunakan untuk *mancari*. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok *ruanga* ini tidak sekedar berurusan dan mengatur masalah yang ada dan dijalani oleh warganya sepanjang daur hidup seseorang (*life cycle*), tetapi juga sampai pada persoalan ekonomi warganya.

Selain *ruanga* warga Miangas dikelompokkan ke dalam satu-satuan pewayalahan berdasarkan organisasi pemerintah desa yang

disebut dusun. Terdapat tiga dusun yang ada di Miangas dan masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun. Organisasi kemasyarakatan lainnya yang dibentuk oleh pemerintah adalah “kelompok tani”, “kelompok nelayan”, “pemuda”. Hanya saja, menurut hasil penelitian Tim Peneliti Depsos (2008) yang berkompeten mengevaluasinya, organisasi kemasyarakatan tersebut tidak aktif sehingga tidak memberikan manfaat bagi anggotanya. Menurut Suradi dan kawan-kawan (tim):

“... Kelompok keagamaan yang aktif adalah kelompok dari jamaat Protestan. Mereka membentuk kelompok (kolom), yang masing-masing kelompok terdiri dari kurang lebih 25 anggota. Kelompok ini menyelenggarakan kebaktian setiap minggu dari rumah ke rumah jamaat. Selain kegiatan kebaktian, melalui kelompok tersebut dilaksanakan gotong royong untuk membantu anggota yang mengalami keduakaan dan pembuatan pemakaman.” (2008:5)

Kolom adalah organisasi kemasyarakatan yang ditata berdasarkan kedekatan tempat tinggal atau rumah. Organisasi keagamaan (Kristen Protestan) yang disebut kelompok atau juga kolom dipimpin oleh seorang Ketua Kolom. Ia dipilih dari kalangan Penatua dan dibantu oleh Syamas atau Diakon. Dua jabatan yang dipilih dari kalangan awam anggota gereja dan tugasnya membantu Ketua Jemaat. Selain itu, ada juga organisasi gereja yang didasarkan pada jenis kelamin, yakni “kaum bapa/pria” dan “kaum ibu/wanita”. Ada juga kelompok pemuda dan anak-anak sekolah minggu. Seperti amatan tim peneliti Depsos, hasil amatan dan wawancara yang dilakukan oleh tim dalam penelitian ini mengungkapkan peran aktif kelompok keagamaan dalam kehidupan keseharian di Miangas. Peran utamanya adalah sebagai penyelenggara upacara atau ibadah keagamaan secara rutin seminggu sekali secara bergiliran dari rumah ke rumah. Kegiatan ini sekaligus menjadi semacam kontrol sosial bagi warga gereja, terutama dalam hal ketaatan beribadah. Selain kegiatan ibadah rutin setiap minggu, atas permintaan warga, mereka menyelenggarakan ibadah syukur apabila ada yang berulang tahun,

ada anggota keluarga yang baru tiba dari perantauan, atau ada anggota keluarga yang sudah menyelesaikan pendidikannya maupun memperoleh pekerjaan. Ibadah mendoakan orang sakit pun menjadi semacam keharusan. Biasanya, setelah usai ibadah, kaum ibu menjalankan arisan uang. Ada macam-macam jenis arisan, tergantung pada kesepakatan anggota jemaat. Jumlah uang arisan pun disesuaikan dengan kemampuan mereka. Tidaklah mengherankan kalau lewat arisan seperti itu mereka dimampukan untuk membantu warga yang berduka karena peristiwa kematian.

Aktivitas warga seperti dipaparkan di atas – dalam pengamatan tim peneliti Depsos tahun 2008 – mereka anggap sebagai ‘sumber daya sosial’ yang dapat dijadikan modal pemberdayaan warga. Sumber daya sosial tersebut menurut tim tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

1. Perilaku warga masyarakat Miangas yang terbuka terhadap pendatang, dapat menerima pendatang dari manapun. Setiap bertemu pendatang, mereka menyapa dengan ramah. Perihal keramah-tamahan warga merupakan modal sosial bagi mereka mengingat tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Kecuali anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun, hampir semua warga Miangas sudah pernah bepergian baik itu sebatas di kepulauan Talaud, atau ke Manado dan Bitung, dan terutama ke pemukiman-pemukiman warga Miangas di Bengel dan Resduk (Talaud); serta Dodap (Bolaang Mongondow Timur). Menjalin pertemanan dengan orang luar pulau Miangas sudah mentradisi.
2. Nilai-nilai sosial masih terpelihara dalam kegiatan gotong royong dan tolong menolong dalam urusan kerumah-tangga, dan pembangunan sarana ibadah dan perbaikan jalan umum. Tentang terpeliharanya nilai-nilai kegotong-royongan sepertinya hanya terbatas pada urusan keluarga, kerabat dan tetangga maupun urusan gereja atau keaga-

maan. Sedangkan untuk urusan yang berhubungan dengan pemerintahan, tampak tidak terlalu antusias. Misalnya, ketika ada pekerjaan membangun rumah ibadah, warga anggota gereja bergiat semampu mereka. Sebaliknya, kalau memperbaiki bangunan sekolah yang mereka tahu itu adalah hasil proyek pemerintah entah itu kategori banpres (bantuan presiden) atau inpres (instruksi presiden), ada-ada saja alasan mereka untuk menghindar-diri dari pengerahan tenaga mengerjakan kegiatan tersebut.

3. Keberadaan lembaga adat (*ratu mbanua* dan *inangngu wanua*, serta *timmadde ruanga*) yang mengatur pelaksanaan tradisi dalam kampung seperti, pelaksanaan *eha* atau pantang berkala untuk dua hal yaitu *eha* yang diberlakukan pada tanaman kelapa yang dilakukan setiap periode kuartalan atau tiga bulan dan *eha* di lokasi yang disiapkan untuk acara *manammi'* (yaitu menangkap ikan dengan tata cara adat setiap tahun), memberikan sanksi bagi warga yang mabuk, melanggar *eha* dan melakukan perzinahan.
4. Para tokoh adat ini juga berperan dalam hal menyambut tamu – terutama para pejabat yang berkunjung ke Miangas – sekaligus mendampingi mereka mengunjungi tempat-tempat bersejarah, terutama bekas benteng di bukit Kota.

Terbatasnya kesibukan warga untuk bekerja merupakan penyebab tingginya interaksi antar warga. Pada siang hari tampak kaum wanita yang sudah lanjut usia duduk bersama sambil main halma. Hampir setiap sore, ibu-ibu berolahraga main bola voli. Sedangkan kaum pria tampak berkerumun di sekitar sampian, terutama kalau ada warga yang sedang memperbaiki sampannya, maka mereka turut serta bukan untuk membantu, tetapi sekedar mengobrol atau juga mengamati aktivitas yang berlangsung.

Gambar 3.13 Interaksi warga lewat olah raga dan rekreasi permainan halma



Dari percakapan antar warga, sepertinya tidak ada batas antara yang tua dan yang muda. Sapaan 'papa' atau 'mama' tidak selamanya ditujukan kepada ayah atau ibu. Bisa saja seorang yang lebih dewasa menyapa lelaki muda dengan sapaan 'papa' sebagai manifestasi keakraban. Begitu pula dengan sapaan 'tua' sebagai pertanda rasa segan dan hormat. Guru, Pendeta, dan paramedis adalah jabatan yang sering menerima sapaan 'tua'. Misalnya, 'tuangguru', 'tuamandeta', dan 'tuamantri' digunakan untuk menyapa kaum lelaki yang menyandang salah satu dari pekerjaan tersebut. Jika guru, pendeta, dan paramedisnya perempuan, sapaan yang digunakan adalah 'ina' atau juga 'mama'. Sapaan 'papa' juga digunakan untuk menyapa tokoh-tokoh adat. Seorang *ratu mbanua* akan disapa 'papa ratu'. Begitu pula dengan kepala desa, akan disapa dengan 'papa apita|au'; camat akan disapa 'papa cama'. Kedua pejabat pemerintah (desa dan kecamatan)

ini jarang disapa dengan kata 'tua' misalnya 'tuangkapitalau' dan 'tuancama'. Sapaan seperti itu tidak biasa dan kalau tokh ada yang menggunakannya, maka dari intonasinya akan ketahuan apakah ia menyapa dengan sinis atau bukan.

Pada awal sub-bab ini telah dikemukakan bahwa *santaranaan* atau keluarga-batih merupakan unit terkecil dalam sistem kemasyarakatan di Miangas. Meskipun demikian, hubungan antara keluarga batih dengan orang tua mereka sangat kuat meskipun misalnya keluarga batih tersebut sudah hidup sendiri dan tidak lagi bersama orang tua salah satu pihak. Tidak ada perbedaan perilaku dan sikap terhadap keluarga suami maupun keluarga istri. Seorang anak – setelah ia dibaptis – akan menyandang nama keluarga atau fam ayahnya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menyandang nama keluarga atau fam ibunya. Biasanya, seorang anak yang lahir diluar nikah otomatis menyandang nama keluarga ibunya. Penggunaan nama keluarga ibu biasanya terjadi pada perkawinan antara seorang anak sulung perempuan. Sebagai rasa hormat terhadap mertuanya, maka ayah si anak merelakan anaknya untuk menggunakan nama keluarga istrinya. Pada kasus seperti ini, si anak tersebut sekalian dianggap sebagai anak-bungsu si mertua, atau diadopsi menggantikan posisi ibunya dalam keluarga kakeknya. Sepertinya kebiasaan ini terjadi sebagai upaya untuk melanggengkan nama keluarga atau fam dari pihak ibu agar tidak hilang atau terputus. Kebiasaan mengadopsi anak juga berlaku terutama pada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dan terlebih anak-anak yang lahir diluar pernikahan.

Tradisi gereja juga mengharuskan adanya orang tua baptis atau biasa mereka sebut '*papa saꞑani*' dan '*mama saꞑani*'. Orang tua baptis umumnya dipilih dari kalangan pemuka gereja, guru, serta tokoh masyarakat yang dalam kehidupan bergereja dapat dijadikan panutan. Berbeda dengan orang tua angkat, kewajiban orang tua baptis sebatas mendidik anak baptisnya dalam kehidupan bergereja. Namun, tidak jarang orang tua baptis memberikan uang

dan natura kepada anak baptisnya terutama pada pesta natal dan tahun baru, atau ketika anak baptisnya menjalani proses inisiasi gereja seperti menjadi anak sekolah minggu atau ikut sidi dan perkawinan.

Kehadiran struktur kepemimpinan tradisional yang sudah diuraikan di atas terutama menyangkut kehadiran tokoh *ratu mbanua* dan *inangngu wanua* yang baik oleh warga maupun pejabat setempat mereka alihbahasakan ke bahasa Indonesia dengan menyebutnya “mangkubumi”, mudah-mudahan tidak dipahami seperti halnya kehadiran “mangku buwono” yang ada dalam peradaban Jawa. Mangku buwono dalam struktur kesultanan dalam tradisi Jawa berasal dari trah yang menempati struktur sosial teratas. Sedangkan sebutan “mangkubumi” yang digunakan oleh warga Miangas dan Talaud pada umumnya bukanlah seseorang yang berasal dari trah bangsawan, tetapi “seorang yang dituakan di antara sesamanya” atau *primus inter pares*. Mereka di pilih dari kalangan kepala-kepala suku atau *timmadde ruanga'* atas pertimbangan kemampuan dan perilakunya yang dalam konsep Talaud dan Miangas, “*maola' iyaman buŕru inangngu ana' u wanua*” atau dapat dijadikan ayah dan ibu dari warga desa. Hak-hak yang mereka peroleh adalah perlakuan dari warga yang sama dan berlaku bagi orang-orang tua lainnya. Singkatnya, dalam kehidupan kelompok masyarakat Miangas tidak ditemukan sistem pelapisan sosial berdasarkan keturunan.

### 3.4 Bahasa dan Sastra (Lisan)

L.D. Kembuan, dan kawan-kawan dalam “Struktur Dialek Miangas” (1986)<sup>15</sup> menyatakan bahwa: “... dialek Miangas digunakan oleh masyarakat sebuah pulau kecil yang terletak di ujung

15 Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1986.



utara propinsi Sulawesi Utara (...) pada hakekatnya merupakan bagian dari bahasa Talaud" (1986:1 & 2). Tentang bahasa Talaud, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda, J.C. van Eerde, dalam *Inleiding tot de Volkenkunde van Nederlandsche Indië*, Jilid 1 halaman 1 – 4, menempatkannya dalam rumpun kelompok bahasa-bahasa Filipina. Kelompok bahasa ini masih tergabung lagi dalam rumpun bahasa yang lebih besar lagi yakni kelompok bahasa Austronesia. G. Bawole, dan kawan-kawan dalam buku mereka berjudul: *Struktur Bahasa Talaud* (1977), memaparkan bahwa ada enam dialek dalam bahasa Talaud, yakni (1) dialek Salibabu; (2) dialek Kabaruan; (3) dialek Karakelang; (4) dialek Essang; (5) dialek Nanusa; dan (6) dialek Miangas.

Pemilahan dialek yang dilakukan oleh Bawole dan kawan-kawan berbeda dengan anggapan Kembuan dan kawan-kawan dalam bukunya di atas. Menurut mereka, hanya ada dua dialek di Talaud, yakni dialek *Tiṛawatta* dan dialek *Lammi*. Dialek *Tiṛawatta* dilafalkan oleh penduduk di pulau Kabaruan, Salibabu dan Karakelang bagian selatan sedangkan dialek *Lammi* dilafalkan oleh penduduk di bagian utara pulau Karakelang, penduduk pulau-pulau Nanusa dan Miangas. Sebab itu menurut Kembuan dan kawan-kawan, sebutan dialek Miangas kurang tepat dan sebaiknya disebut sub-dialek Miangas. Tetapi, judul karya mereka yang berisikan pendapat tersebut justru tetap menggunakan judul *Struktur Dialek Miangas*. Alasan mereka memilah bahasa Talaud ke dalam dua dialek didasarkan pada perbedaan fonem-fonem nasal letup glotal serta variasi alofonis.

Bagi pengamat masalah kebudayaan yang tidak memahami ilmu kebahasaan atau linguistik, tidak terlalu melihat perbedaan dialek dimaksud, karena tidak semua kata dilafalkan berbeda. Pendapat Kembuan, dkk., maupun Bawole, dkk., perlu dikaji ulang oleh mereka yang menaruh minat dan mempelajari ilmu kebahasaan, karena dalam pendengaran kami sehari-hari sewaktu berada di lapangan – beberapa tempat dan kesempatan di pulau-

pulau Talaud – ada kata-kata daerah yang lafalnya sama di wilayah yang mereka kelompokkan di atas, entah itu berdasarkan pemilahan atas dialek *Tiṛawatta* maupun dialek *Lammi*; atau pemilahan dialek menurut Bawoleh, dkk., yang diidentifikasi berdasarkan lokasi wilayah. Beberapa contoh fonem yang berbeda yang dikemukakan oleh Kembuan, dkk., sehingga mereka memilah bahasa Talaud ke dalam dua dialek dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1 Contoh beberapa kata yang lafalnya berbeda dalam dialek *Tiṛawatta* dan dialek *lammi*.**

No.	<i>Tiṛawatta</i>	<i>Lammi</i>	Padanan Bahasa Indonesia
1.	Niukka (niutta, niurra, niuca)	<i>Niu'</i>	Kelapa (kata benda)
2.	Busa'a (buha'a)	<i>Busa'</i>	Pisang (kata benda)
3.	Uḷukka, (uḷutta, uḷuca)	<i>Uḷu'</i>	Sukun (kata benda)
4.	addatta	<i>Adda'</i>	Tatakrama, tradisi (kata benda)
5.	Sa alanna	<i>Sa'alan</i>	Perahu (kata benda)
6.	tuadda	<i>Tua'</i>	Tangga (kata benda)
7.	yamangnga	<i>yaman</i>	Ayah (kata benda)
8.	inangnga	<i>Ina</i>	Ibu (kata benda)
9.	Ana'a	<i>Ana'</i>	Anak (kata benda)
10.	pulunna	<i>pulun</i>	Cucu (kata benda)
11.	ipagga	<i>Ipa'</i>	Ipar (kata benda)
12.	iyupungnga	<i>yupun</i>	Kakek (moyang)
13.	Somakka, somacca	<i>Soma'</i>	Angin haluan
14.	senggotta	<i>senggo</i>	Layar (kata benda)
15.	sarimmatta	<i>sarimma</i>	Terima (kata kerja)
16.	aumbaedda	<i>aumbae</i>	Syair berupa pantun (kata benda)
17.	niuḥḥassa	<i>niuḥḥa</i>	Dicuci bersih (kata kerja pasif)
18.	Maḷuassa, maḷuaha	<i>maḷua</i>	Murah (kata sifat)
19.	masagatta	<i>Masagga'</i>	Mahal (kata sifat)
20.	maḥḥagissa	<i>Maḥḥaggi'</i>	Temperamental (kata sifat)
21.	Dan sejumlah kata lainnya.		

Diolah dari berbagai sumber dan rekaman wawancara

Hasil amatan yang diperoleh, tidak sedikit kata-kata yang di-lafalkan sama di kedua wilayah (enam wilayah) dialek tersebut di atas, misalnya:

**Tabel 3.2 Contoh beberapa kata yang sama dalam pembagian dua dialek**

No.	Tiṛawatta	Lammi	Padanan Bahasa Indonesia
1.	tuwu	<i>tuwu</i>	Tebu (kata benda)
2.	papanda	papanda	Sirip hiu (kata benda)
3.	manara	manara	Pekerjaan (kata benda)
4.	pato	pato	Haluan perahu (kata benda)
5.	Ire'e	Ire'e	Pergi ke arah atas (kata Kerja + arah)
6.	inawa	Inawa'	Pergi ke arah bawah (kata kerja + arah)
7.	inai	inai	Pergi ke arah yg setara tingginya (kata kerja + arah)
8.	marau	marau	Jauh (kata sifat)
9.	marani	marani	Dekat (kata sifat)
10.	tahuwaḷa	tahuwaḷa	Lunas perahu (kata benda)
11.	tagu	tagu	Tulang haluan (sambungan lunas perahu) (kata benda)
12.	mona	mona	Haluan (kata benda)
13.	pua	pua	Kepala manusia & hewan (kata benda)
14.	Anu'u	Anu'u	Kuku (kata benda)
15.	Ṙambia	Ṙambia	Sagu (kata benda)
16.	tawa	tawa	Lemak (kata benda)
17.	matawa	matawa	Gemuk (kata benda)
18.	maṛṛasa	maṛṛasa	Kurus (kata benda)
19.	sambau	sambau	Satu (kata bilangan)
20.	darua	darua	Dua (kata bilangan)
20.	Dan sejumlah kata lainnya.		

Diolah dari berbagai sumber dan rekaman wawancara

Selain berbeda dalam hal pelafalan kata-kata yang sama, ada juga perbedaan kata yang tidak hanya di kedua (Kembuan, dkk.) atau keenam (Bawole, dkk.,) wilayah dialek, tetapi juga lintas

wilayah dialek. Dalam hal tutur-kata atau diksi, di kalangan generasi tua penutur bahasa Talaud, hal itu sangat mereka perhatikan. Mereka menganggap bahwa penutur bahasa Talaud yang baik dan santun tidak sekedar berkata-kata dan menggunakan bahasa Talaud, tetapi juga memperhatikan lawan bicara dengan siapa dia bertutur. Warga Miangas penutur dewasa dan santun tidak akan menggunakan kata *bei uma* (mari makan), jika mengajak makan seorang tamu atau kerabatnya. Ucapan itu hanya ditujukan kepada sahabat akrab. Ia akan menggunakan frasa *bei maccabbi* yang artinya sama yaitu mari makan. Frasa *bei maccabbi* dianggap lebih halus dari frasa *bei uma*. Dari pilihan kata serta intonasinya juga dapat diketahui suasana hati si penutur. Jika dalam keadaan marah, ia akan menyuruh suami dan anak-anaknya dengan frasa *pannappimbe* yang maknanya mirip dengan kata Indonesia, 'ayoh, ganjal perutmu'. Ada banyak ekspresi terekam dalam catatan lapangan dan memerlukan pembahasan khusus. Singkat kata, kesantunan seseorang, kedekatan dan keakraban dengan lawan bicara serta suasana hati mempengaruhi tutur kata seseorang.

Contoh yang disajikan di atas memberi peluang bagi para pemerhati bahasa untuk mengkaji fenomena kebahasaan tersebut, karena dalam rekaman wawancara kami terhadap penutur dialek Miangas maupun penutur dialek lainnya di Talaud menunjukkan persamaan lafal kata-kata lebih banyak dibandingkan dengan perbedaannya. Begitu pula dalam hal diksi yang mengesankan adanya alasan-alasan sosio-psikologis yang melatarinya.

Pada saat Kembuan, dkk., melakukan penelitian, mereka memperkirakan penutur dialek Miangas berjumlah sekitar 1.400 orang (1986:2). Sebagai salah satu dialek yang dikelompokkan ke dalam rumpun bahasa Filipina, disebut-sebut bahwa makin ke selatan atau ke daratan Minahasa yang juga masuk ke dalam rumpun bahasa Filipina, makin kehilangan ciri-ciri kefilipinaannya. Atau, jika diperbandingkan dengan bahasa-bahasa rumpun Filipina lainnya di Minahasa, dialek Miangas menunjukkan persamaan yang

lebih besar dengan bahasa-bahasa di Filipina (1986:4). Hanya saja, Kembuan, dkk., tidak menyebut bahasa-bahasa rumpun Filipina mana yang ada di Filipina yang menunjukkan persamaan lebih besar itu. Karena, di daratan Mindanao saja dapat ditemukan puluhan bahasa dengan ratusan dialek. Misalnya, Manobo, Sangil/Sangir, Maranao, Ilanun, Magindanao, Tiruray, Tasaday, T'boli atau Tagabili, B'laan, Subanun, Kamiguin, Mamanwa, Butuanon, Kamayo, Bagobo, Mandaya, Kalagan, dan Kolibugan. Dalam hal kedekatan geografis, bahasa Mandaya yang dituturkan oleh warga propinsi Davao Oriental. Selain itu bahasa B'laan (Peralta, 2003). Dialek yang paling dekat kesamaannya dengan bahasa Sangihe adalah bahasa Sangil. Dua linguist, Alice dan Kenneth R. Maryott melakukan kajian intensif tentang bahasa Sangil dan membandingkannya dengan bahasa Sangihe, telah menerbitkan karya-karya mereka, antara lain: "*The phonemics of Sarangani Sangiré*" (1977); "*Sangiré (or Sangil)*" (1978).

Hal yang perlu diperhatikan dalam kajian kebahasaan adalah bahasa-bahasa di Filipina, juga telah menyerap ratusan kata-kata Melayu. Theodore A. Agoncillo, seorang sejarawan senior Filipina mencatat puluhan kata-kata Melayu dalam bahasa-bahasa di Filipina atau lebih khusus bahasa Tagalog dalam karyanya: *History of the Filipino People* (1990:55 – 56). Sejarawan lainnya, Sonia M. Saide, dalam *The Philippines: A Unique Nation* (1994:54) mengutip pendapat Pardo de Travera yang mengatakan bahwa kurang lebih 340 kata Sansekerta yang diserap dalam bahasa Tagalog. Zaide juga mengutip pendapat mantan direktur Institut Bahasa Nasional Filipina, Jose Villa Panganiban yang menyatakan jumlah kata pinjaman itu jauh lebih banyak yaitu 375 kata Sanskrit. Sarjana lainnya yang dia kutip adalah Najeeb M. Saleeby yang mencatat adanya 300-an kata Sanskrit dalam bahasa Mindanao dan Sulu. Jika disimak dengan baik, kata-kata yang disebutkan sebagai bahasa Sansekerta tersebut juga telah diserap dalam bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia, termasuk dialek Miangas.

Sebagai contoh, kata *ama* (ayah), *asawa* (istri), *bangsa* (bangsa), *saksi* (saksi), dan sebagainya. Ini berarti perlunya pertimbangan atau konsiderasi kesejarahan dalam kajian kebahasaan.

Sastra lisan merupakan kekayaan warga Miangas yang kini dapat dikatakan telah punah bersamaan dengan punahnya tradisi bahari *macca alan* atau berlayar. Sastra lisan dimaksud adalah *aumbae*, dan *maccambo* atau dalam tradisi bahari Sangihe *mesambo* dan tradisi bahari Talaud, *massambo*. *Maccambo* adalah melagukan puisi lirik dalam beragam gaya dan kategori, ketika mereka sedang mendayung perahu. Ritmenya sama dengan ayunan dayung. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat ritmenya. Begitu pula dengan liriknya. Ada yang berisikan doa serta permohonan kepada yang Maha Kuasa, ada juga pernyataan keheranan atas sesuatu yang baru mereka lihat.

Contoh *aumbae* tipe *nanalan* atau guyonan yang menunjukkan keheranan atas sesuatu yang baru mereka temukan misalnya terlihat dalam lirik berikut:

- (1) "*nalangi wungki, watu maḷimbulun*" kemudian diulangi lagi dengan urutan terbalik: "*watu maḷimbulun, nalangi wungki*". Harafiah berarti mainannya Bun Kiauw, batu berbentuk bulat; Batu berbentuk bulat, mainannya Bun Kiauw. Lirik ini terinspirasi melihat pedagang Cina bernama Bun Kiauw yang menggunakan sempoa.
- (2) "*barabungan Cina, pandarenoan lama*". Harafiah berarti kesombongan orang Cina, mandi di piring. Lirik ini tercipta ketika mereka melihat orang Cina yang mandi menggunakan loyang keramik sebagai penampungan air.
- (3) "*inai manu'bunggi, tiangnge tuttalinggi, ni tumalinggi su watu, watune watu maḷimbulun*". Harafiah, ada burung Bunggi hitam (*Amaurornis magnirostris*) perutnya membesar bulat, berguling-guling di atas batu, batunya batu bulat. Lirik ini berupa sindiran bahwa ada anak gadis yang hamil, hamil-

nya gara-gara batu yang bulat. Burung bunggi adalah burung endemik di Talaud.

Lirik-lirik di atas dilagukan secara kanon oleh pendayung yang duduk di bagian haluan yang mengawalinya dan dijawab oleh kelompok pendayung di bagian buritan. Setiap lirik diberi variasi seturut kemampuan kreativitas para pendayung. Misalnya ketika mereka melagukan pada contoh (1) di atas cara bersahut-sahutannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3 Cara melagukan *aumbae tipe nanalan* (1).**

Kelompok Pendayung Haluan	3 5 3 5 1 1 <i>Watu maḷimbulun</i>	Batu o batu bulat
Kelompok Pendayung Haluan	3 5 3 5 1 1 <i>Nalan ni wung kio</i>	Mainannya si Bun Kiau
Kelompok Pendayung buritan	1 5 3 5 3 5 1 1 <i>Ore ore nalan ni wung kio</i>	Ya ya mainannya si Bun Kiau
Kelompok Pendayung buritan	1 1 1 3 3 1 1 1 1 <i>Watune watu maḷimbulun</i>	Batunya batu bulat
Kelompok Pendayung Haluan	1 5 3 5 3 5 1 1 <i>Ore ore nalan ni wung kio</i>	Ya ya mainannya si Bun Kiau
Kelompok Pendayung buritan	1 1 1 3 3 1 1 1 1 <i>Watune watu maḷimbulun</i>	Batunya batu bulat

Diolah dari sumber

Iramanya disesuaikan dengan tarikan dayung (*balan*) ketika berada dalam air dan dihentak. Pada posisi tangan masih lurus memegang gagang dayung yang sudah berada di dalam air, diucapkan suku kata 'wa' – dan ketika dayung sudah ditarik dan ketika kepalan tangan yang memegang dayung sudah berada dekat dada maka kata terucap adalah suku kata 'tu'. Jadi, dalam satu tarikan, kata 'watu' dinyanyikan. Tarikan dayung kedua pada suku kata 'maḷim'- dan tarikan dayung ke tiga pada suku-kata 'bulun'. Begitu seterusnya. Jika mereka melakukan variasi, maka ada hentakan dayung variasi. Itu jatuh pada kata 'ore' pertama.

Irama dayung terkoordinasi lewat kata-kata dalam lirik di atas. Setelah diulang sampai dua atau tiga kali, para pendayung akan mendendangkan lirik yang lain. Perpindahan dari lirik yang dicontohkan di atas ke lirik yang baru selalu bertautan dalam isi dan maknanya.

Selain *aumbae* dan *maccambo*, bentuk sastra lisan lainnya adalah *mangngimpaŕu*. Ini adalah bentuk sastra lisan yang masih tersisa karena sering diucapkan pada acara-acar tertentu seperti perkawinan dan acara menerima tamu. Ada sejumlah versi yang diucapkan pada setiap kesempatan. Semuanya tergantung pada pengetahuan dari tokoh adat yang didaulat menjalankan fungsinya. Berikut ini salah satu versi *aimpaŕu* atau kata-kata bertuah yang diucapkan ketika acara menurunkan perahu ke laut setelah siap dilayarkan.



<p>Manondon caalan</p> <p>Lori nallangu saalan  Tunumemba tahuwarane alu ta'a  Hahaddine alu marruntii  Taggune alu suma  Ampane alu banarru  Pangataaran nu boro  Pallandangangu uriranne  Aurirangge alu rotale  Pamangunan pariarrangge alune  bungarawan  Pangatarante patorane alu ingi  Pangeleannu senggongge  panampeanggu lendonge  Naribbo pato narangin caalan  Nipalluruggu ahewalle pinamarenta  anambone  Nailar rangkat nitondo sutaharoang</p> <p>Pinanomba sagga pinamanturru  manila  Patidde matoddi'a amamarne  maerron  Pinamare tuwone pinaninggunggu  nusane  Wituin nariaddi tantiro pattuddan  Angkuwannu aramattu rerro  Sasingkobbanggu arrauanggu  henggonna  (CR, 67)</p>	<p>Menurunkan perahu (ke laut)</p> <p>Lori membuat perahu  Memilih lunas kayu kuat  Gadingnya kayu tak mudah patah  Lunas haluan kayu <i>suma</i>  Papannya kayu <i>banaru</i>  Tempat menempatkan <i>boro</i>  Tempat menaruh <i>uriranne</i>  Kemudinya kayu mudah digerakkan  Tiang layar dari kayu cengkik</p> <p>Penguat layar kayu ingatan  Tempat menaruh layar  Serta layar kecil disampirkan  Usai sudah perahu dikerjakan  Berkat kerjasama semua yang taat  diperintah  Kini perahu diangkat dari doknya  dibawa ke laut  Membela arus agar mendorong dari  buritan  Agar cepat melaju ke tujuan</p> <p>Melewati tanjung menyatukan nusa</p> <p>Bintang jadi pedomannya  Berlayar dalam naungan Yang Kuasa  Dinaungi kasih sang Pencipta</p> <p>Terjemahan CR, (67)</p>
--	--

Terjemahan ini sepertinya tidak mampu mewakili makna dalam ungkapan aslinya seperti diakui narasumber kami

Wisara ntatondo, tingi'u rarolo	Kata-kata penghantar tamu
Tabbea siyamangku uappusungan tampa sembantuan Lambae suhagguran pui'u waggean sentara Indi manantangke awanua, mattarei paparentannu	Salam tabik bagi ayahandaku pemegang kuasa wilayah Salam bagi orangtuaku, puncak pemerintahan Yang kini akan meninggalkan kampung, berpisah dengan kami bala mu Seisi kampung, segenap bala Akan berkeliling wilayah berkunjung ke kampung lainnya
Tatau nsoa lorro mbanua Mangintiu'e tanpa mangurilingke wanua	
Amatte sumapia lempangke suondoya	Jalanlah dalam kebaikan, melangkahlah dalam berkat
Arie mawawa rintulu Nirolottu samala lare	Jangan membawa serta kerinduan Karena (kamu) pergi dalam kenangan kami
Nitondo nisawe mbambang Tatumpa usse'a tore wawabidda	Dihentar dalam persahabatan Ibarat kuskus yang melompat tapi ekornya tetap mengait
Ondo ia umama' Saramatte lumempan Sasirungangu arama' rerro Tatillumangngu sambareno henggonu (CR, 67)	Jalanlah dalam berkat Selamat melangkah Kamu dipayungi berkat Tuhan Dinaungi perlindungan Pencipta

Ada *aimpaļu* yang disampaikan dalam upacara perkawinan, peletakan batu ketika mendirikan rumah dan bangunan-bangunan pemerintah, dan sebagainya. Ketika ada tamu pejabat datang berkunjung ke Miangas atau pergi meninggalkan mereka, juga disambut dan dihantar atau dilepas dengan seremoni adat di mana *ratu mbanua* atau *inangngu wanua* menyampaikan ungkapan rasa dan ucapan selamat datang dalam bentuk *aimpaļu'*. Berikut, salah satu versi *aimpaļu* ini biasanya disampaikan ketika tamu sudah berada di dermaga.

Kekhawatiran akan hilangnya sastra lisan di atas bukannya tidak beralasan. Di satu sisi, para tetua adat atau pemangku adat tidak semudah itu menurunkan pengetahuan mereka. Di sisi lain, kaum muda tidak lagi menaruh perhatian untuk mempelajarinya.

Menurut keterangan narasumber kami (CR, 67), tidak semua tokoh adat menguasai dalam arti memahami betul makna dan kata-kata dalam *aimpaļu* tersebut. Ada yang hanya menghafalnya begitu saja tanpa memaknai arti kata baik secara harafiah maupun makna di dalamnya. Apalagi, kata-kata tersebut bukanlah kata-kata dalam bahasa sehari-hari melainkan perbendaharaan kata-kata arkhaisk.

Kekayaan khasanah berbahasa yang kini sudah hilang bersamaan dengan hilangnya tatanan sosial pendukung aktivitas warga yakni pranata pendukung tradisi-bahari – kelompok komunitas pelaut perahu layar – adalah ‘bahasa sasahara’ atau bahasa pantang. Meskipun masih ada nelayan yang melaut untuk menangkap ikan hiu, tetapi kata dalam bahasa sasahara, *mata welo*, kata sasahara untuk *amboļen* atau ikan hiu tidak digunakan lagi. Bahkan nama pulau Miangas, *poilaten* yang juga terbilang sebagai kata sasahara, tidak diketahui oleh generasi muda.

### 3.5 Kesenian

Berbicara tentang kesenian tradisional yang masih dijumpai dalam aktivitas kehidupan sehari-hari di Miangas tidak berbeda dengan jenis kesenian di kepulauan Talaud. Seni pertunjukan yang biasa dilakoni adalah *maccampe* atau *masamper*, *ampawayar* atau empat wayar, dan *mabbare’* yang secara harafiah berbarti berbaris. *Masamper*, dan *ampawayar* merupakan seni pertunjukan yang umum ditemukan di kepulauan Sangihe dan Talaud. Sedangkan *mabbare’* hanya dilakoni oleh warga Miangas khususnya dan umumnya warga Nanusa.

Acara *mabbare* hanya diselenggarakan pada pesta natal dan tahun baru. Usai ibadah natal dan tahun baru, warga mengelompok dan berbaris menari berkeliling kampung diringi bunyi-bunyian, gitar, ukulele, dan harmonika. Peserta *barre* ini tidak mengenal usia dan kelamin. Ada yang membentuk kelompok berdasarkan usia yakni anak-anak, anak dan pemuda-pemudi; ada juga kelompok

orang dewasa. Semuanya berpasangan, membentuk barisan dan melangkah, menari ikut irama lagu harmonika, gitar dan tambur. Pengelompokan *barre* biasanya didasarkan pada satuan organisasi gereja seperti kolom. Sekilas, gerakan-gerakan dalam atraksi *mabbare* mirip gerakan dasar dalam tarian modern seperti dansa dan seni pertunjukan *ampat wayar*. Misalnya, gerakan-gerakan seperti langkah dua pas ke kiri, dua pas ke kanan, sambil melangkah tangan di pinggang, gaya joget, dan sebagainya. Pada atraksi *mabbare*, keseragaman dan irama bersama serta kekompakan kelompok menjadi ukuran hebat tidaknya sebuah kelompok *barre*. Tiupan harmonika dengan langgam mars diiringi pukulan tambur dan petikan senar ukulele serta gitar akan menghidupkan gaya para penari yang berbaris di depan pemain alat musiknya. Penari hanya melakoni gerakan. Yang terdengar hanya suara harmonika, gitar, ukulele serta pukulan tambur. Peralihan dari lagu riang ke lagu-lagu bergaya waltz atau salsa merupakan variasi sekaligus para penari diberi kesempatan bernafas. Jika ada dua kelompok *barre* yang akan berpapasan, masing-masing menampilkan permainan terbaiknya terutama gaya riang dan hidup-hidup. Tidak ada upaya saling menghalangi jalan antara kelompok yang satu dengan yang lain. Rasa toleransi muncul ketika kedua kelompok berpapasan. Adakalanya, ketika ketemu, mereka menyatu dan saling mencari pasangan baik itu sesama perempuan, sesama laki-laki, atau laki-laki dengan perempuan, tidak menjadi masalah. Pasangan yang dipilih sesuai dengan urutan baris kelompoknya. Dan kata *barre* itu sendiri berarti berbaris. Lamanya mereka bergabung tergantung pada lagu yang dimainkan. Adakalanya selama satu lagu yang diulang-ulang hingga dua atau tiga kali.

Kunjungan tamu seperti pejabat negara (menteri, gubernur, bupati), aparat keamanan, politisi, menjadi ajang pertunjukan seni. Dua jenis atraksi yang umum dibawakan adalah *cakalele* atau tari perang dan 'tari lenso' kreasi baru. Atraksi *cakalele* dan 'tari lenso' diperankan setelah tamu menginjakkan kakinya di dermaga dan

disambut oleh tokoh adat dengan ucapan selamat datang dalam bentuk *aimpaļu* bahasa daerah. Pasukan *cakalele* membentuk barisan mengawali rombongan yang berjalan kaki dari dermaga sampai Aula Kecamatan. Jika tamu yang datang adalah menteri atau gubernur, atraksi utama di dermaga adalah 'tari lenso' kreasi baru. Setelah itu, dalam perjalanan menuju tempat pertemuan, rombongan dikawal oleh penari *cakalele*. Sebutan 'tari lenso' kreasi baru dikatakan oleh narasumber (AT & CR). Kreasi baru menurut mereka karena peragaan tarian itu sudah berbeda. Pada tahun-tahun 1950-an, ketika keduanya masih anak-anak, setiap kunjungan *Jogugu*, berlanjut dengan Kepala Kecamatan, yang menarikan 'tari lenso' adalah nenek-nenek mereka dan diiringi gendang dan gong. Ritmenya khas dan syahdu dengan kekuatannya pada gerak tangan dan kaki. Begitu pula dengan mimik muka yang merepresentasikan suasana ritus. Nenek-nenek yang menjadi penari ini terpilih bukan karena kecantikannya tetapi karena status sosial mereka sebagai warga yang disegani di kampung. Dahulu mereka mengenakan baju dari kain koffo dengan model seperti baju kurung, setelah itu ada yang pakai kain sarung dan kebaya. Sekarang, meskipun mereka masih mengenakan kain sarung dan kebaya, gerakan tangan dan kakinya hilang beralih ke gerakan bokong dan dada yang seakan menggoda naluri birahi, ungkap kedua narasumber ini. Mereka menari berpasangan seperti menarikan tari *ampawayar*. Penampilan ibu-ibu yang menarikan tari lenso ini pun sudah didandani berlebihan. Waktu nenek saya menari, tidak perlu pakai gincu (maksudnya lipstick) karena bibirnya memang sudah merah karena pemakan sirih-pinang. Sudah paling rapi, rambutnya dikonde. Sekarang, gincunya merah sekali, bedaknya putih, sehingga terlihat lucu, lanjut pak CR (67).

Atraksi seni yang berhubungan dengan tradisi bahari seperti *maccambo* atau *sasambo* yakni mendendangkan prosa-lirik dengan irama dayung, tinggal kenangan di kalangan generasi tua. Begitu pula dengan kebiasaan mendendangkan pantun-pantun

untuk menidurkan anak di ayunan, telah digantikan dengan lagu-lagu gereja dan lagu-lagu rohani lainnya. Sedangkan ibu-ibu muda lebih senang menyanyikan lagu-lagu pop kalau mau menidurkan anaknya.

**Gambar 3.2** Salah satu seni-tari yang biasa digunakan untuk menjemput tamu



Dewasa ini bentuk kesenian khususnya seni suara yang masih dilakoni adalah *maccampe* atau *masamper*. Ada dua pemahaman untuk kata *maccampe*. Pertama, *maccampe* yang diartikan sebagai pertunjukan seni suara dalam bentuk koor gereja. *Maccampe* dalam kata lain disebut *matunju'* prakteknya sama dengan *masamper* dalam artian umum yang dilakoni dalam seni pertunjukan warga Nusa Utara atau Sangihe dan Talaud. Jika bentuk pertama lebih khusus pada acara-acara gereja baik dalam peribadatan di rumah gereja maupun dilombakan dalam konteks perayaan gerejani; bentuk kedua sering ditemukan dalam acara-acara pesta perkawinan hingga pengisi acara penghiburan. Kegiatan *maccampe* atau *ma'tunju* di acara-acara seperti ini berupa menyanyi bersama yang dipimpin oleh peserta secara bergilir. Tempat duduk diatur melingkar. Ketika menyanyi, seorang atau dua orang yang terpilih memimpin lagu berjalan dalam lingkaran, memegang setangkai bunga yang diarahkan kepada seluruh peserta satu per satu. Jika sebuah lagu selesai dinyanyikan, maka peserta yang kepada siapa bunga itu ditunjukkan, dia harus berdiri menggantikan peserta yang memimpin sebelumnya. Tugasnya adalah memilih

dan memimpin lagu yang akan dinyanyikan bersama. Begitu seterusnya.

Hal menarik dalam acara *ma'tunju'* ini adalah dalam hal pilihan lagu. Secara umum lagu-lagu yang dinyanyikan dapat diklasifikasikan atas tiga kelompok lagu yaitu (1) lagu-lagu percintaan; (2) lagu-lagu tentang kehidupan; dan (3) lagu-lagu rohani. Acara *ma'tunju* biasanya dimulai sekitar jam 9 malam atau setelah acara inti – entah itu ibadah kalau berkenaan dengan upacara penghiburan dan syukuran – dan berlangsung hingga subuh. Pada jam-jam awal peserta akan menyanyikan lagu-lagu percintaan jika *ma'tunju* ini merupakan rangkaian dari pesta syukuran dan perkawinan. Menjelang tengah malam, dinyanyikan lagu-lagu yang berhubungan dengan kehidupan, meratapi nasib, dan sebagainya. Setelah menjelang subuh, barulah dinyanyikan lagu-lagu rohani. Sebaliknya, kalau *ma'tunju* itu merupakan rangkaian dari acara penghiburan, maka lagu-lagu percintaan tidak akan dinyanyikan, selain lagu-lagu yang meratapi nasib dan lagu-lagu rohani.

Mengulang sebuah lagu terutama liriknya biasanya memperoleh sanksi. Sedangkan menyanyikan lagu yang sama tapi liriknya berbeda, misalnya dalam lagu-lagu gereja setiap lagu terdiri atas beberapa bagian, maka hal itu dibolehkan. Itulah sebabnya maka setiap warga yang mau ikut acara ini harus menguasai puluhan bahkan ratusan lagu. Bagi seorang pemula, untuk ikut dalam acara seperti ini tidak perlu khawatir. Cukup ia memilih seseorang yang dianggap sebagai mentornya. Ketika ia mendapat giliran, maka si mentornya yang secara spontan menyanyikan lagu pilihan. Pada kesempatan *ma'tunju* seperti ini kadang terjalin perkenalan antar peserta muda-mudi yang akan mengarah pada hubungan lebih akrab dan perjodohan. Hal seperti ini sangat kentara ketika seseorang tertunjuk (kena giliran) membawakan lagu. Ia dapat mengatur langkahnya dan memperkirakan, ketika lagu akan berakhir, dia tepat berdiri di depan seseorang yang ditaksirnya. Jika mereka saling suka, maka pertanda kedua adalah

pada pilihan lagu, terutama liriknya. Jika liriknya ibarat berbalas-pantun, itu sudah pertanda. Adakalanya, ada seseorang – terutama orang dewasa yang sudah biasa dengan acara ini – yang bertindak sebagai mentor memilihkan lagu untuk anak muda yang mereka ingin jodohkan. Tidak jarang perilaku berbalas-pantun dalam acara *ma'tunju'* seperti ini di kalangan lelaki dan perempuan yang sudah berumah tangga, dapat mengundang kecurigaan pasangan mereka. Kalau tokh ada lelaki yang sudah beristri dan iseng menjatuhkan pilihan kepada seorang wanita berulang kali, si wanita ini secara sportif menerima bunga yang diserahkan tetapi memilih lagu yang tidak bertautan. Misalnya, ketika si pemberi bunga berulang kali menyanyikan lagu percintaan, dia boleh membalasnya dengan lagu-lagu gereja atau pun lagu tentang kehidupan. Jawaban atau respons seperti ini menjadi semacam penegasan kepada warga tentang bagaimana sikap seseorang terhadap orang lain.

Di atas telah dinyatakan bahwa pantang mengulang sebuah lagu. Ada bermacam ragam sanksinya. Sanksi yang paling sederhana adalah dia tetap ikut berjalan-jalan menemani seseorang yang memimpin lagu. Ada juga sanksi lain yang cukup memalukan. Ketika warga masih menggunakan lampu semprong berbahan bakar minyak tanah, arang semprong lampu itulah yang dijadikan alat hukuman yaitu dengan cara mengoles arang semprong ke wajah si pelaku yang memilih dan mengulang lagu yang sudah dinyanyikan. Pengenaan hukuman tidak memandang usia dan jenis kelamin. Pengenaan hukuman seperti ini ditanggapi dengan canda-tawa dan bahkan menjadi semacam pendorong agar dia lebih banyak mempelajari lagu-lagu sebelum turun ke arena *ma'tunju*. Menariknya acara ini karena jarang sekali warga menyanyikan lagu-lagu pop yang dinyanyikan oleh penyanyi maupun band-band musik sekarang.

Menurut keterangan narasumber (AT, 67) yang bertugas lama sebagai guru, jika dibandingkan dengan masa ketika ia baru bekerja sebagai guru di Miangas pada tahun-tahun 1970-an,



masa itu ‘keramaian’ sebutan yang umum digunakan untuk acara lanjutan dari sebuah pesta perkawinan adalah *ma’tunju*. Sejak tahun 1990-an, merebaknya penjualan *sound system* hingga ke pelosok Miangas, kegiatan *ma’tunju* ini semakin terpinggirkan dan digantikan oleh lagu-lagu band yang dinyanyikan oleh penyanyi lokal atau menurut dia ‘berkaraoke’ atau sebutan setempat adalah ‘disko’. Jadi, suasana dalam ‘keramaian’ yang semula dinikmati bersama dalam artian setiap warga menjadi penonton sekaligus pelaku dalam acara *ma’tunju*, pada kesempatan mana mereka memperoleh ruang-aktualisasi diri, dengan kehadiran ‘disko’, mereka kehilangan satu peran yaitu penginisiatif dalam hal pilihan lagu. Pada acara ‘disko’ yang dapat mereka lakonkan adalah berjingkrak-jingkrak mengikuti irama musik. Agar tidak malu dan percaya diri berjingkrak-jingkrak, maka bekal dalam hal *bagate*, atau minum minuman beralkohol menjadi pilihan. Hal ini berbeda dengan suasana pada acara *ma’tunju* yang menuntut tingkat kesadaran yang prima agar mampu mengingat lagu-lagu yang sudah dinyanyikan dan kemampuan membawakan lagu dan syair yang baru, serta berkesinambungan syairnya dengan lagu-lagu sebelumnya. Kini, acara *ma’tunju* tinggal dilakoni untuk acara penghiburan saja, atau dilakukan oleh keluarga-keluarga yang tidak mampu menyewa perlengkapan ‘disko’.

### 3.6 Sistem Pengetahuan

Warga Miangas, terutama generasi tua yang sempat menjalani kehidupan dalam tradisi bahari masih mengetahui sistem pengetahuan tradisional seperti menghitung nama dan posisi bulan di langit, posisi bintang, serta arah atau kiblat dan mata angin. Pengetahuan yang menjadi modal utama dalam aktivitas berlayar ini mereka anggap penting mengingat dua hal. Pertama, letak pulau Miangas yang terpisah jauh dari gugusan pulau-pulau Talaud. satu-satunya daratan yang dekat adalah semenanjung selatan

bagian timur dari pulau Mindanao, yaitu tanjung San Agustin. Itulah sebabnya, pengetahuan tentang perbintangan sangat mereka perlukan. Bagi seorang warga Miangas yang sudah memberanikan diri memegang kemudi perahu layar, berarti ia sudah dibekali oleh orang-orang tua dalam hal pengenalan posisi-posisi bintang pada setiap bulan dan perkiraan pulau yang dituju. Tidak jarang sebelum berlayar pertama kali, orang-orang tua sering menanyai kemampuannya dan menyertakan seseorang yang dianggap paham untuk menemani si pemula. Dalam dunia pelayaran, perlakuan seperti itu dapat dipahami karena “kompas” dan “peta pelayaran” adalah barang langka di kalangan pelaut Miangas. Kedua, letaknya yang berada di sisi utara katulistiwa tepian barat Samudera Pasifik, di perairan sekitar pulau Miangas merupakan daerah pusaran arus yang sering menyeret para pelaut sampai terdampar di kepulauan Palau hingga Jepang atau ke arah timur hingga pulau-pulau Melanesia. Juga di kawasan ini merupakan titik awal pembentukan awan-awan penanda taifun yang sering melanda kepulauan Filipina hingga Jepang. Para pelaut Miangas mengidentifikasi awan-awan penanda taifun dengan ciri-ciri, berwarna pekat dan pada bagian bawah kumpulan awan ini muncul ujung bagaikan belalai gajah, meruncing ke bawah. Mereka sebut fenomena itu sebagai *rambutan*. Ada pelaut yang melawan fenomena alam seperti itu dengan cara duduk di haluan perahu kemudian mengucapkan mantra sambil jari telunjuknya digerak-gerakan ke arah menjauh dari posisi perahunya. Mantranya disebut *a'ambon* sedangkan perilaku melafalkan mantra tadi disebut *mangngambo*. Sambil itu, mereka menyiapkan layar serta tali temalnya. Kalau sebelumnya layar diangkat penuh, dalam keadaan seperti itu layar diturunkan setengah dan tali-temali penguat tiang diberi cadangan. Jika upaya tersebut tidak berhasil, yang tertua di perahu akan memeriksa satu per satu kelasi dan penumpang. Istilahnya *ma'bu'a* artinya memberi pengakuan apabila di antara mereka sebelum berlayar apakah ada yang melakukan tindakan tercela, terutama melakukan ‘hubungan

gelap' atau *wa apulu* baik dengan anak gadis atau istri orang, kalau dia laki-laki, atau sebaliknya jika ada penumpang wanita, apakah ada yang melakukan hal seperti di atas. Pengakuan-pengakuan seperti itu dipandang dapat meredakan pembentukan awan tai-fun yang mengganggu pelayaran mereka serta menghindarkan berbagai gangguan. Pengakuan tidak perlu terbuka ke semua awak dan penumpang. Cukup kepada yang tertua dan nakhoda. Nanti setelah itu, baik nakhoda maupun yang dituakan tadi memanjatkan doa mohon ampunan.

Pengetahuan tradisional seperti menghitung nama dan posisi bulan di langit, posisi bintang, masih digunakan dalam hal-hal tertentu baik dalam hal bercocok tanam maupun penentuan waktu beraktivitas sehari-hari. Dalam hal bercocok tanam, masih banyak warga yang menanam benih dengan melihat posisi bulan di langit. Kalau tokh mereka sudah tidak tahu, mereka menanyakan hal itu kepada orang tua, terutama *inangngu wanua* dan tokoh adat lainnya<sup>16</sup>.

Untuk menentukan kapan sebaiknya hari yang tepat untuk peletakan batu, penempatan tiang raja, menebang kayu – bagi yang membangun rumah – atau mementukan hari perkawinan, masih banyak warga yang mengikuti pedoman atau pengetahuan tradisional tersebut. Dalam hal mendirikan rumah, perhitungan waktu baik dan kurang tepat dalam beberapa jenis pekerjaan, juga menjadi pengetahuan tambahan dari para tukang kayu. Selain para tukang kayu dan petani, perhitungan itu masih juga diperhatikan oleh para nelayan generasi tua. Nelayan generasi muda yang terbiasa menggunakan *pambut* sudah tidak menghiraukannya. Alasan dari para nelayan generasi tua, pada saat-saat posisi bulan di langit dalam hitungan mereka jatuh pada hari ke berapa, pergerakan arus selain tidak menentu juga lebih kuat dari biasanya. Begitu pula dengan cuaca terutama curah hujan. Narasumber kami (CR,

16 Tentang hal peran *inangngu wanua* lihat sub-bab di atas.

67) menuturkan perhitungan bulan seperti yang dipaparkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.x Perhitungan bulan di langit dalam sistem pengetahuan orang Miangas**

No	Perhitungan dlm bhs Indonesia	Bahasa Talaud (dialek Miangas)	Keterangan singkat
01.	Bulan hari pertama	<i>Ajatto</i>	Saat baik untuk menanam benih tanaman tahunan
02.	Bulan hari kedua	<i>Aruane</i>	
03.	Bulan hari ketiga	<i>Atallune</i>	
04.	Bulan hari keempat	<i>Ṙarra</i>	Saat yang sangat dihindari nelayan kalau melaut Curah hujan tinggi
05.	Bulan hari kelima	<i>Ṙarra</i>	
06.	Bulan hari keenam	<i>Dape</i>	
07.	Bulan hari ketujuh	<i>Ata'</i>	
08.	Bulan hari kedelapan	<i>Lattu</i>	
09.	Bulan hari kesembilan	<i>Naworio</i>	Ditandai dengan tingginya curah hujan
10.	Bulan hari kesepuluh	<i>Nawora'a</i>	
11.	Bulan hari kesebelas	<i>Pangumpia</i>	Saat baik untuk menanam, peletakan batu, penentuan hari perkawinan, dsbnya
12.	Bulan hari keduabelas	<i>Pau'</i>	Dianjurkan untuk tidak beraktivitas
13.	Bulan hari ketigabelas	<i>Ara alan</i>	
14.	Bulan hari keempatbelas	<i>Atone</i>	
15.	Bulan purnama	<i>Dumaria</i>	Saat baik untuk menanam kelapa

Sumber: diolah dari para narasumber CR (67) Pape'a (72) dan dokumen

Pengetahuan tentang hari-hari baik berdasarkan posisi bulan di langit di atas akan dipaparkan dalam bagian ini. Tetapi sebelumnya, perlu juga melihat sistem pembagian waktu atau warga menyebutnya *Ora'* yang bisa berarti jam atau juga saat. Selanjutnya, perlu juga melihat pengetahuan tentang orientasi serta mata angin karena semuanya saling kait mengkait. Tidak seluruh

hari berdasarkan posisi bulan di langit itu dapat dipandang baik. Semua berkaitan dengan saat dan orientasi.

Klasifikasi tentang *Ora'* didasarkan pada (1) letak matahari, (2) pasang surut air laut, dan (3) tanda-tanda alam. Pada dasarnya, penentuan saat berdasarkan letak matahari hampir sama dengan yang ditemukan dalam peradaban umat manusia, yakni pembagian atas siang dan malam. Siang dipilah atas pagi, siang dan senja hari. Begitu pula dengan malam hari. Pembagian seperti ini tidak banyak berbeda hanya bagi warga yang masih menggunakan penanda lokal, saat subuh ditandai dengan saat ayam berkokok (*manu' mangngu'u*), dan dipilah atas saat ayam berkokok pertama, saat ayam berkokok kedua, dan saat ayam berkokok ketiga kalinya. Pagi hari disebut *dua'allo*. Siang hari disebut *allattune*. Dan sore hari disebut *bawallo*. Pada saat senjahari menjelang malam, ada pemilahan atas kepekatan malam. Masa menjelang malam ada saat yang disebut *pa'aillala ndua sangka tuṛan*, harafiah saat di mana hanya dua orang bersaudara yang saling mengenal. Atau saat-saat di mana hanya orang dekat yang dapat diidentifikasi baik dari perawakannya dan gerak tubuhnya.

Klasifikasi *ora'* berdasarkan pasang surut air laut dipilah atas pasang-naik (*rua'*) dan pasang-surut (*saha'*). Saat-saat pasang naik dan pasang surut pun ditandai dengan beberapa istilah misalnya, *mammoḷo saha'*, harafiah *mammoḷo* berarti menggunting dan *saha* berarti pasang-surut. Arti sesungguhnya, saat menjelang air akan mencapai titik terendah ketika pasang surut.

Pergerakan pasang-surut dan pasang-naik mempengaruhi pergerakan arus. Misalnya, jika pasang-naik arus di pesisir barat pulau Miangas arus bergerak dari arah selatan ke utara, maka sebaliknya pada saat pasang-surut, air laut akan bergerak sebaliknya. Itu pergerakan arus di pesisir. Lain lagi dengan pergerakan arus utama yang agak jauh dari pulau. Pergerakan pasang-surut dan pasang-naik juga dihubungkan dengan perilaku satwa, terutama ayam jantan (*jago*) dan burung *sait'ta* (*halcyon enigma*). Ada kokok ayam

yang menandai pasang-naik, dan pasang-surut air laut, begitu juga dengan burung *sait'ta*. Tidaklah mengherankan kalau setiap berlayar jauh, pelaut Miangas dan Nanusa pada umumnya selalau membawa ayam jantan dalam kurungan.

Pengetahuan tentang mata angin tidak berbeda dengan pengetahuan dalam peradaban umat manusia lainnya. Empat mata angin utama yaitu Utara – Timur – Selatan – Barat, dan mata-mata angin di antaranya yang kesemuanya berjumlah 16 mata angin. Tetapi dalam tradisi bahari di kepulauan Sangihe dan Talaud terdapat 17 mata angin. Nama-nama mata angin dan padanannya dalam bahasa Talaud dialek Miangas dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2 Nama 17 mata angin dalam bahasa Talaud dialek Miangas**

No.	Nama mata angin (Bhs. Indonesia dan bhs Inggris)	Nama mata angin (bhs Talaud dialek Miangas)
01.	Utara ( <i>North</i> )	<i>Sawanna'</i>
02.	Utara Timur Laut ( <i>North north East</i> )	<i>Lawa'ci i' u sawanna'</i>
03..	Timur Laut ( <i>North East</i> )	<i>Lawa' ci i'</i>
04.	Timur Timur Laut	<i>Lawa'ci i' u ra i'</i>
05.	Timur ( <i>East</i> )	<i>Da i'</i>
06.	Timur menenggara	<i>Maɣrai nda i'</i>
07.	Tenggara ( <i>South East</i> )	<i>Maɣrai</i>
08.	Selatan menenggara	<i>Maɣrai timu'</i>
09.	Selatan ( <i>South</i> )	<i>Timu'</i>
10.	Selatan Barat Daya	<i>Taɣrangangngu timu'</i>
11.	Barat Daya ( <i>South West</i> )	<i>Taɣrangangngu</i>
12.	Barat Barat Daya	<i>Taɣrangangngu waɣra'</i>
13.	Barat ( <i>West</i> )	<i>waɣra'</i>
14.	Barat Barat Laut	<i>Poɣoangngu waɣra'</i>
15.	Barat Laut ( <i>North West</i> )	<i>Poɣoan</i>
16.	Utara Barat Laut	<i>Poɣoangu sawanna'</i>
17.	Utara utara barat laut	<i>mian</i>

Sumber: Diolah dari para narasumber CR (67) & Pape'a (72) dan dokumen

Dalam peta bumi yang dipelajari di sekolah, arah utara senantiasa berada di atas dan selatan di bawahnya. Pelajaran ini tidak berpengaruh bagi warga Miangas maupun Talaud pada umumnya. Klasifikasi arah di kalangan warga yang tercermin pada kata-kata *ire'e* ke arah atas atau naik, *inawa'* ke arah bawah atau turun, *inai* ke arah yang sama tinggi, pada skala tertentu berhubungan dengan keadaan geografis. Ketika jaraknya melampaui batas-batas tertentu keadaan seperti itu tidak berlaku. Ada konsep klasifikasi dalam hal orientasi yang lebih luas. Misalnya, kalau warga mau ke ladangnya di sekitar gunung kota, maka orientasi yang digunakan adalah kata *ire'e su Ota*. Kebetulan selain gunung Kota berada di sebelah utara perkampungan, juga berada di ketinggian. Masih ke arah utara yakni kalau berlayar menuju tanjung San Agustin di Mindanao, sebutan arah yang digunakan bulan lagi *ire'e* atau ke atas, melainkan *inai su Mangindao* atau juga *inai su Rabbo*, (mau pergi ke Mindanao atau mau pergi ke Davao). Sebaliknya, jika seorang warga berada di perkampungan lalu mau ke tanjung Bora yang letaknya di sebelah selatan, maka ia menggunakan kata *inawa cu wora* yang mempunyai makna ke arah bawah. Masih ke arah yang sama yaitu ke selatan arah pedoman di mana Melonguane dan Manado berada, maka sebutan yang digunakan adalah *ire'e su Manaro* atau *ire'e su Melonguane* (mau pergi ke arah atas, Manado atau mau pergi ke arah atas, Melonguane).

Kehadiran anak-anak Miangas yang telah menyelesaikan pelajarannya dengan cara magang di Rumah-rumah Sakit masa lalu dan kembali ke Miangas bekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat, tampaknya berpengaruh terhadap sistem pengetahuan obat-obat tradisional. Sebelum adanya paramedis dan "mantri kesehatan", ada warga yang memiliki pengetahuan tradisional tentang obat-obatan. Terutama warga yang dipercaya membantu proses melahirkan atau *mama biang* atau juga dikenal sebagai *biang kampung*. *Mama biang* atau bidan yang tidak mendapat pelatihan secara medis kecuali mewarisinya dari ibu atau neneknya yang juga

berprofesi sebagai *mama biang* biasanya memiliki pengetahuan itu. Dewasa ini tidak ada lagi profesi *mama biang* karena sudah ada paramedis yang membantu persalinan. Salah satu narasumber yang ibunya telah almarhumah dan berprofesi sebagai *mama biang* sempat mengisahkan kebiasaan ibunya kalau menolong orang hamil. Menurut (MT, 74), sejak seorang ibu hamil muda, ibunya sudah diminta untuk merawat. Rawatan rutin adalah dengan pijatan agar posisi jabang bayi dalam kandungan tetap pada tempatnya sehingga kemungkinan lahir sungsang tidak akan terjadi. Sebulan atau dua bulan menjelang saat melahirkan, si ayah sudah menyiapkan kayu bakar. Ketika si ibu melahirkan, *mama biang* menyediakan ramuan yang harus diminum oleh ibu. Kumpulan ramuan ini disebut *abba'* atau jamu yang fungsinya bersifat antibiotik sekaligus mengembalikan tenaga yang terkuras sewaktu mengedan, terdiri dari kulit-kulit kayu antara lain – yang sempat diingatkannya adalah kulit kayu turi (*sesbania grandiflora*) dan sejenis mangrove yang disebut kayu tin atau *parɽappa* (*rizophora*) – serta dedaunan termasuk kunyit dan jahe yang direbus lalu diminum oleh si ibu. Selain diminum, ada ramuan yang dikompres untuk mencegah kemungkinan gejala 'darah putih naik di kepala.' Ada juga dedaunan yang dijadikan sayur untuk merangsang keluarnya air susu.

Pengetahuan tentang obat-obatan pengganti norit untuk menghentikan diare antara lain makan buah pisang yang masih mentah. Ada juga yang menggunakan batang kayu waru, dibakar dan arangnya dimakan. Akar kelapa, air serta tempurung kelapa muda, sabut kelapa juga dijadikan bahan obat-obatan. Kulit pelepah pisang juga dalam pengetahuan warga Miangas merupakan obat luka. Pengetahuan tentang obat-obatan tradisional ini menarik untuk dikaji secara khusus dan kalau perlu ada semacam uji laboratorium agar ada pengobatan alternatif yang tersedia di alam serta mudah dan murah biayanya.



### 3.7 Sistem Religi (Kepercayaan)

Mengungkap sistem religi atau kepercayaan warga Miangas mengharuskan kita untuk melihat bagaimana terjadinya pertemuan antar-budaya yang sudah dialami paling tidak dalam satu dua generasi yang lampau. Ulaen, Wulandari dan Tangkilisan dalam karya mereka berjudul: Sejarah Wilayah Perbatasan Miangas – Filipina, 1928 – 2010: Dua Nama Satu Juragan (2012:32-50) memaparkan bagaimana terbentuknya apa yang mereka sebut dengan “ruang-jejaring Melayu” di kawasan Laut Sulu, Laut Mindanao, dan bagian utara Laut Sulawesi, sejak terjadinya migrasi “bangsa Melayu” baik dari Semenanjung Melaka, Pulau Sumatera dan bagian Utara Borneo ke pulau-pulau Sulu, Mindanao kemudian menyebar ke seluruh Filipina. Itu terjadi sejak abad ke- 14, dan pulau Miangas yang berada dekat dengan Mindanao – menurut para penulis di atas – terhisab dalam “ruang-jejaring Melayu”. Memasukkan pulau Miangas ke dalam “ruang-jejaring Melayu” mereka dasarkan pada adanya relasi-relasi niaga yang sudah terjalin antara warga pulau-pulau Nanusa dan warga pulau Miangas khususnya dengan pusat perniagaan di kesultanan Sulu. Pertimbangan kedua, adalah adanya pengetahuan navigasi dan perbintangan serta penguasaan mantra-mantra yang berhubungan dengan aktivitas pelayaran. Pertimbangan yang tidak mudah dipersoalkan adalah kutipan dari penulis Belanda, Willem Johan Bernard Versfelt (1933) yang ditempatkan pada catatan kaki 104 dalam karya ketiga penulis di atas dan kembali kami kutip di sini, yakni: “...the number of inhabitants, formerly Mohammedans, afterwards converted by Protestant Missionaries from the Island of Celebes” (... sejumlah penduduk mula-mula pemeluk agama Islam, kemudian dikristenkan oleh pekabar injil protestan dari Sulawesi). Apakah keterangan Versfelt ini merujuk pada kehadiran pendeta Kroll yang ikutserta dalam kunjungan Residen Jellesma ke Miangas pada tahun 1895? Hal itu tidak jelas dan juga tidak perlu – dalam

tulisan ini – untuk ditelusuri lebih lanjut. Karena yang utama dalam bagian ini adalah melihat sistem kepercayaan yang ada dalam masyarakat.

Katakanlah agama Kristen sudah dianut setidaknya sejak saat pembaptisan sebanyak 254 warga Miangas oleh Pendeta Kroll. Hal itu belum tentu menjamin terjadinya proses kristenisasi dalam artian bahwa warga yang sudah dibaptis ini mendapat pengajaran tentang ajaran-ajaran kristiani, atau telah terjadi sebuah transformasi sistem nilai dari sistem nilai yang diwarisi turun-temurun yang tidak bersumber pada ajaran agama ke sebuah sistem nilai baru seiring dengan mereka memeluk agama baru baik itu Islam maupun Kristen. Anggapan ini didasarkan pada sejarah pekabaran injil di pulau-pulau Talaud mulai dari generasi 4 pendeta tukang (1857) yang menetap di pulau-pulau Salibabu, Kabaruan, Karakelang dan tidak dapat berbuat banyak hal termasuk berkunjung ke pulau Miangas. Begitu pula halnya dengan pekabar injil generasi Brilman (1927). Tak seorang pun yang ditempatkan di pulau-pulau Nanusa apalagi di pulau Miangas. Meskipun Lam pada tahun 1926 memberi kesaksian bahwa penduduk Miangas semuanya beragama Kristen, tetapi dalam kehidupan sehari-hari dewasa ini masih ditemukan anggapan-anggapan yang sifatnya menggambarkan adanya sistem religi atau kepercayaan masa lalu. Seperti apa sistem kepercayaan itu akan dipaparkan berikut ini.

Brilman (2000:75-108) membedakan antara agama kristen yang mereka siarkan di kepulauan Sangihe dan Talaud dengan sistem religi atau kepercayaan yang ada dengan sebutan: 'agama penduduk dahulu kala' (bab IV). Brilman menguraikan bab itu mulai dari penjelasan tentang; 'kepercayaan mana', 'penyembahan orang mati', 'kepercayaan pada roh dan dewa-dewa', 'ketakutan pada beberapa kuasa', 'ketakutan terhadap penyihir', 'ketakutan terhadap jiwa orang mati', 'ketakutan terhadap roh-roh dan dewa-dewa', 'pengabdian pada dewa-dewa', 'upaya menyelamatkan diri dengan menguasai amulet-amulet atau jimat-jimat', 'mantra-

mantra', 'perdukunan', 'tukang sihir', 'praktek shamanisme', 'tidak adanya rasa terima kasih kepada dewa-dewa', dan 'tidak adanya harapan akari keabadian'.

Kepercayaan 'mana' diperkenalkan oleh seorang pekabar Injil yang juga etnograf berkebangsaan Inggris bernama Codrington. Ia menemukan konsep ini di kalangan penduduk di kawasan Pasifik. Adapun yang dimaksud dengan 'mana' adalah anggapan bahwa di alam ini, entah itu di tetumbuhan, pepohonan, berdiam 'tenaga sakti penuh rahasia'. Tenaga ini dapat mendatangkan keuntungan maupun malapetaka tepergantung pada penyebabnya. Anggapan serupa – meskipun tidak sama persis – di kalangan warga Miangas adalah apa yang mereka sebut *rimbuwu*. Paling utama adalah *rimbuwu mbanua* atau 'sukma negeri'. Jika *rimbuwu mbanua* terganggu oleh perilaku warga desa, maka ia akan menghilang entah ke mana. Para narasumber tidak dapat menjelaskan hal itu, selain akibatnya adalah datangnya bencana seperti penyakit dan peristiwa kematian yang terjadi beruntun di tengah masyarakat.

Kepercayaan yang bertautan dengan konsep 'mana' di atas adalah anggapan bahwa di setiap tempat entah itu di pulau Baronto atau tanjung Wora, tanjung Natundu, tanjung Nioŕo, tanjung Liwuang, tanjung Dapapa, tanjung Ondene, tanjung Panci, teluk Lobo (tempat dermaga sekarang), di puncak bukit Kota, Batu, Soŕo, Taniyoh, Palia, Ondene (bukit) atau di empat genangan rawa, masing-masing di Amari, Banga, Sala, Larawan, dan rawa yang berada di selatan perkampungan yang dipenuhi mangrove, kesemuanya memiliki *panunggu* atau penjaga dalam rupa 'jiwa'. Setiap *panunggu* ada yang disifatkan sebagai jantan yang garang, betina pemarah, atau pun sebaliknya. Bahkan sampai empat buah meriam yang kini tersimpan di bawah *shelter* beton di gunung Kota dianggap mempunyai penjaganya dalam rupa jiwa. Sudah menjadi ceritera umum, konon, bahwa pernah ada kapal besi yang mau membawa salah satu meriam untuk disimpan di Tahuna, ibukota

kabupaten Sangihe dan Talaud waktu itu, hampir saja kapal itu terbalik di pelabuhan ketika memuat meriam yang beratnya tidak sampai 30 kg. Kapal tersebut nanti kembali ke posisi semula dari kemiringannya setelah meriam itu dikembalikan ke darat dan dibawa langsung ke tempatnya semula. Hal itu terjadi karena *panunggu* meriam tersebut turut serta ke kapal.

Agar warga tidak diganggu oleh *panunggu* yang ada di setiap tempat di atas, maka dianjurkan agar setiap mendekati tempat-tempat tersebut, warga harus mendeham atau batuk-batuk kecil, kalau perlu berbicara minta permisi lewat dan dilarang sama sekali membuang ludah di tempat itu apalagi buang air kecil/besar. Anjuran untuk mendeham dimaksud agar jika *panunggu* tadi berada di jalan yang akan dilalui, ia akan menghindar. Karena kalau warga yang tidak bisa melihat rupanya lalu bersentuhan dengannya, kejadian itu akan membawa petaka seperti sakit bahkan meninggal dunia. Kepercayaan adanya *panunggu* tidak hanya berdiam di tempat-tempat tadi tetapi juga di rumah penduduk. Setiap rumah semi permanen dan permanen dianggap memiliki *panunggu*. Jika *panunggu*-nya bersifat jantan dan garang, maka ada kesan bahwa rumah tersebut menyeramkan. Penghuninya atau pemilik rumah akan selalu terganggu penyakit. Agar aman dari gangguan seperti itu, ada cara yang mereka tempuh. Pertama, dengan mengusir *panunggu* bersifat jahat dan mengundang *panunggu* yang baik, agar rumah terasa nyaman dan adem, penghuninya dijauhkan dari malapetaka. Kedua, mereka lawan dengan kuasa agama. Sebelum menghuni rumah baru dibangun, pemilik rumah mengundang pendeta, tokoh masyarakat, kerabat, dan terutama tukang yang mengerjakannya untuk melaksanakan ibadah syukuran yang dipimpin oleh pendeta atau rohaniwan lainnya.

Kepercayaan yang berhubungan dengan konsep 'mana' dapat ditemukan di kalangan warga yang memiliki potongan kayu atau bebatuan yang diperoleh lewat mimpi. Salah seorang narasumber kami menyimpan potongan akar kayu Santigi (*Pemphis acidula*)

yang diambilnya di tanjung Ondene tepat bulan purnama muncul di ufuk laut atau baru terbit. Potongan akar kayu Santigi ini disebutnya *alu mbanua* dan dipandang memiliki khasiat seperti menyembuhkan penyakit, menolak bala, mampu melawan dan meredam niatan tidak baik dari orang tertentu. Potongan akar itu tidak pernah terpisah darinya. Setiap ia berjalan selalu dikan-tongi. Bahkan, menurutnya, kalau dia datang di Manado dan mau membawa premium – barang yang dilarang oleh petugas pelabuhan jika dimuat di kapal penumpang – saat memasuki areal pelabuhan, ia cukup menggenggam potongan kayu tersebut di kantongnya. Tindakan seperti itu seakan menghipnotis petugas yang dia lewati. Dia mendapatkan potongan kayu itu berdasarkan petunjuk dalam mimpinya. Padahal, ketika masa mudanya, sebagai pemuda gereja yang taat, ia sama sekali tidak mempercayai ilmu perdukunan.

Kepercayaan lainnya adalah tentang perdukunan. Di Miangas, ada warga yang menurut desas-desus memiliki *black magic*. Mereka menyebutnya *taŕra pasangka'*, harafiah, *pasangka'* berarti guna-guna atau *black magic*. *Taŕra pasangka'* artinya tukang guna-guna. Ciri-ciri fisik dari orang yang dianggap memiliki guna-guna adalah raut wajahnya menakutkan dan matanya selalu merah. Padahal, kehidupan di pulau kecil yang dikelilingi laut dengan intensitas cahaya dan panas matahari serta pantulan yang menyilaukan dari pasir putih akan membuat mata setiap orang memerah. Konon, *taŕra pasangka'* di Miangas memiliki peliharaan berupa jin-jin dan sebuah jadi-jadian berbentuk perahu yang melayang-layang di udara kala malam hari terutama pada bulan-bulan *ŕara'*, *nawo*, serta bulan gelap<sup>17</sup>. Jika jadi-jadian itu berhenti di depan rumah seseorang, maka dalam waktu singkat akan ada orang sakit dan meninggal dunia. Hanya saja, kejadian seperti itu tidak bisa dilihat

---

17 Lihat uraian tentang nama-nama bulan di langit pada tabel 3.1 dalam bab ini.

dengan mata telanjang oleh warga selain warga yang memiliki ilmu perdukunan.

Selain *tarra pasangka'*, ada warga desa yang mempunyai ilmu dan mereka sebut *tarra undan* yang artinya orang yang dapat mengobati penyakit atau pemilik *white magic*. Sama halnya dengan *tarra pasangka'*, yang memperoleh pengetahuannya baik secara alamiah maupun dengan cara berguru atau mereka sebut *maddapi'* yaitu menuntut ilmu perdukunan, maka *tarra undan* juga mendapatkan ilmunya baik secara alamiah maupun dengan cara berguru. Tempat mereka berguru ini tersebar di sejumlah tempat baik di wilayah Indonesia maupun di Mindanao dan kepulauan Sulu.

Berbeda dengan *tarra undan* yang mendapat tempat serta perlakuan baik dalam kehidupan sehari-hari karena statusnya yang disamakan dengan paramedis, seseorang yang dituduh sebagai *tarra pasangka'* seringkali menjadi 'kambing hitam' jika ada yang sakit menahun, atau juga ada peristiwa kematian beruntun. Merekalah yang dituduh secara diam-diam oleh warga kampung Miangas. Keadaan seperti ini tentu tidak terlalu mengenakkan, bukan hanya menyangkut dirinya tetapi juga keluarganya.

Menurut keterangan seorang narasumber (CR, 67), sebenarnya antara *tarra undan* dan *tarra pasangka'* beda-beda tipis, istilahnya. Karena dalam sistem kepercayaan mereka, pohon yang digunakan sebagai obat dalam arti *undan* dan bukan ramuan seperti digunakan oleh *mama biang* sekaligus juga berfungsi sebagai "racun" atau *pasangka'*. Lebih lanjut menjelaskan batang santigi yang dia miliki. Jika ia menggunakan pangkalnya, itu berarti untuk mengobati penyakit. Kalau dia menggunakan ujungnya, meskipun itu tidak berfungsi sebagai racun atau *pasangka'* tetapi sudah berfungsi mempengaruhi, menghipnotis orang sehingga dengan mudah ia membawa premium dalam jumlah yang besar melewati petugas pelabuhan. Kasus serupa juga terjadi pada pohon yang tumbuh tegak. Kalau kulit pohon itu dipercaya sebagai obat, maka bagian yang disamak kulitnya berada pada sisi matahari

terbit. Sebaliknya, kalau mau menyamak kulitnya untuk dijadikan *pasangka'* dukun yang sama yang sudah menyamak kulit pohon itu pada pangkal dan sisi matahari terbit sebagai obat penawar, akan menyamak pada ujung pohon dan sisi barat sebagai *pasangka'* atau racun. Singkat kata, menurutnya, seorang dukun atau *taŕra undan* sebenarnya adalah orang yang punya *pasangka'*.

Hal yang diungkapkan di atas menyangkut *undan* yang sifatnya magis dan bukan ramuan yang digunakan sebagai bahan jamu seperti yang dikisahkan oleh anak *mama biang*. Contohnya, menurut dia, namanya kulit pohon turi atau pohon bakau, mau ambil kulit pangkal sisi matahari terbit atau matahari terbenam, sama saja khasiatnya. Bedanya kalau kulit pangkal yang lebih tebal dan mudah diambil sedangkan kulit pucuk agak tipis dan sulit diambil. Begitu pula dengan kulit tangkai pisang sebagai obat luka. Tidak ada syarat harus ambil tangkai yang mana, yang penting tangkai yang masih hijau daunnya. Sedangkan tentang jumlah dedaunan yang digunakan sebagai obat, ada yang menghitung tiga, tujuh atau sembilan jumlah daunnya.

Di kalangan warga juga masih mempercayai penyebab perubahan perilaku yang disebabkan oleh guna-guna. Hal ini biasanya terjadi dikalangan pemuda dan pemudi maupun yang sudah berkeluarga. Ketertarikan yang muncul tiba-tiba dari seorang pria atau wanita terhadap lawan jenisnya juga dianggap sebagai akibat mantra yang mereka sebut *bawolen* atau mantra pemikat. Ilmu dan mantra jenis ini juga dipelajari oleh nelayan untuk menarik perhatian ikan terutama kalau mereka mau menangkap ikan hiu. Nelayan tidak mau mempraktekkan mantra pemikat terhadap ikan yang mau dikonsumsi sendiri karena menurut mereka, ikan yang diperoleh dengan cara seperti itu akan berubah rasa sehingga tidak enak dimakan. Sedangkan untuk ikan hiu, yang mereka perlukan adalah siripnya untuk dijual.

Selain mantra pemikat, ada juga pengetahuan mereka tentang mantra yang membuat seseorang membenci orang lain, nama

mantranya *pandintin*. Untuk menguasai orang lain, ada mantra *pangalun*. Mantra jenis ini biasanya dipelajari oleh lelaki muda yang mau melamar jadi aparat keamanan. Mereka juga menyiapkan diri dengan 'mandi kebal'. Konon, dengan mandi kebal, tubuhnya tidak tertembus peluru maupun luka. Orang yang belajar mantra atau 'ilmu' seperti ini dalam hidupnya harus berpantang dan bahkan ada yang menjadi mandul. Selama memiliki ilmu kebal, ia tidak akan mendapatkan keturunan. Kalau tokh ia bisa menghamili istrinya, maka anak-anaknya tidak akan berumur panjang dan selalu mati-muda. Pantangan-pantangan yang harus mereka jaga ada dalam bentuk pantang makan jenis sayur seperti rebung, sembiki serta jenis ikan tertentu. Ada juga pantangan tidak boleh main serong kalau sudah beristri, atau tidak boleh berpacaran. Kalau mau berumah tangga, langsung kawin.

Sebagian warga percaya kalau seseorang mendapat istri atau suami hasil dari kekuatan mantra pemikat, maka rumah tangga mereka tidak berumur panjang. Karena ada pantangan-pantangannya yang satu saat tanpa disadari terlangkahi. Begitu pula halnya dengan mereka yang mempelajari ilmu kekebalan. Sekali pantangannya tidak terpatuhi, bencana menunggu di depan hidung. Sebagian dari warga juga percaya bahwa biasanya orang yang mempunyai ilmu, entah itu *tarra undan* atau *tarra pasangka'* akan menderita ketika menghadapi sakratulmaut. Sebelum meninggal dunia, mereka akan didera penyakit yang tak kunjung sembuh. Hal menarik dalam temuan kami adalah fenomena terjadinya perpaduan antara tradisi perdukunan dengan ajaran agama di kalangan *tarra undan*.





## BAB IV

# TIGA ASPEK SOSIAL: MOBILITAS, IDENTITAS, DAN RUANG JEJARING

Tiga aspek sosial yang dibahas dalam bab ini menyangkut mobilitas, identitas, dan ruang-jejaring warga Miangas. Aspek mobilitas dalam tulisan ini dipahami pertama sebagai migrasi atau jenis lain perpindahan geografis semi-permanen, dan kedua, mobilitas sosial 'naik' atau 'turun' atau sirkulasi manusia dari posisi-posisi sosial-mula mencapai posisi-posisi sosial kini<sup>18</sup>. Pemahaman pertama mencoba mengungkap fenomena sosial warga Miangas dalam arti bagaimana sekelompok orang atau seseorang bergerak dari tempatnya semula pindah ke tempat yang baru baik secara temporer dan hal apa saja yang menjadi alasannya; dan pemahaman kedua mencoba mengungkap fenomena mobilitas sosial dalam arti bagaimana warga Miangas – dengan alasan dan modalitas sosial apapun – bergerak dari status awalnya hingga memperoleh statusnya sekarang. Dengan demikian akan terungkap bagaimana strategi hidup warga di sebuah pulau yang terpencil di perbatasan,

---

18 Lihat, John Urry, "Mobilitas dan Teori Sosial" dalam Bryan S. Turner (ed.) *TEORI SOSIAL* Dari Klasik Sampai Postmodern. Pustaka Pelajar, 2012. Halaman 795 – 825.

serta kemana arah gerak mobilitas. Apakah ke tempat (pulau atau kota) yang ada di wilayah NKRI atau bergerak ke wilayah negara tetangga, Republik Filipina. Selanjutnya, apakah seseorang tetap pada status awalnya seperti orang tuanya atau mencapai status yang baru sebagai strategi hidup warga. Aspek kedua yakni masalah identitas diharapkan dapat mengungkap cara pandang warga dan bagaimana mereka merasa sebagai bagian dari sebuah komunitas yang lebih besar. Aspek ketiga, ruang jejaring. Kajian atas ruang jejaring dilakukan secara dua arah. Pertama, ingin melihat ruang jejaring sosial kultural di mana (warga) Miangas menjadi bagian darinya; dan kedua, dengan adanya mobilitas – yang baik dipahami sebagai gerak migrasi maupun mobilitas sosial dalam pemahaman arus utama kajian sosial – apakah terbentuk sebuah ruang jejaring (sosial dan budaya) di mana menjadi referensi warga baik dalam hal mengaktualisasikan dirinya maupun mendefinisikan dirinya (jati-dirinya). Uraian dalam bagian ini bersifat kualitatif dengan pemaparan umum, diperkuat pula dengan kasus-kasus individual maupun kolektif.

#### **4.1 Mobilitas**

Seperti sudah dipaparkan dalam bagian pengantar di atas bahwa pemaparan tentang mobilitas dalam bagian ini dipilah atas dua hal. Pertama, mau melihat berbagai alasan yang mendasari mobilitas warga baik dalam jumlah yang besar maupun secara individual meninggalkan pulau Miangas. Perpindahan seperti ini dapat juga dibedakan antara perpindahan permanen maupun temporer. Kedua, lewat kasus-kasus individual menelusuri keberadaan warga baik yang berada di pulau Miangas maupun di tempat tinggal mereka yang baru, apakah telah terjadi mobilitas sosial vertikal.

#### 4.1.1 Beberapa catatan tentang gerak migrasi kelompok warga Miangas

Dikisahkan dalam tradisi lisan, kehadiran penduduk di pulau Miangas adalah bentuk dari proses migrasi. Ada beberapa versi tentang cikal bakal warga Miangas yang terekam dalam tradisi lisan mereka. Versi pertama mengisahkan kedatangan penduduk dari daratan Mindanao. Versi kedua mengisahkan kehadiran warga pulau-pulau Nanusa yang menetap di Miangas. Versi ketiga menuturkan dan kemudian dicatat oleh H.J. Lam (1932) bahwa warga Miangas pada masa lalu meninggalkan pulaunya hingga kosong karena mengungsi ke pulau Marampit. Gelombang eksodus ini dipimpin oleh *datu Bawarodi'* pada masa kesultanan Sulu menampakkan kekuasaan niaganya di kawasan Laut Sulu – Laut Mindanao – Laut Sulawesi. Pilihan atas pulau Marampit sebagai tujuan pengungsian didasarkan pada pertimbangan bahwa pulau itu adalah tempat asal nenek moyang mereka. Di sini timbul pertanyaan, kalau memang nenek moyang orang Miangas berasal dari daratan Mindanao, mengapa mereka tidak lari mengungsi ke sana ke sebuah daratan besar dan dari sisi jarak tempuh lebih dekat dan mudah dicapai dibandingkan dengan jarak antara Miangas dengan pulau Marampit lebih jauh dan sulit nampak dalam pelayaran karena pulaunya kecil. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa versi kedua kisah cikal-bakal nenek moyang mereka berasal dari pulau-pulau Nanusa (Marampit) lebih dapat dipertanggung-jawabkan. Dugaan ini diperkuat oleh sistem penamaan dalam kumpulan catatan silsilah warga Nanusa, nama *Bawarodi* sering muncul dan kini merupakan nama keluarga atau fam dari sebagian warga di Karatung setelah mereka memeluk agama Kristen. Alasan mengapa mereka mengungsi yakni karena gangguan perompak Sulu yang menangkap kaum lelaki dijadikan budak oleh para perompak tersebut. Hanya saja, tradisi lisan

serta ‘ingatan-ingatan bersama’ atau *collective memory* mereka belum mengenal penanggalan seperti halnya rekaman-rekaman peristiwa sejarah di belahan bumi lainnya pada era yang sama. Kalau peristiwa eksodus di atas mau ditelusuri waktu terjadinya kapan, ada tiga sumber tertulis yang dapat dijadikan pegangan atau referensi, yakni karya H.J. Lam berjudul *Miargas* (1932), karya James Francis Warren berjudul *The Sulu Zone 1768 – 1898*<sup>19</sup> (1981), dan karya Najeed M. Saleeby berjudul *The History of Sulu* (1908).

Karya Lam berjudul *Miargas (Palmas)* pada ‘halaman sisipan’ antara halaman 36 dan halaman 37, menyertakan daftar silsilah. Dalam daftar ini, tercatat sebanyak 15 generasi sesudah *datu Bawarodi*’ sampai M. Pade, Kapitenlaut Miargas yang bertugas sewaktu kunjungan Lam. Dari silsilah yang dituturkan oleh narasumber kami (C.R. 67 thn), terdapat 18 generasi. Perkiraan H.J. Lam bahwa *Tora’e* (generasi ke enam) menjadi pemimpin pada tahun 1690. Dari *Tora’e* sampai M. Pade (kapitenlaut Miargas) pada masa kunjungan Lam, ada sembilan generasi, atau dalam rentang waktu tahun 1690 – 1926, atau selama 236 tahun ada sembilan generasi dengan rata-rata usia-antar-generasi sekitar 26 tahun. Kalau perhitungan ini digunakan pada generasi ke enam hingga generasi pertama, maka diperkirakan generasi pertama hidup pada paroh kedua abad ke- 16 atau pada tahun 1550-an. Ini berarti bahwa kegiatan perompakan yang menyebabkan warga Miargas mengungsi ke pulau-pulau Nanusa, terjadi pada pertengahan hingga akhir abad ke- 16, atau pada masa kesultanan Sulu telah menjalankan praktek penangkapan budak untuk keperluan pelayaran niaga. Mereka biasanya dijadikan pendayung perahu. Dari tradisi lisan dan sumber Lam di atas, maka dapat diduga bahwa penyebab gerak mobilitas dalam bentuk mengungsi ke tempat lain disebabkan oleh gangguan keamanan.

---

19 Diterbitkan oleh Singapore University Press, 1981.

Karya Warren seperti terbaca pada judul dan sub-judulnya *The Sulu Zone 1768 – 1898: The Dynamics of External Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of Southeast Asian Maritime State* (Zona Sulu 1768 – 1898: Dinamika Perdagangan Eksternal, Perbudakan, dan Etnisitas dalam Transformasi Negara Bahari Asia Tenggara) mendeskripsikan praktek perniagaan dari Sulu ke wilayah timur Nusantara (Hindia Belanda, kala itu), masa-masa jaya niaga serta perdagangan budak di Kesultanan Sulu terjadi pada kurun waktu pertengahan abad ke- 18 hingga akhir abad ke- 19.

Karya Saleeby berjudul *The History of Sulu* (1908) tidak sekedar merekonstruksi berdiri dan jayanya kesultanan Sulu. Bagian awal tulisannya menggambarkan proses migrasi bangsa Melayu baik dari Sumatera dan Borneo maupun dari Semenanjung Malaka, para migran mana yang kelak menjadi cikal-bakal pendiri kesultanan Sulu dan beberapa kesultanan lainnya di Mindanao dan tempat lainnya di Filipina.

Keterangan dari dua referensi yang disebut terakhir memperkuat anggapan yang di dasarkan pada keterangan Lam di atas dengan memperhitungkan jumlah generasi serta masa hidupnya, sehingga perkiraan tentang peristiwa pengungsian warga Miangas yang dipimpin oleh *datu Bawarodi* terjadi pada kurun waktu paroh kedua abad ke- 16 dapat diterima karena – baik menurut Warren maupun Saleeby – pada masa itu ekspansi perniagaan serta perbudakan atau penangkapan budak yang diperjual belikan menjadi salah satu kebutuhan pelayaran yakni pendayung kora-kora dari kesultanan Sulu.

Mungkin saja ada gelombang mobilitas lebih awal baik dari luar pulau Miangas dan datang bermukim di pulau ini, sebagaimana terbaca dalam tuturan lain tentang penduduk pulau ini. Kurangnya informasi yang memperkuat tuturan tersebut menjadi alasan mengapa keterangan yang bersumber pada tradisi lisan itu seperti diabaikan dalam bagian ini.

Proses migrasi besar-besaran setelah peristiwa pengungsian ke Marampit yang dipaparkan di atas dapat dibaca dalam sumber yang sama, yakni dalam karya Lam (1932:43). Menurut catatannya, pada tahun 1885, warga Miangas diserang epidemi kolera. Wabah penyakit ini membawa puluhan korban jiwa meninggal. Untuk tetap bertahan ditengah wabah bukanlah sebuah pilihan rasional. Satu-satunya cara adalah mengungsi, dan pilihan ini diambil oleh ratusan warga – dengan menggunakan perahu layar – mereka mengungsi ke kampung Kuma di pulau Karakelang. Lam tidak memberi angka tepat. Telusuran lapangan di beberapa tempat di pulau Karakelang membuktikan bahwa sebaran warga Miangas di dua kecamatan, yakni kecamatan Essang dan kecamatan Beo, sangat signifikan. Keturunan generasi pengungsi ini hingga kini masih menetap di sejumlah desa tetangga desa Kuma dan jumlah terbesar berada di Kuma. Mereka tidak lagi merasa sebagai orang Miangas karena orang tua bahkan kakek nenek mereka sudah lahir dan besar di Kuma dan desa-desa sekitarnya.

Pada akhir Oktober 1904, warga Miangas diguncang oleh bencana alam berupa angin puting-beliung atau taifun. Ada korban jiwa dan yang paling parah adalah rusaknya tanaman. Ratusan pohon kelapa tumbang, sebagian besar rumah penduduk roboh diterjang angin. Tidak ditemukan catatan yang merekam apakah dengan kejadian ini, ada warga yang mengungsi. Sehubungan dengan peristiwa bencana alam ini yang ditemukan adalah keterangan tentang tindakan Residen Manado yang mengirimkan bantuan makanan dan beragam keperluan warga (Lam,1932:43).

Tidak lama berselang, bencana alam serupa yakni terjangan angin taifun atau puting beliung kembali menerjang pulau Miangas pada 29 April 1932.<sup>20</sup> Meskipun membawa kerusakan besar, namun tidak ditemukan berita tentang adanya pengungsian masal. Nanti pada tahun 1970, ketika terjadi bencana serupa disertai naikan

---

20 Lihat Salindeho & Sombowadile (2008:145)

permukaan air laut menggenangi perkampungan, maka atas upaya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud serta Pemerintah Propinsi maka diungsikanlah kurang lebih 100 kepala keluarga dari pulau Miangas ke pemukiman yang diberi nama Dodap di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow (sekarang Kabupaten Bolaang Mongondow Timur).

Mobilitas warga secara masal lainnya terjadi dan merupakan bagian dari program pemerintah untuk mengatasi jumlah penduduk Miangas yang semakin banyak. Puluhan kepala keluarga warga Miangas pada tahun 1963 dipindahkan ke lokasi Bengel, antara Beo dan Rainis, di pulau Karakelang. Penempatan warga di daerah yang jauh dari pantai, yakni kurang lebih 5 kilometer baik dari Beo maupun dari Rainis (dua pemukiman yang terletak di pesisir pantai barat dan timur pulau Karakelang), membuat sejumlah warga tidak betah. Ada yang memilih kembali ke pulau Miangas, ada pula yang memilih untuk menetap di kampung-kampung sepanjang pesisir pantai. Program resettlemen penduduk yang memilih lokasi di antara Beo dan Makatara khusus untuk warga Sangihe yang sudah lama menetap di Mindanao, juga mengikut sertakan sejumlah warga Miangas.

Dari paparan di atas menunjukkan adanya mobilitas warga Miangas secara masal disebabkan oleh (1) bencana sosial, dalam hal ini ketidak-amanan karena perompak; (2) adanya epidemi kolera (1885); (3) terjadinya bencana alam berupa terpaan angin taifun diiringi naiknya permukaan air laut; dan (4) program pemerintah memindahkan warga dengan alasan tingginya jumlah penduduk di pulau Miangas (1963, 1983).

#### **4.1.2 Beberapa catatan tentang gerak migrasi kelompok kecil/individual warga Miangas**

Gerak mobilitas warga Miangas juga terjadi dalam kelompok kecil terutama dalam kaitannya dengan tradisi *mammancari* atau



menjual jasa, berniaga, menetap sementara di satu tempat dengan tujuan menyekolahkan anak, dan pindah dengan alasan ikut keluarga. (1) Kegiatan *mammancari*, dilakoni oleh kaum pria yang memiliki ketrampilan seperti bertukang, terutama sebagai pembuat perahu dan mendirikan rumah serta pembuatan perabot, dengan ketrampilan memanjat pohon kelapa, mencari pekerjaan sebagai pemanjat pohon kelapa baik di wilayah Republik Indonesia maupun di perkebunan-perkebunan yang ada di Mindanao Selatan; (2) kegiatan berlayar selama sebulan hingga dua bulan berniaga dengan modal *bawila'* atau tikar pandan dan *ikan kayu, tinapa, ikang garam* untuk barter bahan makanan; (3) pilihan merantau dikalangan pemuda untuk mencari memilih bekerja di perusahaan perikanan di Mindanao atau juga sebagai pelaut di perusahaan-perusahaan pelayaran di Indonesia; (4) keluar dari Miangas dengan alasan ikut keluarga, dan (5) keluar sementara waktu atau selamanya karena alasan budaya.

*Mammancari* harafiah berarti mencari pekerjaan (informal) temporer di tanah seberang agar mendapatkan uang. Upaya seperti ini harus mereka lakukan karena sistem perekonomian di Miangas masih berada dalam fase ekonomi subsisten. Tidak semua warga memiliki pohon kelapa untuk dipanen dan dijadikan kopra atau minyak kelapa. Warga bercocok-tanam sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Terbatasnya lahan garapan turut mempengaruhi hasil panen. Maksudnya, meskipun hasil panen umbi jalar dan ketela pohon sangat baik, tetapi terbatasnya lahan membuat stok makanan tidak mencukupi kebutuhan makan sehingga perlu substitusi antara lain mencari pekerjaan (uang) di luar pulau. Lamanya waktu meninggalkan Miangas tidak menentu. Tergantung pada jumlah kebutuhan yang diinginkan. Misalnya, apakah seseorang melakoni aktivitas *mammancari* mendapatkan uang untuk apa. Berapa banyak jumlah uang yang mereka butuhkan.

Aktivitas *mammancari* telah dilakoni oleh warga Miangas berabad lalu. Pada bagian depan telah disebut kesaksian seorang pelaut

Inggris Thomas Forest tentang keahlian dan ketrampilan para tukang kayu dari Miangas dan Nanusa dalam hal memperbaiki perahu. Sekarang, ketrampilan mereka sebatas memproduksi sampian dan pambut. Para tukang kayu warga Miangas, lebih banyak berada di daratan Minahasa, Manado, dan Bitung, menjual jasanya pada warga yang membangun rumah pribadi. Mereka menetap sementara, bergabung dengan warga Sangihe dan Talaud yang menetap mengelompok, atau membangun pondok sementara dengan cara menyewa tanah milik penduduk setempat baik di Manado dan Bitung, maupun di beberapa tempat seperti di Sukur dan Airmadidi, Minahasa Utara. Di dua tempat yang disebut terakhir, selain menjual jasa sebagai tukang kayu, mereka menjalani aktivitas sebagai pemanjat kelapa sekaligus pembuat kopra di kebun-kebun warga setempat.

Kalau masa lalu masih banyak warga Miangas yang memilih daratan Mindanao sebagai tempat tujuan mereka beraktivitas sebagai pemanjat kelapa, sejak tahun 1970-an pilihan tersebut sudah tidak mereka lakukan. Selain masalah transportasi, para pemilik perkebunan kelapa di daratan Mindanao lebih menyukai warga yang mau bekerja untuk periode waktu yang lama dan bukan temporer seperti yang mereka jalani di daratan Minahasa. Dengan sistem bekerja secara kuartalan, maksudnya, seorang pemanjat kelapa mendapat pekerjaan dari seorang pemilik kelapa setiap tiga bulan sekali panen dan ini berarti dalam setahun empat kali bekerja di tempat yang sama. Usai melakukan pekerjaannya, ia boleh mencari pekerjaan di tempat lain. Hal ini berbeda dengan yang mereka alami di daratan Mindanao. Sekali mengikatkan diri dengan seorang pemilik perkebunan, mereka tidak bebas mencari kerja di tempat lain.

*Maccenggo* harafiah berarti berlayar. Aktivitas ini dilakukan ketika warga Miangas dikenal sebagai pendukung tradisi bahari. Lama waktu aktivitas ini berkisar antara sebulan sampai dua bulan. Tujuan utamanya adalah berniaga di kepulauan Talaud ber-

modalkan hasil kerajinan kaum ibu yaitu *bawila'* atau tikar pandan, ikan kayu, ikan asin dan ikan asap (ikan fufu). Aktivitas *maccenggo* dilakoni pada masa-masa peralihan musim angin utara beralih ke musim angin selatan. Dimaksud agar ketika berangkat dari Miangas, didorong angin utara dari buritan, dan setelah dua atau tiga minggu berlabuh dari satu pelabuhan desa-desa di kepulauan Talaud, mereka kembali ke Miangas didorong oleh angin selatan atau juga angin barat.

Seperti telah dikemukakan dalam bab III di atas, bahwa hingga akhir tahun 1960-an setiap kelompok *ruanga'* memiliki perahu layar berukuran besar dengan lunas sepanjang 7 – 10 meter. Juga disinggung soal kerajinan mengolah daging ikan tuna dan cakalang menjadi ikan kayu. Pada aktivitas seperti ini, setiap perahu rata-rata diawaki 10 sampai 15 pria pelaut dan 2 atau tiga orang wanita yang tugasnya menjajakan hasil produksi mereka ketika menyinggahi pelabuhan-pelabuhan yang ada. Tugas kaum wanita ini menaksir jumlah barang yang dipertukarkan dengan tikar pandan atau ikan kering. Kaum wanita dianggap lebih paham dalam hal mengkonversi nilai barang yang mereka bawa dengan natura yang mereka inginkan. Misalnya, untuk sebuah tikar pandan dengan ragam hias yang ada, nilainya seimbang dengan berapa kaleng padi, atau kacang merah, kacang hijau, dan sebagainya. Kaum wanita juga dianggap ulet dalam hal tawar menawar barang.

Setiap kelompok pelaut sudah memiliki jaringan relasi di desa-desa yang ada di kepulauan Talaud. Tempat-tempat seperti itulah yang menjadi tujuan utama mereka *maccenggo*. Tidak jarang, ada bahan-bahan yang belum dipertukarkan karena relasi mereka belum mempunyai bahan natura untuk menukarnya karena belum panen padi atau jenis kacang-kacangan. Bahan yang diinginkan langsung ditinggalkan dan imbalannya nanti dijemput pada pelayaran berikutnya, bisa pada tahun yang sama atau setelah masa panen berikutnya. Dengan demikian, aktivitas *maccenggo* seperti

ini tidak hanya melihat masa peralihan musim angin, tetapi juga masa-masa panen. Dan kebetulan, di kepulauan Talaud terdapat dua musim tanam padi. Musim tanam pertama pada periode bulan Februari – Juli, musim tanam kedua pada periode bulan Agustus – Januari.

### **Maddea'pabbawiarangngu ana'**

Selain meninggalkan kampung halaman karena alasan-alasan tersebut di atas, keterbatasan sarana/prasarana pendidikan pada tingkat menengah dan menengah atas, juga mendorong gerak mobilitas warga. Mereka tidak hanya mengirim anak-anaknya bersekolah di kota-kota tertentu seperti di Tahuna, Beo, dan Lirung, atau di Manado. Untuk urusan menyekolahkan anak, biasanya satu keluarga meninggalkan kampung halamannya menuju tempat di mana anak-anak mereka akan disekolahkan. Umumnya yang mereka lakukan adalah mendirikan pondok-pondok sederhana di lahan yang dipinjam dari penduduk setempat. Lokasi yang mereka pilih selalu berada di tepi pantai agar memudahkan kaum pria melakukan aktivitas sebagai nelayan. Dari penghasilan mereka sebagai nelayan inilah mereka menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anak mereka. Selain berprofesi sebagai nelayan, mereka berkebun. Kaum perempuan terutama ibu-ibu yang ikut, turut menjual jasa sebagai pembantu rumah tangga. Adakalanya, untuk kegiatan seperti ini, dua atau tiga keluarga bergabung dan dalam urusan mengawasi serta membiayai anak-anak mereka menuntut ilmu di rantau, orang tua mereka bergiliran menjaga anak-anak. Para orang tua ini nanti kembali ke kampung halamannya (Miangas) kalau anak-anak yang mereka biayai telah menyelesaikan pelajarannya dan bahkan sampai mendapat pekerjaan di sektor formal terutama menjadi PNS. Ketika itu, keadaan menjadi terbalik. Kalau semasa sekolah, orang tua yang membiayai anak-anaknya, maka ketika anak-anak ini sudah mem-

punyai pekerjaan, merekalah yang membiayai orang tua mereka, atau membiayai dan menyekolahkan adik-adik mereka.

#### 4.1.3 Mobilitas Sosial Vertikal

Bersekolah merupakan pilihan “mengubah nasib” dari anak nelayan dan petani menjadi pegawai atau masa lalu mereka sebut *ambtenaar*, dan sejak masa kemerdekaan hingga kini mereka katakan *pia’pangkangnge* atau harafiah berarti yang berpangkat. Menjadi “orang berpangkat” tidak sekedar mendapatkan jaminan hidup yang rutin dan adanya jaminan hari tua, tetapi juga menjadi kebanggaan keluarga. Umumnya keluarga akan menggantungkan harapan (sosial-budaya dan bukan natura) mereka kepada anggota keluarga yang berhasil menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh pekerjaan formal. Ada ungkapan “*addiongete siammi sawone, siamiute remene*” yang artinya, sudah cukup memadai kalau kami mendapatkan kuahnya, bagian kamu dagingnya”. Makna ungkapan ini adalah “keluarga sudah bangga kecipratan nama besar anak yang berhasil dan imbalan materinya buat si anak itu sendiri”. Ungkapan ini tampak dalam perilaku warga sehari-hari. Waktu mereka berangkat dari puau Miangas mencari pekerjaan di tempat yang berdekatan dengan lokasi kerja keluarga yang berhasil mendapatkan pekerjaan formal, selalu membawa buah tangan berupa ikan asin yang akan diberikan kepada keluarga yang sudah bekerja di sektor formal, meskipun ia tidak akan tinggal bersama dengan mereka. Begitu pula kalau mereka datang mencari pekerjaan sebagai pemanjat kelapa. Jarang sekali mereka menginap dengan keluarganya yang sudah berhasil, meskipun sewaktu mereka datang membawa buah tangan. Mereka lebih memilih tinggal di gubuk dengan sesama warga yang satu profesi, dengan alasan mudah mendapatkan pekerjaan. Seizama mereka bekerja, selalu mencari kesempatan berkunjung dan membawa buah tangan seperti kelapa atau minyak kelapa yang mereka

oleh sendiri di gubuk tempat kerjanya. Ketika mereka pulang ke Miangas, sewaktu pamitan, hal yang mereka minta adalah baju bekas. Padahal, mereka boleh membelinya di pasar. Baju bekas pemberian ini akan mereka kenakan sewaktu turun dari kapal dan dengan bangga mereka mengatakan bahwa kemeja atau celana ini adalah pemberian dari keluarga tersebut. Baju-baju bekas terutama jaket militer dari keluarga mereka yang menjadi anggota ABRI atau juga jaket seragam kantor tempat keluarganya bekerja merupakan barang yang paling disukai. Tentu saja dengan syarat bahwa, tanda kesatuan serta pangkatnya harus dilepas dari jaket itu.

Busana menjadi simbol mobilitas vertikal nyata maupun semu. Nyata dalam artian bahwa yang menyandang busana berupa seragam PNS, Kesatuan dalam Angkatan Bersenjata, menunjukkan status dan pekerjaan dari yang menyandang busana itu meskipun itu dipakai di luar jam kerja atau jam dinas. Sedangkan simbol semu dalam artian bahwa si penyandang busana seperti seragam pegawai dan angkatan atau juga yang paling banyak teramati adalah mode safari yang disandang sebagai penanda bahwa di kalangan keluarganya, ada juga orang yang “berpangkat”. Busana juga mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Pengalaman menarik ketika sama-sama dalam perjalanan bersama salah seorang perangkat desa, di kapal sama-sama mengenakan celana pendek dan kaus, bisa mengobrol dengan bebas dan akrab. Ketika tiba saatnya berkunjung ke kantor desa dan si perangkat mengenakan busana formal, keakraban yang sudah terjalin sirna bagaimana diterpa taifun. Semua jadi serba kaku dan formal.

## 4.2 Identitas Sosial

Baik secara awam maupun akademik, biasanya seseorang diidentifikasi dan digolongkan ke dalam sebuah kelompok komunitas yang lebih besar, berdasarkan pengakuan diri seseorang, nama keluarga yang melekat pada dirinya, kebiasaan atau tradisi

yang dilakoninya dan bahasa-ibu yang biasa dituturkannya. Itu menyangkut identitas-diri atau secara individual. Lain lagi halnya dengan identitas kelompok. Biasanya, bahasa yang dituturkan, wilayah yang ditempati turun-temurun, dan pengalaman kesejarahanlah yang dijadikan alasan pengelompokan.

Kajian-kajian ilmu sosial memberi pengertian tentang identitas sosial "... mengacu pada definisi-diri seseorang dalam hubungannya dengan orang lain" dan sebagai istilah psikologi sosial, memiliki konotasi yang lebih spesifik, yaitu, "... definisi-diri dalam pengertian keanggotaan seseorang dalam berbagai kelompok sosial" (Rupert Brown, 1996, *Social Identity*).

Perihal "identitas sosial" warga Miangas dapat dipilah atas, (1) apa kata orang tentang siapa orang Miangas, dan (2) apa kata orang Miangas tentang diri mereka sendiri. Alokasi waktu penelitian yang singkat tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara yang khusus kepada informan dari beragam latar etnis untuk mengajukan pertanyaan tentang identitas sosial orang Miangas. Untuk mendapatkan gambaran tersebut upaya yang ditempuh adalah lewat telaah pustaka.

Lapian (2003) dan Hayaze (2007) sepaham bahwa sebagian dari wilayah perbatasan Indonesia (kepulauan Sangihe dan Talaud) dan Filipina (wilayah pesisir selatan daratan Mindanao) semula adalah satu kawasan sosial budaya yang terjaring dalam jejaring perniagaan dan interaksi. Ulaen, Wulandari, dan Tangkilisan (2012) lebih mempertegas dengan menyatakan bahwa pulau Miangas dahulu merupakan bagian dari "ruang-jejaring Melayu" yang nantinya setelah kehadiran bangsa barat, kawasan ini – menurut Lapian – terpilah dua. Dan, sejak itu, menurut Ulaen (2003:80 – 84) menjadi "*landstreek van Menado*" atau bagian dari (keresidenan Manado). Tidak hanya dalam arti geo-politik administratif tetapi lebih dari itu adalah dalam arti sosial-budaya. Tidaklah mengherankan kalau warga Miangas menggunakan kata *ire e su Manaro* yang arti kata *ire e* di sini adalah mau ke (arah atas), padahal di

peta, Manado berada di arah selatan. Gorontalo, Makassar, dan Jakarta yang juga berada di arah selatan Miangas tidak dipahami serupa, karena kalau orang Miangas mau ke tiga tempat tersebut ekspresi yang digunakan adalah *inai* yang bermakna pergi ke arah yang sama.

Ketika masa VOC, Miangas (dan pulau-pulau Nanusa) pada satu masa dianggap sebagai *behoorende gedeeltelijke bij* (daerah bawahan dari) wilayah kerajaan Tabukan dan kemudian menjadi *behoorende gedeeltelijke bij* (daerah bawahan dari) wilayah kerajaan Tahuna, sebenarnya menunjukkan bahwa status Miangas (dan pulau-pulau Nanusa) lebih bersifat *vassal* karena dia boleh berganti menjalin hubungan dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain, dan bukan dalam pemahaman daerah bawahan apalagi jajahan.

Pada masa kemerdekaan – meskipun dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan, gaung perjuangannya tidak menjangkau pulau Miangas – tetapi sebagai bagian dari wilayah pemerintahan Hindia-Belanda, pulau Miangas dan warganya merasa turut merdeka dan merupakan bagian dari negara yang baru merdeka. Dan mengacu pada temuan tim-tim peneliti yang sudah dikemukakan dalam bab I di atas serta bab-bab sebelumnya baik dari LIPI, BPPK-UNSRAT, Depsos RI maupun perorangan, semuanya berkesimpulan bahwa identitas sosial warga Miangas merupakan bagian dari identitas-identitas sosial yang membentuk sebuah identitas nasional. Sejalan dengan teorinya Benedict Anderson (*Imagined Communities*, 1991), tentang Indonesia, warga Miangas “membayangkan” dirinya sebagai secara kultural adalah bagian dari satu bangsa yang lebih besar yaitu Indonesia. Warga tidak hanya menggunakan bahasa dan kata-kata Indonesia, atau menaikkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan bangga sebagai warga negara.

Kebanggaan sebagai warganegara Indonesia pada periode 1970-an hingga 1990-an pernah mencapai titik kulminasi. Penyebabnya adalah kebijakan Pangdam XIII Merdeka kala itu dijabat



oleh Jenderal Rudini dan Panglima Angkatan Darat dijabat oleh Jenderal Try Sutrisno. Kebijakan kedua pejabat ini adalah dengan merekrut anak-anak muda Miangas menjadi anggota TNI-AD. Salah satu di antara anak-anak Miangas yang mereka rekrut dengan pangkat Prajurit, sempat menjadi anggota Kesatuan Pengawal Presiden. Ketika itulah para keluarga anak-anak TNI-AD ini merasa bangga dengan identitas sosialnya sebagai bagian dari Indonesia. Fenomena serupa tampak ketika Panglima TNI-AL, Laksamana Kent Sondakh memberlakukan program pasar-murah bagi warga perbatasan dengan memanfaatkan kapal-kapal patroli Angkatan Laut yang beroperasi di daerah perbatasan membawa barang-barang kebutuhan pokok warga.

Pada bulan Mei 2005 kebanggaan identitas sosialnya memudar ketika salah seorang warganya yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa, meninggal di tangan anggota Polri. Terkendalanya penanganan dari pihak keamanan karena keterisolasian geografis mengundang warga menyuarakan protes mereka. Bendera Filipina yang berkibar di pos *Border Crossing Station*, Miangas, diambil secara paksa dan dibawa-bawa massa disertai spanduk yang isinya menyatakan akan bergabung dengan Republik Filipina jika persoalan yang membawa korban jiwa itu tidak diatasi secara hukum.

### 4.3 Ruang Jejaring Miangas

Tingkat mobilitas penduduk – dalam hal ini migrasi permanen maupun temporer – yang terbilang tinggi menjadikan “dunia orang Miangas” tidak hanya sebatas sebuah pulau kecil di perbatasan. Juga tidak seluas wilayah konsumen Indo Mie yang dalam iklannya ditemukan lirik, “*dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga pulau Rote, Indonesia tanah airku, Indo Mie seleraku*”.

Dalam jumlah puluhan hingga ratusan kepala keluarga, sebaran warga Miangas di wilayah Sulawesi Utara dapat ditemukan di desa Dodap, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (lebih dari

100 kepala keluarga); desa Bengel, pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud (lebih dari 100 kepala keluarga); desa Resduk, pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud (puluhan kepala keluarga). Selain itu pula dapat ditemukan warga Miangas yang tersebar di sejumlah kelurahan dan desa di Kota Manado dan Bitung; dan beberapa kota kecil di Minahasa. Umumnya mereka sudah menetap di tempatnya yang baru. Kecuali para pencari kerja yang datang secara musiman. Namun demikian, tradisi "*mattembo wanua ma'alla wabbali, ma'alla pamarianua manga yupun*" harafiah berarti berkunjung ke kampung halaman, melihat tempat ari-ari (kakak) ditanam, serta mengunjungi makam leluhur, merupakan keharusan (tradisi) yang dipatuhi apalagi kalau dalam kehidupannya, seseorang dianggap sukses. Berkunjung ke kampung halaman juga merupakan salah satu keharusan yang sering disarankan kepada orang yang dalam usahanya meskipun sudah bekerja keras namun sepertinya belum berhasil atau juga bagi keluarga muda yang mengharapkan kehadiran anak namun belum kunjung terpenuhi harapannya.

Meskipun warga Miangas sudah tersebar dan menetap di tempatnya yang baru, tetapi ikatan sosial-emosional dan budaya dengan keluarganya di Miangas tetap terpelihara. Di dua lokasi yang warganya banyak, juga telah dibentuk kelompok *ruanga* sebanyak 12 kelompok. Waktu pembayaran ganti rugi lahan, ada sebidang tanah yang milik bersama atau istilah mereka tanah adat. Para tetua dan pemerintah desa sedang mempertimbangkan nilai ganti rugi ini akan dibagi tiga, masing-masing sepertiganya untuk warga di Miangas, sepertiganya untuk warga di Bengel, dan sepertiga sisanya untuk warga di Dodap. Dananya harus digunakan untuk membangun fasilitas rumah ibadah. Namun ada resistensi dari beberapa tokoh dan mengingatkan bahwa masih ada juga warga yang tinggal di tempat lain seperti di Resduk dan daerah lainnya. Bagaimana nantinya kalau mereka mau menuntut hak mereka.



## **BAB V**

# **CATATAN AKHIR**

Bagian ini merupakan catatan akhir dan tidak sekedar memaparkan simpulan-simpulan dari paparan dalam bab-bab sebelumnya serta saran yang dikemukakan di sini. Sebuah catatan akhir digunakan baik untuk menggaris bawahi keterangan yang sudah diajukan terdahulu atau juga melengkapinya, sehingga diharapkan pemaparan ini menjadi sebuah kumpulan informasi yang dapat menjawab pertanyaan utama: Bagaimana sesungguhnya ekspresi budaya yang tercermin dalam aspek-aspek sosial-budaya sebuah masyarakat yang berada di daerah perbatasan, lebih khusus warga pulau Miangas.

### **5.1 Beberapa Catatan Akhir**

Sebagaimana sebuah catatan akhir, berikut ini akan disampaikan garis-garis besar paparan yang ada.

1. Miangas, yang adalah salah dari 92 pulau terluar di wilayah perbatasan negara telah menarik perhatian dari pelbagai ka-

langan seperti halnya para akademisi, analis politik, komentator, politisi, pejabat negara dan kaum awam. Perhatian terhadap Miangas jauh lebih banyak dan intensif jika dibandingkan dengan dua pulau terluar lainnya yaitu pulau Marampit dan pulau Marore di wilayah Propinsi Sulawesi Utara.

2. Kalangan akademisi terutama peneliti baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang menaruh perhatian terhadap pulau Miangas umumnya berasal dari lembaga-lembaga penelitian seperti kelompok peneliti Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) Jakarta, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Luar Negeri R.I. Jakarta yang bekerjasama dengan peneliti dari Universitas Sam Ratulangi, Manado; Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial R.I., Jakarta. Dari pihak luar negeri (Filipina) berasal dari dunia kampus.
3. Ketertarikan terhadap pulau Miangas sangat beralasan karena pulau ini pernah menjadi bahan perdebatan dua negara (Amerika Serikat dengan Kerajaan Belanda) sehingga upaya pemecahannya harus diselesaikan pada tingkat Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag Belanda; dan atas keputusan Arbitrase Internasional Dr. Max Huber, pulau Miangas sah dinyatakan sebagai milik Kerajaan Belanda atau bagian dari wilayah Pemerintahan Hindia Belanda yang kemudian diwarisi oleh Republik Indonesia.
4. Kegiatan-kegiatan penegas eksistensi penyelenggaraan kekuasaan negara di pulau Miangas bervariasi mulai dari kehadiran kelembagaan dan institusi pemerintahan, maupun pembangunan monumen-monumen – tercatat ada tiga monumen yang bernama dan sudah diresmikan, yaitu monumen perbatasan, monumen pancasila, monumen Santiago, dan sebuah monumen yang belum bernama dan terbiar – aksi-aksi dari warga masyarakat madani (*civil society*) seperti pengibaran bendera merah putih berukuran raksasa,

pembentangan bendera merah putih sepanjang 7.000 meter mengelilingi pulau Miangas, penempatan mahasiswa kuliah kerja nyata secara massal dengan jumlah 70 orang.

5. Miangas memperoleh tempat dalam beragam strategi serta kebijakan pembangunan di berbagai sektor dan melibatkan berbagai institusi pemerintahan, mulai dari pihak Pertahanan dan Keamanan dalam bentuk penempatan Satgas TNI-AD, disamping kehadiran Pos Koramil AD, dan penempatan satuan Marinir dari TNI-AL, atas persetujuan Departemen Dalam Negeri, Miangas memperoleh status Kecamatan Khusus; pihak Departemen Perhubungan membangun perlengkapan navigasi serta fasilitas dermaga; pihak Telkom menyediakan fasilitas komunikasi; pihak Departemen Sosial R.I., menyalurkan berbagai program bantuan; dari pihak Departemen Pendidikan R.I., menyediakan sarana/prasarana pendidikan; pihak Departemen Kesehatan membangun sarana/prasarana layanan kesehatan; pihak PLN menyediakan fasilitas penerangan baik dengan menggunakan tenaga surya maupun PLTD.
6. Pemerintah telah mengeluarkan dana yang besar membangun gudang logistik dan empat kontainer penampungan BBM. Persoalannya sekarang adalah bagaimana caranya agar fasilitas itu berfungsi.
7. Dalam agenda pembangunan di sektor Perhubungan Laut, pemerintah telah menyediakan pelayaran perintis. Kendalanya adalah jadwal pelayaran yang sering tertunda karena alasan teknis dan bukan karena hambatan cuaca.
8. Warga Miangas kini sedang berada dalam proses peralihan dari pendukung tradisi bahari menuju tradisi yang belum berbentuk, sebagai konsekuensi terbukanya keterisolasian dan hadirnya berbagai proyek pembangunan.
9. Ikutan dari proses perubahan itu adalah mulai melemahnya pranata-pranata tradisional, melemahnya peranan tokoh-tokoh

adat yang sebelumnya berfungsi sebagai kontrol sosial dalam kehidupan sehari-hari.

10. Pembangunan di bidang pendidikan ditafsirkan sebagai cara mendapatkan "tiket" atau "paspor" meninggalkan pekerjaan-pekerjaan non-formal seperti petani, nelayan, dan wiraswasta ke sektor formal terutama PNS.
11. Ada kesan bahwa setiap hadirnya proyek pembangunan ditafsirkan sebagai upaya atau cara "bagi-bagi uang".
12. Keberadaan beberapa aspek budaya semakin luntur dan dianggap sebagai "cara kuno" yang harus ditinggalkan. Padahal masih mempunyai peran sebagai pengikat rasa solidaritas.
13. Tradisi dan atraksi seni-budaya ditampilkan sekedar pengisi acara untuk menerima tamu dan bukan lagi ekspresi rasa keindahan.
14. Kehidupan dalam aspek keagamaan, khususnya agama Kristen Protestan, tidak hanya sebatas aktivitas upacara-upacara religius, tetapi juga menumbuhkembangkan solidaritas antar warga-jemaat.
15. Pulau Miangas menyimpan potensi alam (flora) baik yang berfungsi sebagai bahan makanan, yakni laluga (*Cyrtosperma Merkussi*) dan *annuwu* (*Schefflera elliptica*) maupun tumbuhan seperti pohon pandan yang selama ini menjadi bahan baku anyaman tikar pandan dapat dilestarikan bahkan ditingkatkan menjadi salah satu sumber pendapatan warga.
16. Miangas terkenal pula dengan hasil lautnya baik ikan jenis pelagis maupun demersal yang menjadi bahan makanan (lauk) maupun stok makanan (ikan asin, ikan asap).
17. Sumber Daya Manusia Miangas juga merupakan salah satu potensi yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh.

## 5.2 Saran Tindak Lanjut

Kajian ini belum dapat mengungkap seluruh permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari warga Miangas. Mengingat posisi geografisnya sebagai salah satu pulau terluar di daerah perbatasan, dipandang perlu:

1. Adanya kajian-kajian tematis sebagai bagian dari sebuah kajian holistik. Kajian tematis dimaksud misalnya seperti yang sudah dilakukan oleh Direktorat Geografi Sejarah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang khusus membahas aspek hukum dari status pulau Miangas. Itupun, seperti diakui oleh salah seorang penulisnya, belum mengungkap secara rinci secara akademik. Kesan seperti itu terasa juga dalam laporan ini. Sangat umum dalam hal mengungkap aspek sosial dan aspek budayanya.
2. Sudah saatnya pemerintah – baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) – dalam hal pengalokasian program dan dana pembangunan, diawali dengan kajian yang mendalam tentang bagaimana kebutuhan riil warga sehingga setiap program dan hasil pembangunan tepat guna dan tepat sasaran. Aspek sosial budayanya pun harus dikaji dan dipertimbangkan secara matang sehingga setiap program pembangunan yang dialokasikan benar-benar selain memenuhi kebutuhan warga juga menjadi semacam stimulus pemberdayaan.
3. Penempatan aparat negara dan Pegawai Negeri Sipil yang melayani kebutuhan warga di Miangas perlu mendapat pelatihan serta perhatian khusus. Paradigma penempatan pegawai di daerah terpencil sebagai salah satu bentuk hukuman jabatan sudah masanya untuk ditinggalkan dan diganti dengan paradigma ajang pembuktian prestasi serta imbalan setimpal. Tidak selalu harus dengan pemberlakuan tunjangan khusus, tetapi dengan imbalan seperti promosi khusus atas prestasi dan loyalitasnya terhadap negara.



4. Perlu mengkaji ulang penempatan pejabat dan aparat dengan alasan “putra daerah”, karena disamping membawa dampak positif, juga menghadirkan prinsip-prinsip nepotisme. Hal ini berbeda dengan kehadiran pejabat dan aparat yang bukan “putra daerah” tetapi mereka hadir sebagai abdi negara yang profesional.
5. Mengulang kembali program yang memberi dampak seperti yang pernah dilakukan oleh TNI-AD dan TNI-AL. Sekedar saran, tidak ada salahnya kalau POLDA Sulut yang tengah mengkampanyekan “Brenti jo Bagate”, menyertainya dengan kesempatan bagi pemuda dan pemudi perbatasan yang anti-alkohol menjadi salah satu faktor penunjang disamping persyaratan lainnya menjadi bhayangkara-bhayangkara muda.
6. Sudah masanya pemerintah lewat Departemen Perhubungan meningkatkan standar fasilitas yang setara dengan standar kapal-motor yang beroperasi secara reguler di kepulauan Sangihe dan Talaud, sehingga kendala-kendala teknis seperti mesin mogok dan sebagainya tidak terulang sehingga menelantarkan penumpang. Karena bukan rahasia lagi kalau kapal perintis yang beroperasi sekarang selain sudah berusia lanjut, sebelumnya digunakan sebagai kapal pengangkut ternak (sapi).
7. Perlu adanya rekayasa sosial dalam rangka menghadapi proses perubahan yang sedang terjadi agar yang berlaku adalah sebuah proses transformasi dan bukan perubahan tanpa arah.
8. Penguatan dan pemberdayaan seyogyanya memperhatikan aspek sosial budaya dan penemuan kembali potensi-potensi yang terkandung dalam tradisi bahari, sehingga nelayan tetap menjadi pilihan bukan karena keterpaksaan, tetapi karena peluang dan potensi hasil laut yang dapat menjamin kebutuhan hidup.
9. Memberi peran dan menjadikan kelompok-kelompok keluarga, kelompok keagamaan sebagai agen-agen pembangunan de-

ngan cara melibatkan mereka dalam berbagai program pemberdayaan warga.

10. Mengembangkan ketrampilan anyam-menganyam tikar pandan menjadi produk yang menarik disamping sebagai tikar dan topi.
11. Menggali kembali kearifan-kearifan tradisional yang ada dalam sistem pengetahuan tradisional.
12. Menemu kenali tatanan nilai kehidupan yang tidak berseberangan dengan ajaran agama dan ideologi negara serta menjadikannya sebagai langkah pencegahan berbagai permasalahan sosial sebelum permasalahan itu masuk ke ranah hukum.
13. Menyiapkan sumber daya manusia Miangas yang handal di sektor kelautan baik sebagai pelaut dan nelayan maupun memiliki ketrampilan menjaga kelestarian alam (laut).



## KEPUSTAKAAN

### **Buku, Artikel, Makalah dan Laporan Penelitian:**

- 1) Agoncillo, Theodore A., *History of the Filipino People*. Garotech Publishing. Quezon City, 1990 (1960).
- 2) Ahimsa-Putra, Heddy Shri, "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama", di dalam *Jurnal Penelitian Wali Songo*, Volume XVII, Nomor 2, Nopember 2009 (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009) hlm. 1-33
- 3) Brilman, D., *Kabar Baik di Bibir Pasifik* [Terj.] (Jakarta: Sinar Harapan, 2000 [1938])
- 4) BPPK DEPLU RI dan Unsrat Manado, *Identifikasi Masalah Perlindungan Perbatasan Kepulauan Talaud (Indonesia-Filipina) Dalam Perspektif Sosial, Ekonomi dan Politik*, Laporan Penelitian (2010)
- 5) Harsono, Andreas, "Miangas, Nationalism and Isolation", di dalam *Tempo*, No. 13/V/November 30-December 06, 2004
- 6) Hayase, Shinzo, Dominggo M. Non, Alex J. Ulaen, *Silsilah/ Tarsilas (Genealogies) and Historical Naratives in Saranggani Bay and Davao Gulf Region, South Mindanao, Philipines and Sangihe-Talaud Islands, North Sulawesi, Indonesia* (Kyoto: Center for Southeast Asian Studies Kyoto University, 1999)

- 7) Hayase, Shinzo, *Mindanao Ethnohistory Beyond Nations, Mangundanao, Sangir and Bagobo Societies in Maritime Southeast Asia* (Manila: Ateneo de Manila University Press, 2007)
- 8) Kembuan, Leo, dkk., *Struktur Dialek Miangas*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1986.
- 9) Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1992[1967])
- 10) \_\_\_\_\_, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2002[1974])
- 11) Lam, Herman Johannes, *Miangas (Palmas)* (Batavia: G. Kolff & Co., 1932)
- 12) Lopian, Adrian B., *Orang Laut Bajak Laut Raja Laut Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad ke XIX* (Jakarta: Komunitas Bambu dan Freedom institute, 2011[2009])
- 13) \_\_\_\_\_, "Sejarah Nusantara Sejarah Bahari", Pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa 4 Maret 1992 (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1992)
- 14) Peralta, Jesus T., *Glimpses Peoples of the Philippines*. Anvil Publishing Inc. 2003 (2000). Pasig City.
- 15) Pristiwanto dan I Parsaoran Tamba, *Studi Perbatasan Indonesia-Philipina (Kearifan Tradisional Masyarakat Pulau Miangas-Talaud-Sulawesi)* (Bandung: Dewa Ruchi, 2009a)
- 16) Pristiwanto, *Studi Perbatasan Indonesia Philipina (Kearifan Tradisional Masyarakat Pulau Miangas-Talaud-Sulawesi Utara)* (Bandung: Dewa Ruchi, 2009b)
- 17) Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, "Revitalisasi Model Pemberdayaan Pranata Sosial di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara", *Ringkasan Laporan* (2008)

- 18) Raharto, Aswatini, dkk., *Migrasi Kembali Orang Sangir-Talaud dari Pulau-pulau di Wilayah Filipina Selatan*, Laporan Penelitian Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Jakarta: LIPI, 1993)
- 19) Raharto, Aswatini, "Return Migration Among the Sangirese: Life and Adjustment in the Homeland", di dalam Ken Ichii Abe dan Masako Ishii (Eds.), *Population Movement in Southeast Asia: Changing Identities and Strategies or Survival* (JCAS Symposium Series 10, 2000)
- 20) Saleeby, Najeeb M. *The History of Sulu*. Manila Bureau of Science, Division of Ethnology Publications, Vol. IV, Part II.
- 21) Salindeho, Winsulangi dan Pitres Sambowadile, *Kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro: Daerah Perbatasan, Keterbatasan, Pembatasan* (Jogja: Puspada, 2008)
- 22) Suharjo, Sri, Nasrun Sandiah, Pristiwanto, *Kampung Marore: Pulau di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina* (Manado: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2006)
- 23) Sandiah, Nasrun, "Mengenal Pranata Sosial Komunitas Adat Terpencil di Kawasan Perbatasan Antar Negara", di dalam *Jurnal SIKAT*, Juni 2008 (Jakarta: Depsos, 2008) hlm. 3-7
- 24) Tan-Culamar, Evelyn, *The Indonesian Diaspora in Southern Mindanao: Implication for the Philippines-Indonesia Relations*, Thesis (Dilliman, Quezon City: Asian Center University of Philippines, 1989)
- 25) Turner, Bryan S. (Ed.), *TEORI SOSIAL: Dari Klasik sampai Postmodern*. Pustaka Pelajar, 2012.
- 26) Ulaen, Alex J., *Nusa Utara Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan* (Jakarta: Sinar Harapan, 2003)
- 27) Ulaen, Alex J., *Nusa Utara Dalam Peta Sejarah Bahari Kumpulan Tulisan 2003-2004* (Manado: MarIn-CRC, 2010a)

- 28) \_\_\_\_\_, *Membaca Sangihe-Talaud Bibliografi 1724-2006*, Jilid I (Manado: MarIn-CRC, 2010b)
- 29) \_\_\_\_\_, "Miangas (Las Palmas) dalam Dinamika Wilayah Perbatasan Bahari", Makalah pada Konferensi Nasional Sejarah IX, Jakarta 5-7 Juli 2011 (Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011)
- 30) Ulaen, Alex dan Takashi Shiraishi, "The Traffic Zone Reconsidered: Menado-Sangihe/Talaud-Mindanao", di dalam Noboru Ishikawa (Ed.), *Flows and Movements in Southeastasia New Approaches to Transnationalism* (Kyoto: Kyoto University Press, 2011 [2004]) hlm. 34-51
- 31) Ulaen, Alex J., Triana Wulandari, Yuda B. Tangkilisan, *Sejarah Wilayah Perbatasan Miangas-Filipina 1928-2010 Dua Nama Satu Juragan* (Jakarta: Gramata, 2012)
- 32) Urry, John, "Mobilitas dan Teori Sosial" dalam Bryan S. Turner (Ed.), *TEORI SOSIAL: Dari Klasik sampai Postmodern*. Pustaka Pelajar, 2012.
- 33) Velasco, Djorina, "Between Manado and Davao: How the Indonesian Islands of Miangas is Making Use its Philippine Ties, di dalam *Newsbreak Online* (11 Februari 2007)
- 34) \_\_\_\_\_, "Navigating The Indonesian-Philippine Border: The Challenges of Life in The Borderzone", di dalam *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies*, 25 (1-2) hlm. 95-118 (2010)
- 35) Warren, James Francis, *THE SULU ZONE 1768 - 1898*. Singapore University Press.
- 36) Zaide, Sonia M. *THE PHILIPPINES: A UNIQUE NATION*. All-Nations Publishing Co. Inc. Quezon City, 1994.

**Sumber lain (Surat Kabar dan Halaman Internet):**

- Manado Post, Selasa 14 Agustus 2012
- Manado Post, Sabtu 15 September 2012
- Manado Post, Minggu 16 September 2012
- Manado Post, Senin 17 September 2012
- Tia Hapsari, "Universitas Indonesia Lepas Mahasiswa ke Pulau Miangas", dalam [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), Rabu 15 Juli 2009







# Studi Tentang Aspek-Aspek Sosial-Budaya Masyarakat Daerah Perbatasan: Studi Kasus Masyarakat di Pulau Miangas

Penulisan dengan tema utama penelitian bidang ekspresi keragaman budaya (tahun anggaran 2012) diberi judul: "Studi tentang Aspek-aspek Sosial-Budaya Masyarakat Daerah Perbatasan: Studi Kasus Masyarakat di Pulau Miangas".

Dalam studi ini, dari segi aspek budayanya, pusat perhatian ditunjukkan kepada 7 unsur kebudayaan yaitu (1) Sistem Peralatan dan Perlengkapan Hidup; (2) Sistem Mata Pencapaian Hidup; (3) Sistem Kemasyarakatan (Kekerabatan); (4) Bahasa dan Sastra; (5) Kesenian; (6) Sistem Pengetahuan; dan (7) Sistem Religi (Kepercayaan). Aspek sosialnya ditunjukkan pada (1) Mobilitas; (2) Identitas Sosial; dan (3) Ruang Jejaring Masyarakat Miangas.

Adapun paradigma yang digunakan dalam studi ini adalah fenomenologi dan pengumpulan data diawali dengan studi kepustakaan, berlanjut pada kerja lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan pengamatan lapangan atau observasi.

Beberapa temuan dalam studi ini adalah bahwa warga Miangas kini sedang berada dalam proses peralihan dari pendukung tradisi bahari menuju sebuah kebiasaan yang belum berbentuk dalam artian budaya. Peran Pranata-pranata tradisional semakin melemah yang terwujud dalam melemahnya peran tokoh-tokoh adat serta atraksi seni budaya yang hanya ditampilkan sekedar pengisi acara penjemputan tamu. Namun demikian, sumber daya manusia Miangas merupakan salah satu potensi yang perlu mendapat perhatian serius.

Studi Tentang Aspek-Aspek Sosial-Budaya Masyarakat Daerah Perbatasan: Studi Kasus Masyarakat di Pulau Miangas



**Penerbit Kepel Press**  
Puri Arsita A-6  
Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta

ISBN 978-602-9374-49-0



**Perpustakaan  
Jenderal Ke**

307.74

SO

S

